

SYARAT TAMBAHAN

untuk Usulan ke Guru Besar/Profesor

Hibah Penelitian Perguruan Tinggi

Pemberi Hibah:

Kementerian Pertahanan RI, Universitas Pertahanan RI

Kawasan IPSC Sentul, Sukahati, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
16810

Judul Penelitian

PENGARUH KEKUATAN EKONOMI CHINA DALAM PENINGKATAN NATIONAL
POWER NEGARA-NEGARA TRILATERAL AUKUS TERHADAP EKONOMI
INDONESIA

Kontrak

Surat Perintah Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia,
Nomor: SPRIN/004/IV/2022, Tanggal 19 April 2022, Jakarta.

Nama Dosen Pengusul: Posma Sariguna Johnson Kennedy
NIDN: 0331017403

UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOTA DINAS
NOMOR : B/ND/ 172 /XI/2022/LPPM

Kepada : Yth 1. Direktur Program S3 Unhan RI
2. Dekan Fakultas S2 Unhan RI
3. Dekan Fakultas S1 Unhan RI
4. Dekan Fakultas D3 Unhan RI

Dari : Kepala LPPM Unhan RI

Hal : Pengiriman Proposal Penelitian Dosen Unhan RI
TA. 2023

1. Dasar.

- a. Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- b. Keputusan Rektor Unhan Nomor: KEP/298/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Program Kerja dan Anggaran Universitas Pertahanan TA. 2022.
- c. Peraturan Rektor Universitas Pertahanan RI Nomor 65 Tahun 2021 tentang Revisi Buku Rencana Induk Penelitian Universitas Pertahanan RI.
- d. Program Kerja dan Anggaran LPPM Unhan RI TA. 2023.

2. Sehubungan dasar di atas, dimohon kepada Direktur S3 dan Dekan Fakultas S2, S1 dan D3 Unhan RI untuk menyampaikan kepada dosen peneliti di masing-masing agar segera mengirimkan Proposal Penelitian Dosen Unhan RI TA. 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tema Penelitian TA. 2023 (terlampir).
- b. Tahap Persiapan:
 - 1) Judul Penelitian yang diajukan agar mempedomani tema penelitian TA. 2023 sebagaimana tercantum pada poin 2.a. diatas.
 - 2) Tiap-tiap Prodi dapat menyiapkan 3 (tiga) judul penelitian dan telah melalui persetujuan Direktur dan Dekan selanjutnya dikirim ke LPPM Unhan RI sebelum tanggal 23 Desember 2022.

- 3) Tim Peneliti terdiri dari minimal 3 Dosen Peneliti dan maksimal 5 Dosen Peneliti dengan ketentuan 1 orang Dosen sebagai Ketua Peneliti dan yang lain sebagai anggota.
- 4) Dosen Peneliti diutamakan dosen yang akan naik pangkat jabatan akademik dan prodi yang dipersiapkan melaksanakan akreditasi.
- 5) Proposal Penelitian agar dikirimkan kepada Kepala LPPM Unhan RI dalam bentuk softcopy dan hardcopy hasil review Direktur dan Dekan paling lambat tanggal 28 Februari 2022.
- 6) Pengajuan proposal penelitian agar dilengkapi dengan pengajuan Rencana Kebutuhan Anggaran Penelitian sesuai alokasi maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan berpedoman pada Standar Biaya Umum dan peraturan yang berlaku.
- 7) Dosen Peneliti akan memaparkan pengajuan proposal penelitian dan pengajuan kebutuhan anggaran penelitian di depan Komite Penilaian Penelitian (Tim akademisi) dan/atau Reviewer.

c. Tahap Pelaksanaan:

- 1) Dosen Peneliti dapat melaksanakan penelitiannya setelah Proposal penelitian dan besaran anggarannya ditetapkan oleh Komite Penilaian Penelitian (Tim akademisi) dan/atau Reviewer kegiatan Penelitian Dosen Unhan RI TA. 2023.
- 2) Dosen Peneliti agar mengirimkan proposal penelitian yang telah ditetapkan Komite Penilaian Penelitian (Tim akademisi) dan/atau Reviewer ke LPPM Unhan RI c.q. Kasubbag TU sebagai bahan dokumen pencairan anggaran penelitian tahap I dengan melampirkan Surat Pengesahan Proposal Penelitian yang ditandatangani oleh Ses LPPM dan Kapuslit LPPM Unhan RI masing-masing sesuai bidangnya.
- 3) Dosen Peneliti wajib mengirimkan laporan perkembangan pelaksanaan penelitian 1 kali kepada LPPM Unhan RI di pertengahan rentang waktu penelitian atau 1 minggu setelah pelaksanaan penelitian di lapangan/lokasi penelitian atau sesuai yang tercantum dalam kontrak penelitian.

d. Tahap Pengakhiran:

- 1) Dosen Peneliti agar segera menyelesaikan penelitian dan mengirimkan hasil penelitian ke LPPM Unhan RI c.q. Kasubbag TU sebagai bahan dokumen pencairan anggaran penelitian tahap II dengan melampirkan Surat Pengesahan Hasil Penelitian yang ditandatangani oleh

Direktur/Dekan masing-masing sesuai bidangnya dan Kepala LPPM Unhan RI sebelum batas waktu kontrak penelitian berakhir. Dokumen dikirimkan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

- 2) Dokumen hasil penelitian yang dikirim ke LPPM Unhan RI agar dilengkapi dengan Rincian Penggunaan Anggaran Penelitian yang telah diterima dan bukti-bukti pertanggungjawaban keuangannya, seperti misalnya:
 - a) *Boarding pass* dan *bil hotel* untuk penggunaan pesawat dan penginapan.
 - b) Kuitansi, foto kopi STNK, Nomor NPWP perusahaan rental untuk penggunaan sewa kendaraan.
 - c) Kuitansi pembelian untuk penggunaan snack, makan, dan minum.
 - d) Kuitansi pembelian barang untuk penggunaan barang penelitian.
 - e) Bukti tanda tangan asli penerimaan honor.
 - f) Bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan lainnya sesuai penggunaannya.
- 3) Apabila Dosen Peneliti mengirimkan dokumen hasil penelitian melampaui batas waktu kontrak penelitian atau tidak bisa memberikan Rincian Penggunaan Anggaran Penelitian yang diterima dan bukti-bukti penggunaan anggarannya maka anggaran penelitian tahap II tidak bisa dicairkan atau tidak bisa dibayarkan kepada Peneliti dan yang bersangkutan wajib mengembalikan setengah dari anggaran penelitian tahap I yang telah diterimanya kepada LPPM Unhan RI, selanjutnya akan diserahkan kepada Rektor Unhan RI.
3. Format pengiriman judul penelitian terlampir.
4. Demikian mohon menjadikan perhatian.

Jakarta, 30 November 2022

Kepala Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat,

Dr. Ir. I Nengah Putra A, S.T., M.Si (Han)., ASEAN Eng., CIPA.
Laksamana Muda TNI

Tembusan:

1. Rektor Unhan RI
2. Warek I, II, III dan IV Unhan RI
3. Kasatwas Unhan RI
4. Karoum, Karo AK dan Karorenku Unhan RI.

**FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
PROGRAM STUDI EKONOMI PERTAHANAN**

NOTA DINAS

NOMOR : B/ND/ **084** /XII/2021/EP

Kepada : Yth. Dekan FMP Unhan RI
Dari : Sesprodi Ketahanan Energi FMP Unhan RI
Perihal : Pengajuan Judul Penelitian Dosen Prodi Ekonomi
pertahanan FMP Unhan RI TA. 2022

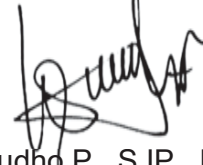
1. Dasar

- a. Keputusan Rektor Unhan Nomor: KEP/240/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Program Kerja dan Anggaran Universitas Pertahanan TA. 2021.
- b. Keputusan Rektor Unhan RI Nomor : KEP/213/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 tentang Kalender Akademik Program Magister (S-2) Universitas Pertahanan RI Tahun Akademik 2021/2022.
- c. Nota Dinas Ka. LPPM Nomor : B/ND/294/XII/2021/LPPM Tanggal 15 Desember 2021 Tentang Judul Penelitian Dosen TA. 2022.

2. Sehubungan dasar tersebut di atas, dengan ini disampaikan judul penelitian Dosen Prodi Ekonomi Pertahanan FMP Unhan RI TA. 2022 (Terlampir).
3. Demikian mohon menjadikan periksa.

Jakarta, **16** Desember 2021

Sekretaris Program Studi
Ekonomi Pertahanan,



Dr. Lukman Yudho P., S.IP., M.AP., CIQaR
Kolonel Laut (E) NRP 11427/P

Tembusan :

1. Wadep FMP Unhan RI
2. Kasubbag TU FMP Unhan RI.

**JUDUL PENELITIAN DOSEN TAHUN 2022
 PROGRAM STUDI EKONOMI PERTAHANAN FMP UNHAN RI**

NO	JUDUL PENELITIAN DOSEN	KORELASI DENGAN MATA KULIAH	NAMA PENELITI	MANFAAT UNTUK INSTANSI	KET
1	2	3	4	5	6
1	Pengembangan Ekonomi Pertahanan di Desa Wisata Kertayasa Kab. Pangandaran Jawa Barat	1. Pengantar Ekonomi Pertahanan 2. Perekonomian Indonesia	1. Kol. (Purn) Dr. Zainal Abidin S., M.M. (Ketua) 2. Kol. Arh Dr. R. Djoko Andreas Navalino., S.IP., M.AB (Anggota) 3. Dr. Supandi., S.Sos., M.M. (Anggota)	Untuk mendukung program pemerintah di bidang pariwisata, dengan meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan devisa negara selanjutnya akan berdampak pada anggaran pertahanan	
2	Kebijakan ACTA (ASEAN China Free Trade Area) dalam mendukung ekonomi pertahanan	1. Ekonomi Internasional 2. Ekonomi Makro	1. Kol. Arm Dr. Guntur Eko Saputro., S.IP., M.M., CIQnR (Ketua) 2. Kol. Laut (KH) D. Panji Suwarno., S.E., M.Si (Anggota) 3. Kol. Sus Dr. Drs. Suwito., M.Si (Anggota)	Untuk mengamankan kebijakan pemerintah dalam rangka ekspor import bahan mentah dan jadi, meningkatkan devisa negara yang berdampak langsung terhadap anggaran pertahanan negara.	
3	Intelijen Ekonomi Pertahanan Dalam Mengembangkan Capacity Building SDM Pertahanan	1. Ekonomi Pertahanan 2. Sosiologi Ekonomi	1. Laksda TNI Dr. Ivan Yulivan, S.E., M.M., M.Tr (Han) (Ketua) 2. Kol. Laut (E) Dr. Lukman Yudho P., S.IP., M.AP., CIQaR (Anggota) 3. Letkol Laut (PM) Dr. Djamarel Hermanto., S.T., M.M., M.T., CIQnR. (Anggota)	Meningkatkan kualitas intelijen Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Pertahanan, dan mendukung SDM pertahanan	

1	2	3	4	5	6
4	Pengaruh Kekuatan Ekonomi China dalam Peningkatan National Power Negara-Negara Triateral AUKUS	1. Ekonomi Internasional 2. Analisa Anggaran Pertahanan	1. Dr. Posma Sariguna Johnson Kennedy, S.T., S.E., M.Si, M.SE. (Ketua) 2. Brigjen TNI (Purn) Dr. Yudi Sutrasna M.M. (Anggota) 3. Dr. Haetami., M.Ag (Anggota)	Dengan kekuatan ekonomi China akan berdampak peningkatan ekspor Indonesia ke China yang berpengaruh terhadap devisa negara, dengan meningkatnya nasional power trilateral AUKUS maka akan meningkatkan balance kekuatan antara China dan AUKUS sehingga keamanan Tercipta keamanan yang kondusif di laut China Selatan	
5	Implementasi kebijakan Moneter Bank Indonesia pada Pengadaan Alutsista TNI	1. Kebijakan Industri Pertahanan 2. Pengadaan Alat Pertahanan dan Logistik	1. Kol. Chb (K) Dr. Sri Sundari., S.E., M.M. (Ketua) 2. Kol. Laut (E) Dr. Lukman Yudho P., S.IP., M.AP., CIQaR. (Anggota) 3. Laksda TNI Dr. Ivan Yulivan, S.E., M.M., M.Tr (Han) (Anggota)	Tugas pokok BI untuk menjaga moneter (Inflasi, Jumlah uang beredar, dan Nilai Tukar Rupiah), dengan stabil nya moneter maka akan berdampak langsung terhadap harga-harga Alpahankam terutama import	
6	Peran dan Fungsi perbankan dalam mendukung kesejahteraan Prajurit di daerah Penugasan Pertahanan Negara	1. Perekonomian Indonesia 2. Sosiologi Ekonomi	1. Mayjen TNI Dr. Susilo Adi Purwanto, S.E., M.Eng.Sc., CIQnR., CIQaR., IPU., CIPA. (Ketua) 2. Letkol Laut (PM) Dr. Djamarel Hermanto, S.T., M.M., M.T., CIQnR (Anggota) 3. Kol. Laut (KH) Dr. Panji Suwarno., S.E., M.Si. (Anggota)	Dengan adanya perbankan yang masuk ke daerah terpencil maka dengan sendirinya akan memudahkan prajurit untuk bertransaksi dan sangat bermanfaat untuk kesejahteraan prajurit	

1	2	3	4	5	6
7	Efektivitas Program Sosial Bank Indonesia terhadap UMKM dan dampaknya bagi Pertahanan di Kota Bogor	1. Ekonomi Mikro 2. Perekonomian Indonesia	1. Dr. Haetami., M.Ag (Ketua) 2. Letkol Tek Novky Asmoro., S.T., M.Si (Han) (Anggota) 3. Kol. Arh. Dr. R. Djoko Andreas Navalino., S.IP., M.AB (Anggota)	Dengan adanya program sosial Bank Indonesia terhadap UMKM maka akan meningkatkan pendapatan UMKM, dengan sendirinya berdampak positif kepada anggaran pertahanan	

Sekretaris Program Studi
Ekonomi Pertahanan,



Dr. Lukman Yudho P., S.IP., M.AP., CIQaR
Kolonel Laut (E) NRP 11427/P

UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOTA DINAS
Nomor : B/ND/ 34 /III/2022/LPPM

Kepada : Yth. Dosen tersebut dalam lampiran
Dari : Ketua LPPM Unhan RI
Perihal : Paparan Proposal Penelitian Dosen Unhan RI TA. 2022

1. Dasar.

- a. Peraturan Rektor Unhan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Buku Pedoman Penelitian Universitas Pertahanan.
- b. Keputusan Rektor Unhan Nomor: KEP/298/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Program Kerja dan Anggaran Universitas Pertahanan TA. 2022.
- c. Surat Perintah Rektor Unhan RI Nomor: SPRIN/128/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Akademisi dan Tim *Reviewer* Kegiatan Penelitian Dosen Unhan RI TA. 2022.
- d. Nota Dinas Ketua LPPM Unhan RI Nomor: B/ND/20/II/2022/LPPM tanggal 21 Februari 2022 tentang Hasil Penilaian Tim Akademik Proposal Penelitian Dosen Unhan RI TA. 2022.

2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan rencana jadwal paparan proposal Tim Peneliti dalam rangka kegiatan penelitian dosen Unhan RI TA. 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Paparan proposal penelitian dilaksanakan tanggal 10 Maret 2022 (rincian jadwal terlampir) bertempat di Ruang Kelas Unhan RI Salemba Jakarta Pusat kecuali Unggulan FLM dengan metode daring yang dilaksanakan tanggal 11 Maret 2022, dengan rincian jumlah per Puslit sebagai berikut:
 - 1) Puslit Strahan = 14 Proposal; (S3 = 1, S2 FSP = 10 dan S1 FFM = 3)
 - 2) Puslit Jemenhan = 14 Proposal; (S2 FMP = 12 dan S1FKM = 2)
 - 3) Puslit Kamnas = 14 Proposal; (S2 FKN = 4 dan S1 MIPAM = 10)
 - 4) Puslit Tekinhan = 14 Proposal; (S2 FTP = 5 dan FTM = 9)
 - 5) Puslit BN & PKM = 4 Proposal (Unggulan FLM)

b. Bahan...

- b. Bahan paparan tim peneliti terpilih (slide dan naskah proposal 4 rangkap) sudah diterima para kapuslit yang membidangi fakultas masing-masing paling lambat H-2 sesuai jadwal terlampir yang telah ditentukan.
 - c. Paparan tim peneliti akan dihadiri oleh Tim *Review* Penelitian yang telah ditunjuk sesuai surat perintah Rektor Unhan RI.
 - d. Ketua Tim peneliti diharapkan hadir pada kegiatan paparan proposal dimaksud karena akan dilanjutkan penandatanganan kontrak, dengan menggunakan seragam/pakaian sesuai ketentuan yang berlaku saat itu.
 - e. Apabila ada perubahan rencana kegiatan sesuai perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang serta kebijakan pimpinan, akan diinformasikan kepada seluruh pihak terkait pada kesempatan pertama.
3. Demikian untuk menjadikan pemeriksaan.

Bogor, 4 Maret 2022

Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat,



Sammy Ferrijana, S.Sos., M.Si
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

- 1. Rektor Unhan RI
- 2. Warek I, II, III dan IV Unhan RI
- 3. Kasatwas Unhan RI
- 4. Ka LPPPM Unhan RI
- 5. Direktur Program Doktoral Unhan RI
- 6. Dekan FSP, FMP, FKN dan FTP Unhan RI
- 7. Dekan FFM, FKM, FMIPAM dan FTM Unhan RI
- 8. Dekan FLM Unhan RI
- 9. Karoum, Karo AK dan Karorenku Unhan RI.

**JADWAL PAPARAN PROPOSAL PENELITIAN DOSEN FMP DAN FKM UNHAN RI
 DI PUSLIT JEMENHAN TA. 2022**

NO	NAMA/PANGKAT/GOLONGAN	JUDUL PROPOSAL	TGL	JAM	KET
1	2	3	4	5	6
1.	1. Laksda TNI (Purn) Dr. Sulistiyanto, S.E., M.M., M.sc., PSC 2. Mayjen TNI Dr. Susilo Adi Purwanto, S.E., M.Eng.Sc., CIQnR., CIQaR., IPU., CIPA 3. Kolonel Caj Dr. Drs. Much Muallim, M.Pd	Pengelolaan Industri Pertahanan ASEAN dalam mendukung Dinamika Keamanan Kawasan Indo-Pasifik	10 Maret 2022	09.00 – 09.20	TIM REVIEWER IV Tempat Ruang Kelas IV
2.	1. Kolonel Chb (K) Dr. Sri Sundari., S.E., M.M. (Ketua) 2. Kolonel Laut (E) Dr. Lukman Yudho P., S.IP., M.AP., CIQaR. (Anggota) 3. Laksda TNI Dr. Ivan Yulivan, S.E., M.M., M.Tr (Han) (Anggota)	Implementasi kebijakan Moneter Bank Indonesia pada Pengadaan Alutsista TNI	10 Maret 2022	09.20 – 09.40	
3.	1. Kolonel (Purn) Dr. Edy Saptono, M.M 2. Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyanto, B.Sc., S.Pd., M.Pd 3. Brigjen TNI Dr. Resmanto Widodo Putro, S.Sos., M.M.	Pengelolaan Komponen Cadangan Matra Darat Dalam Pembangunan Postur Pertahanan Untuk Menghadapi Ancaman di Provinsi Kalimantan Barat	10 Maret 2022	09.40 – 10.00	
4.	1. Kolonel (Purn) Dr. Zainal Abidin S., M.M. (Ketua) 2. Kolonel Arh Dr. R. Djoko Andreas Navalino., S.IP., M.AB (Anggota) 3. Dr. Supandi., S.Sos., M.M. (Anggota)	Pengembangan Ekonomi Pertahanan di Desa Wisata Kertayasa Kab. Pangandaran Jawa Barat	10 Maret 2022	10.00 – 10.20	

NO	NAMA/PANGKAT/GOLONGAN	JUDUL PROPOSAL	TGL	JAM	KET
1	2	3	4	5	6
5.	1. Laksada TNI Dr. Suyono Thamrin, Drs., S.T., M. Eng.Sc., CIQnR, IPU 2. Kolonel Czi Wayan Nuryada, S.H, M.Si (Han) 3. Nugroho Adi Sasongko, S.T, M.Sc, Ph.D, CIQnR	Perkembangan penguasaan teknologi kapal selam nuklir Australia terhadap stabilitas keamanan di Indo-Pasifik	10 Maret 2022	10.20 – 10.40	TIM REVIEWER IV
6.	1. Dr. Ir. Rudy Laksmono W, M.T (Ketua) 2. Prof. Ir. M. Sidik Boedoyo, M.Eng (Anggota) 3. Kolonel Laut (S) Dr. M. Ikhwani Syahtaria, S.T., M.M (Anggota)	Pengembangan Bio-Energi pada Lahan Kritis di NTT dalam Mendukung Ketahanan Energi Nasional	10 Maret 2022	10.40 – 11.00	
7.	1. Dr. Ir. Imam Supriyadi, M.M (Ketua) 2. Laksda TNI (Purn) Dr. Ir Suyono Thamrin, Drs., S.T., M.Eng.Sc., M.Tr.Opsla., CIQnR., CIQaR., IPU., CPHCM., CIPA (Anggota) 3. Kolonel Laut (KH) Dr. Ir. Yanif Dwi Kuntjoro, M.Si (Anggota)	Pengembangan PLTS dalam Memperkuat Ketahanan Energi di Pulau Semau, Perbatasan RI-RDTL	10 Maret 2022	11.00 – 11.20	
8.	1. Dr. Haetami., M.Ag (Ketua) 2. Letkol Tek Novky Asmoro., S.T., M.Si (Han) (Anggota) 3. Kol. Arh. Dr. R. Djoko Andreas Navalino., S.IP., M.AB (Anggota)	Efektivitas Program Sosial Bank Indonesia terhadap UMKM dalam mewujudkan ketahanan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 di Kota Bogor	10 Maret 2022	11.20 – 11.40	Tempat Ruang Kelas IV
9.	1. Kolonel Laut (PM) Dr. Lutfi Adin Affandi, M.M 2. Marsda TNI (Purn) Dr. Siswo Pudjiatmoko, S.E., M.Si (Han) 3. Kolonel Laut (KH) Dr. Dwi Ari Purwanto, S.Pd., M.Pd	Membangun Sumber Daya Manusia Unggulan di Wilayah Perbatasan Republik Indonesia dengan Republik Demokrasi Timur Leste Dalam Rangka Memperkuat Pertahanan Negara	10 Maret 2022	11.40 – 12.00	
					ISHOMA 12.00 – 13.00

NO	NAMA/PANGKAT/GOLONGAN	JUDUL PROPOSAL	TGL	JAM	KET
1	2	3	4	5	6
10.	1. Dr. Posma Sariguna Johnson Kennedy, S.T., S.E., M.Si, M.SE. 2. Brigjen TNI (Purn) Dr. Yudi Sutrasna M.M. 3. Dr. Haetami., M.Ag	Pengaruh Kekuatan Ekonomi China dalam Peningkatan National Power Negara-Negara Triateral AUKUS terhadap Ekonomi Indonesia	10 Maret 2022	13.00 – 13.20	TIM REVIEWER IV Tempat Ruang Kelas IV
11.	1. Kolonel Laut (S) Dr. Ikhwan Syahtaria, ST., M.M. 2. Dr. Ir. Imam Supriyadi, M.M. 3. Dr. Ir. Donny Yoesgiantoro, MM, M.PA.	Penguatan Infrastruktur Pertahanan di Blok ambalat dalam melindungi sumber daya energi guna mendukung Ketahanan Energi Nasional	10 Maret 2022	13.20 – 13.40	
12.	1. Kol Inf Dr Guntur Eko Saputro, S.IP. MM. 2. Kol Laut (KH) Dr Panji Suwarno, SE., M.Si., CIQnR 3. Kol Dr.Suwito, M.Si .	Implementasi Kebijakan Elektronifikasi Ekonomi Digital Bank Indonesia Sebagai Bentuk Pertahanan Nirmiliter	10 Maret 2022	13.40 – 14.00	
13.	1. Kolonel Laut (K) dr.RM Tjahja Nurrobi, MKes, SpOT (K) Hand. 2. dr. Eiles Fitriani, M.biomed (AAM). CIQaR., CIQnR. 3. dr. Venty Muliana Sari. M.Sc., M.Si. Med., CIQaR. 4. dr. Radietya Alvarabie, M.biomed AIFO-K 5. dr. Hanifah, MKes., CIQnR.	Efektivitas Media Pembelajaran Plastinasi dibandingkan Video Ajar terhadap Tingkat Pemahaman Ilmu Anatomi Sistem Muskuloeskeletal pada Kadet Mahasiswa FK Militer Unhan Ri	10 Maret 2022	14.00 – 14.20	

1	2	3	4	5	6
14.	1. dr. Taureni Hayati. Sp.PK (K) 2. Dr.dr. Reza Yuridian Purwoko, Sp.KK 3. dr. Elies Fitriani, M.biomed (AAM), CIQaR., CIQnR. 4. dr. Venty Muliana Sari, M.Sc., M.Si.Med., CIQaR 5. dr. M. Dimas Reza Rahmana M.Biomed	Pembuatan Panduan Metode Diagnostik Cut-Off dan Terapi Adjuvan Terhadap Peningkatan Antibodi Serta Imunitas Pra-Paska Vaksinasi Covid-19 Sebagai Suatu Model Ketahanan Nasional di Bidang Kesehatan	10 Maret 2022	14.20 – 14.40	TIM REVIEWER IV Tempat Ruang Kelas IV

NB : Nama Tim Reviewer IV, sbb;

1. Dr. Drs. Yuli Subiakto, M.Si., Apt
2. Dr. Riri Murniati, S.Si., M.Si
3. Hadi Wahyudi, S.T., M.T., Ph.D
4. Yanto, S.T., M.S.E., Ph.D

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat,



Sammy Ferrijana, S.Sos., M.Si
Mayor Jenderal TNI



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI**

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
NOMOR : KEP/162/III/2022**

TENTANG

**PENETAPAN DOSEN PENELITI SERTA JUMLAH BANTUAN DANA PENELITIAN
PADA KEGIATAN PENELITIAN INTERNAL DOSEN UNHAN RI TA. 2022**

REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN RI

- Menimbang** : a. Bahwa kegiatan penelitian adalah salah satu unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dijaga dan ditingkatkan mutunya demi penguatan kelembagaan Universitas Pertahanan RI;
- b. bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan pengembangan mutu serta meningkatkan kualitas Penelitian Dosen di lingkungan Universitas Pertahanan RI, perlu ditetapkan nama-nama Dosen Peneliti sebagai penerima bantuan biaya penelitian tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2017 tentang Dosen di Lingkungan Universitas Pertahanan;
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Daftar Susunan Personel dan Tata Kerja Universitas Pertahanan;
5. Surat Keputusan Rektor Unhan RI Nomor: KEP/298/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Program Kerja dan Anggaran Universitas Pertahanan TA. 2022;
6. Surat Perintah Rektor Unhan RI Nomor: SPRIN/128/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang tugas sebagai Tim Akademisi dan Reviewer Penyelenggara Kegiatan Penelitian Dosen Unhan RI TA. 2022;
- Memperhatikan** : Kewajiban pada setiap tenaga pengajar atau dosen di Perguruan Tinggi melakukan penelitian ilmiah.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PERTAHANAN RI TENTANG PENETAPAN DOSEN PENELITI SERTA JUMLAH BANTUAN DANA PENELITIAN INTERNAL PADA KEGIATAN PENELITIAN DOSEN UNHAN RI TA. 2022.
- KESATU : Nama-nama Dosen Penerima bantuan biaya penelitian sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Dosen Peneliti yang akan dibiayai untuk pelaksanaan penelitian Tahun 2022 wajib mengacu pada peraturan Rektor Unhan Nomor 42 Tahun 2016, Panduan Penelitian serta aturan lainnya yang dikeluarkan oleh LPPM Unhan RI;
- KETIGA : Dosen Peneliti dalam Pelaksanaan Peneliti wajib melaporkan kemajuan hasil penelitian serta memasukan hasil Laporan akhir hasil penelitian kepada LPPM Unhan RI;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan RKA / Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia dalam DIPA LPPM Unhan RI Tahun 2022;
- KELIMA : Dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan bilamana kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya serta diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KETUJUH : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Warek I, Warek II, Warek III dan Warek IV Unhan RI
 2. Kasatwas Unhan RI
 3. Direktur Program Doktorat Unhan RI
 4. Dekan FSP, FMP, FKN dan FTP Unhan RI
 5. Dekan FFM, FKM, FMIPAM dan FTM Unhan RI
 6. Dekan FLM Unhan RI
 7. Karoum, Karo AK dan Karorenku Unhan RI

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 16 Maret 2022

Rektor
Universitas Pertahanan
Republik Indonesia,



Prof. Dr. Amirullah Octavian, M.Sc., DESD., ASEAN Eng.
Laksamana Madya TNI

Lampiran II Keputusan Rektor Unhan RI
 Nomor : BND/02/III/2022
 Tanggal : 16 Maret 2022

DAFTAR NAMA PENELITIAN DAN JUDUL PENELITIAN DOSEN FMP DAN FKM UNHAN RI TA. 2022

NO	NAMA/PANGKAT/GOLONGAN	JUDUL PROPOSAL	ANGGARAN	PRODI	FAKULTAS
1	2	3	6	5	7
1	1. Laksda TNI (Purn) Dr. Sulistiyanto, S.E., M.M., M.Sc., PSC	Pengelolaan Industri Pertahanan ASEAN dalam mendukung Dinamika Keamanan Kawasan Indo-Pasifik	44.200.000	Manajemen Pertahanan	Fakultas Manajemen Pertahanan
	2. Mayjen TNI Dr. Susilo Adi Purwantoro, S.E.M.Eng.Sc., CIQnR., CIQAR., IPU., CIPA				
	3. Kolonel Caj Dr. Drs. Much Muallim, M.Pd				
	1. Kolonel Chb (K) Dr. Sri Sundari., S.E., M.M.				
2	2. Kolonel Laut (E) Dr. Lukman Yudho P., S.IP., M.AP., CIQAR.	Implementasi kebijakan Moneter Bank Indonesia pada Pengadaan Alutsista TNI	46.850.000	Ekonomi Pertahanan	Fakultas Manajemen Pertahanan
	3. Laksda TNI Dr. Ivan Yulivan, S.E., M.M., M.Tr (Han)				
	4. Brigjen TNI Munif Prasjojo				
	1. Kolonel (Purn) Dr. Edy Saptono, M.M				
3	2. Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyanto, B.Sc., S.Pd., M.Pd	Pengelolaan Komponen Cadangan Matra Darat Dalam Pembangunan Postur Pertahanan Untuk Menghadapi Ancaman di Provinsi Kalimantan Barat	56.850.000	Manajemen Pertahanan	Fakultas Manajemen Pertahanan
	3. Brigjen TNI Dr. Resmanto Widodo Putro, S.Sos., M.M.				
	4. Kol. Czi Ir. Kristijarso, S.I.P., M.M				
	1. Kolonel (Purn) Dr. Zainal Abidin S., M.M.				
4	2. Kolonel Arh Dr. R. Djoko Andreas Navalino., S.IP., M.AB	Pengembangan Ekonomi Pertahanan di Desa Wisata Kertayasa Kab. Pangandaran Jawa Barat	46.850.000	Ekonomi Pertahanan	Fakultas Manajemen Pertahanan
	3. Letkol Laut (P) Dr. Djamarul Hermanto, S.T., M.M., M.T., CIQnR				
	1. Laksda TNI Dr. Suyono Thamrin, Drs., S.T., M.Eng.Sc., CIQar., CIQnR, IPU				
	2. Kolonel Czi Wayan Nuryada, S.H, M.Si (Han)				
5	3. Nugroho Adi Sasongko, S.T, M.Sc, Ph.D, CIQnR	Perkembangan penguasaan teknologi kapal selam nuklir Australia terhadap stabilitas keamanan di Indo-Pasifik	54.200.000	Ketahanan Energi	Fakultas Manajemen Pertahanan
	4. Kolonel Caj Dr. Anifudin Uksan, S.Ag., M.Ag				
	1. Dr. Ir. Rudy Laksmono W, M.T				
	2. Prof. Ir. M. Sidiq Boedoyo, M.Eng				
6	3. Kolonel Laut (S) Dr. M. Ikhwani Syahtaria, S.T., M.M	Pengembangan Bio-Energi pada Lahan Kritis di NTT dalam Mendukung Ketahanan Energi Nasional	63.200.000	Ketahanan Energi	Fakultas Manajemen Pertahanan
	1. Dr. Ir. Imam Supriyadi, M.M				
	2. Laksda TNI (Purn) Dr. Ir Suyono Thamrin, Drs., S.T., M.Eng.Sc., M.Tr.Opsla., CIQnR., CIQAR., IPU., CPHCM., CIPA				
	3. Kolonel Laut (KH) Dr. Ir. Yanif Dwi Kuntjoro, M.Si				
7		Pengembangan PLTS dalam Memperkuat Ketahanan Energi di Pulau Semau, Perbatasan RI-RDTL	63.200.000	Ketahanan Energi	Fakultas Manajemen Pertahanan

1	2	3	6	5	7
1	1. Dr. Haetami, M.Ag	Efektivitas Program Sosial Bank Indonesia terhadap UMKM dalam mewujudkan ketahanan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 di Kota Bogor	44.200.000	Ekonomi Pertahanan	Fakultas Manajemen Pertahanan
8	2. Letkol Tek Novky Asmoro., S.T., M.Si (Han) 3. Kol. Arh. Dr. R. Djoko Andreas Navalino., S.IP., M.AB				
9	1. Kolonel Tek Dr. Hikmat Zakky Almubaroq, S.Pd., M.Si. 2. Marsda TNI (Purn). Dr. Agus Sudarya, S.E., S.H., M.M., M.Si (Han) 3. Kolonel Laut (PM) Dr. Lufi Adin Affandi, M.M	Membangun Sumber Daya Manusia Unggulan di Wilayah Perbatasan Republik Indonesia dengan Republik Demokrasi Timur Leste Dalam Rangka Memperkuat Pengaruh Kekuatan Ekonomi China dalam Peningkatan National Power Negara-Negara Triateral AUKUS terhadap Ekonomi	63.200.000	Manajemen Pertahanan	Fakultas Manajemen Pertahanan
10	1. Dr. Posma Sariguna Johnson Kennedy, S.T., S.E., M.Si, M.SE. 2. Brigjen TNI (Purn) Dr. Yudi Sutrasna M.M. 3. Dr. Haetami., M.Ag		44.200.000	Ekonomi Pertahanan	Fakultas Manajemen Pertahanan
11	1. Kolonel Laut (S) Dr. Ikhwani Syahdaria, ST., M.M. 2. Dr. Ir. Imam Supriyati, M.M. 3. Dr. Ir. Donny Yoesgiantoro, MM, M.PA.	Penguatan Infrastruktur Pertahanan di Blok ambalat dalam melindungi sumber daya energi guna mendukung Ketahanan Energi	63.200.000	Manajemen Pertahanan	Fakultas Manajemen Pertahanan
12	1. Kol Arm Dr Guntur Eko Saputro, S.IP. MM. 2. Kol Laut (KH) Dr Panji Suwamo, SE, M.Si., CIQnR 3. Kol Dr. Suwito, M.Si.	Implementasi Kebijakan Elektronifikasi Ekonomi Digital Bank Indonesia Sebagai Bentuk Pertahanan Nirmiliter	44.200.000	Ekonomi Pertahanan	Fakultas Manajemen Pertahanan
13	1. Kolonel Laut (K) dr.RM Tjahja Nurrobbi, MKes, SpOT (K) Hand. 2. dr. Elies Fitriani, M.biomed (AAM), CIQaR., CIQnR. 3. dr. Venty Muliana Sari, M.Sc., M.Si.Med., CIQaR. 4. dr. Radietya Alvarabie, M.biomed AIFO-K 5. dr. Hanifah, MKes., CIQnR.	Efektivitas Media Pembelajaran Plastinasi dibandingkan Video Ajar terhadap Tingkat Pemahaman Ilmu Anatomi Sistem Muskuloskeletal pada Kadet Mahasiswa FK Militer Unhan Ri	49.500.000	Kedokteran Militer	Fakultas Kedokteran Militer
14	1. dr. Taureni Hayati, Sp.PK (K) 2. Dr.dr. Reza Yuridian Purwoko, Sp.KK 3. dr. Elies Fitriani, M.biomed (AAM), CIQaR., CIQnR. 4. dr. Venty Muliana Sari, M.Sc., M.Si.Med., CIQaR 5. dr. M. Dimas Reza Rahmana M.Biomed	Pembuatan Panduan Metode Diagnostik Kulit Off dan Terapi Adjuvan Terhadap Peningkatan Antibodi Serta Imunitas Pra-paska Vaksinasi Covid-19 Sebagai Suatu Model Ketahanan Nasional di Bidang Kesehatan	72.500.000	Kedokteran Militer	Fakultas Kedokteran Militer

Rektor
Universitas Pertahanan
Republik Indonesia,



Dr. Ir. Amanulla Octavian, M.Sc., DESD., ASEAN Eng.
Laksamana Madya TNI

SPRIN PENELITIAN



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI

SURAT PERINTAH
NOMOR : SPRIN/1004/IV/2022

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan Penelitian Dosen Unhan RI, tentang Penelitian Dosen S1, S2, S3 dan D3 di masing-masing Fakultas Unhan RI TA. 2022, perlu dikeluarkan Surat Perintah;

Dasar : 1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Daftar Susunan Personel dan Tata Kerja Universitas Pertahanan;
2. Keputusan Rektor Unhan RI Nomor: KEP/298/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Program Kerja dan Anggaran Universitas Pertahanan TA. 2022;
3. Keputusan Rektor Unhan RI Nomor: KEP/102/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Penetapan Dosen Peneliti Serta Jumlah Bantuan Dana Penelitian Pada Kegiatan Penelitian Internal Dosen Unhan RI TA. 2022.

DIPERINTAHKAN:

Kepada : Nama :)
Pangkat/Gol/NIP/NRP :)
Jabatan :)
: sebagaimana tercantum dalam
lampiran surat perintah ini

Untuk : 1. Seterimanya surat perintah ini di samping tugas dan tanggung jawab jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai tim peneliti di masing-masing Fakultas dalam rangka kegiatan penelitian Dosen Unhan RI TA. 2022.
2. Laporkan kepada atasan masing-masing sebelum dan sesudah melaksanakan surat perintah ini.
3. Melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2022

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Republik Indonesia
Warek II Bid. Umum dan Keuangan,



Erwin Bambang Tetuko
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Rektor Unhan RI
2. Warek I, III dan IV Unhan RI
3. Kasatwas Unhan RI
4. Ka LPPM dan Ka LPPPM Unhan RI
5. Direktur Program Doktorat Unhan RI
6. Dekan FSP, FMP, FKN dan FTP Unhan RI
7. Dekan FFM, FKN, FMIPAM dan FTM Unhan RI
8. Dekan FLM Unhan RI
9. Karoum, Karo AK dan Karorenku Unhan RI.

Lampiran II Surat Perintah Rektor Unhan
 Nomor : SPRIN/ 004 /IV/2022
 Tanggal : 19 April 2022

**DAFTAR NAMA TIM PENELITI DAN JUDUL PENELITIAN
 DOSEN FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN DAN FAKULTAS KEDOKTERAN MILITER UNHAN RI TA. 2022**

NO	NAMA	PANGKAT/GOL/NRP/INIP	JABATAN		JUDUL
			STRUKTURAL/FUNGSIONAL	TIM	
1	2	3	4	5	6
1	1. Dr. Sulistiyanto, S.E., M.M., M.sc., PSC	Laksda TNI (Purn)	Dosen Prodi MP FMP Unhan RI	Peneliti Utama	Pengelolaan Industri Pertahanan ASEAN dalam mendukung Dinamika Keamanan Kawasan Indo-Pasifik
	2. Dr. Susilo Adi Purwanto, S.E.M.Eng.Sc., CIQnR., CIQaR., IPU., CIPA	Mayjen TNI	Dekan FMP Unhan RI	Anggota	
	3. Dr. Drs. Much Muallim, M.Pd	Kolonel Cai/34135	Dosen Prodi MP FMP Unhan RI	Anggota	
2	1. Dr. Sri Sundari., S.E., M.M. (Ketua)	Kolonel Chb (K)/1910010560565	Dosen Prodi EP FMP Unhan RI	Peneliti Utama	Implementasi kebijakan Moneter Bank Indonesia pada Pengadaan Alutsista TNI
	2. Dr. Lukman Yudho P., S.IP., MAP., CIQaR.	Kolonel Laut (E) 11427/P	Dosen Prodi SPL FSP Unhan RI	Anggota	
	3. Dr. Ivan Yulivan, S.E., M.M., M.Tr (Han)	Laksda TNI	Dosen Prodi EP FMP Unhan RI	Anggota	
	4. Munif Prasjojo, S.I.P., M.Han	Brigjen TNI			
3	1. Dr. Edy Saptono, M.M	Kolonel (Purn)	Dosen Prodi MP FMP Unhan RI	Peneliti Utama	Pengelolaan Komponen Cadangan Matra Darat Dalam Pembangunan Postur Pertahanan Untuk Menghadapi Ancaman di Provinsi Kalimantan Barat
	2. Makmur Supriyanto, B.Sc., S.Pd., M.Pd	Brigjen TNI (Purn)	Dosen Prodi MP FMP Unhan RI	Anggota	
	3. Dr. Resmanto Widodo Putro, S.Sos., M.M.	Brigjen TNI	Dosen Prodi MP FMP Unhan RI	Anggota	
	4. Ir. Kristijarso, S.IP., M.M.	Kolonel Czi /32805	Kapuslit Tekindhan LPPM Unhan RI	Anggota	

4 Dr. Zainal...

1	2	3	4	5	6
4	1. Dr. Zainal Abidin S., M.M. 2. Dr. R. Djoko Andreas Navalino., S.IP., M.AB 3. Dr. Djamarel Hermanto, S.T., M.M., M.T., CIQnR.	Kolonel (Purn) Kolonel Arh/1910046130568 Letkol Laut (PM) /13982/P	Dosen Prodi EP FMP Unhan RI Dosen Prodi EP FMP Unhan RI Dosen Prodi EP FMP Unhan RI	Peneliti Utama Anggota Anggota	Pengembangan Ekonomi Pertahanan di Desa Wisata Kertayasa Kab. Pangandaran Jawa Barat
5	1. Dr. Suyono Thamrin, Drs., S.T., M. Eng.Sc., CIQar., CIQnR, IPU 2. Wayan Nuriada, S.H, M.Si (Han) 3. Nugroho Adi Sasongko, S.T, M.Sc, Ph.D, CIQnR 4. Dr. Arifuddin Uksan, S.Ag., M.Ag., CIQnR	Laksda TNI Kolonel Czi/ 1900025270265 Penata III/d /198306192010121002 Kolonel Caj /11960014550170	Dosen Prodi KE FMP Unhan RI Dosen Prodi SPS FSP Unhan RI Dosen Prodi KE FMP Unhan RI Dosen Prodi MP FMP Unhan RI	Peneliti Utama Anggota Anggota Anggota	Perkembangan penguasaan teknologi kapal selam nuklir Australia terhadap stabilitas keamanan di Indo-Pasifik
6	1. Dr. Ir. Rudy Laksmono W, M.T 2. Prof. Ir. M. Sidik Boedoyo, M.Eng 3. Dr. M. Ikhwan Syahtaria, S.T., M.M	Pembina IV/c 195908121985031002 Pembina IV/e /195102201980091001 Kolonel Laut (S) /9869/P	Dosen Prodi KE FMP Unhan RI Dosen Prodi KE FMP Unhan RI Dosen Prodi SPL FSP Unhan RI	Peneliti Utama Anggota Anggota	Pengembangan Bio-Energi pada Lahan Kritis di NTT dalam Mendukung Ketahanan Energi Nasional
7	1. Dr. Ir. Imam Supriyadi, M.M 2. Dr. Ir. Suyono Thamrin, Drs., S.T., M.Eng.Sc., M.Tr.Opsla., CIQnR., CIQaR., IPU., CPHCM., CIPA 3. Dr. Ir. Yanif Dwi Kuntjoro, M.Si	Penata Tk I III/d Laksda TNI (Purn) Kolonel Laut (KH) 10052/P	Dosen Prodi KE FMP Unhan RI Dosen Prodi KE FMP Unhan RI Dosen Prodi Matematika FMIPAM Unhan RI	Peneliti Utama Anggota Anggota	Pengembangan PLTS dalam Memperkuat Ketahanan Energi di Pulau Semau, Perbatasan RI- RDTL

8 dr.RM Tjahja ...

1	2	3	4	5	
8	1. Dr. Haetami., M.Ag 2. Novky Asmoro., S.T., M.Si (Han) 3. Dr. R. Djoko Andreas Navalino., S.IP., M.AB	Pembina Tk. I IV/b /197009131995021001 Letkol Tek /527045 Kolonel Arh /1910046130568	Dosen Prodi EP FMP Unhan RI Dosen Prodi EP FMP Unhan RI Dosen Prodi EP FMP Unhan RI	Peneliti Utama Anggota Anggota	E B U k P B
9	1. Dr. Hikmat Zakky Almubaroq, S.Pd., M.Si. 2. Dr. Agus Sudarya, S.E., S.H.,M.M., M.Si (Han) 3. Dr. Lutfi Adin Affandi, M.M	Kolonel Tek / 518808 Marsda TNI (Purn) Kolonel Laut (P) 12171 (P)	Dosen Prodi SPU FSP Unhan RI Dosen Prodi MP FMP Unhan RI Dosen Prodi MP FMP Unhan RI	Peneliti Utama Anggota Anggota	N N V R R L M N
10	1. Dr. Posma Sariguna Johnson Kennedy, S.T., S.E., M.Si, M.SE. 2. Dr. Yudi Sutrasna M.M. 3. Dr. Haetami., M.Ag	- Brigjen TNI (Purn) Pembina Tk. I IV/b 197009131995021001	Dosen Prodi EP FMP Unhan RI Dosen Prodi EP FMP Unhan RI Dosen Prodi EP FMP Unhan RI	Peneliti Utama Anggota Anggota	F E F F T E
11	1. Dr. Ikhwan Syahtaria, ST., M.M. 2. Dr. Ir. Imam Supriyadi, M.M. 3. Dr. Ir. Donny Yoesgiantoro,MM, M.PA.	Kolonei Laut (S) /9869/P Penata Tk I III/d (Penyetaraan) Penata Tk I III/d (Penyetaraan)	Dosen Prodi KE FMP Unhan RI Dosen Prodi KE FMP Unhan RI Dosen Prodi KE FMP Unhan RI	Peneliti Utama Anggota Anggota	F F s r I

1	2	3	4	5	6
12	1. Dr Guntur Eko Saputro, S.I.P. MM. 2. Dr Panji Suwarno, SE.,M.Si., CIQnR 3. Dr.Suwito,M.Si .	Kolonel Armi/ 11950052670973 Kolonel Laut (KH) 11827/P Kolonel Sus/ 518312	Dosen Prodi EP FMP Unhan RI Dosen Prodi EP FMP Unhan RI Kapus Publikasi dan Jurnal Ilmiah LPPM Unhan RI	Peneliti Utama Anggota Anggota	Implementasi Kebijakan Elektronifikasi Ekonomi Digital Bank Indonesia Sebagai Bentuk Pertahanan Nirmiliter
13	1. dr.RM Tjahja Nurrobi, MKes, SpOT (K) Hand. 2. dr. Elies Fitriani,M.biomed (AAM),CIQaR., CIQnR. 3. dr. Venty Muliana Sari,M.Sc., M.Si.Med., CIQaR. 4. dr. Radetya Alvarabie, M.biomed AIFO-K 5. dr. Hanifah, MKes.,CIQnR.	Kolonel Laut (K) 10836/P - - - - Pembina IV/a 197408012006042002	Dosen Prodi Kedokteran FKM Unhan RI Dosen Prodi Kedokteran FKM Unhan RI Dosen Prodi Kedokteran FKM Unhan RI Dosen Prodi Kedokteran FKM Unhan RI Dosen Prodi Kedokteran FKM Unhan RI	Peneliti Utama Anggota Anggota Anggota Anggota	Efektivas Media Pembelajaran Plastinasi dibandingkan Video Ajar terhadap Tingkat Pemahaman Ilmu Anatomi Sistem Muskuloeskeletal pada Kadet Mahasiswa FK Militer Unhan RI
14	1. dr. Tauren Hayati. Sp.PK (K) 2. Dr.dr. Reza Yuridian Purwoko, Sp.KK 3. dr. Elies Fitriani,M.biomed (AAM), CIQaR., CIQnR. 4. dr. Venty Muliana Sari,M.Sc., M.Si.Med., CIQaR 5. dr. M. Dimas Reza Rahmana M.Biomed	- - - - -	Dosen Prodi Kedokteran FKM Unhan RI Dosen Prodi Kedokteran FKM Unhan RI Dosen Prodi Kedokteran FKM Unhan RI Dosen Prodi Kedokteran FKM Unhan RI Dosen Prodi Kedokteran FKM Unhan RI	Peneliti Utama Anggota Anggota Anggota Anggota	Pembuatan Panduan Metode Diagnostik Cut-Off dan Terapi Adjuvan Terhadap Peningkatan Antibodi Serta Imunitas Pra-Paska Vaksinasi Covid-19 Sebagai Suatu Model Ketahanan Nasional di Bidang Kesehatan

a.n Rektor
Universitas Pertahanan
Republik Indonesia,
Warak: Bidang Umum dan Keuangan,

Erwin Bambang Tetuko
Mayor Jenderal TNI



LAPORAN HASIL PENELITIAN

D-LPPM NOMOR 24

**PENGARUH KEKUATAN EKONOMI CHINA DALAM
PENINGKATAN *NATIONAL POWER* NEGARA-NEGARA
TRILATERAL AUKUS TERHADAP EKONOMI INDONESIA**

Oleh:

Ketua Tim Peneliti

Dr. Posma Sariguna J Kennedy S.T., S.E., M.Si., MSE.

NIDN: 0331017403

Anggota Tim Peneliti

Dr. Drs. Yudi Sutrasna M.M.

NIDN: 4719106101

Dr. Drs. Haetami., M.Ag

NIDN: 4713097001

**UNIVERSITAS PERTAHANAN RI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

JAKARTA, OKTOBER 2022

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. Judul penelitian : Pengaruh Kekuatan Ekonomi China dalam Peningkatan National Power Negara-Negara Triateral AUKUS terhadap Ekonomi Indonesia
2. Kode>Nama rumpun ilmu : Ekonomi Pertahanan
3. Ketua Tim Pengusul
 - a. Nama Lengkap : Dr. Posma Sariguna Johnson Kennedy, S.T.,S.E., M.Si., M.S.E.
 - b. NIDN : 0331017403
 - c. Jabatan Fungsional :
 - d. Program Studi : Ekonomi Pertahanan.
 - e. Nomor Telepon/HP : 08170260333
 - f. Alamat E-mail : posmahutasoit@gmail.com
4. Anggota Peneliti (1):
 - a. Nama Lengkap : Brigjen TNI (Purn) Dr.Yudi Sutrasna M.M.
 - b. NIDN :
 - c. Perguruan Tinggi : Universitas Pertahanan RI
5. Anggota Peneliti (2) :
 - a. Nama Lengkap : Dr. Haetami., M.Ag
 - b. NIDN :
 - c. Perguruan Tinggi : Universitas Pertahanan RI
6. Lama penelitian : 6 Bulan
7. Penelitian tahun ke : 1 (Satu)
8. Biaya Penelitian : Rp.
 - a. Internal Unhan : Rp-
 - b. Sumber Lain : Rp-

Mengetahui:
Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan,



Dr.Ir.Susilo Adi Purwantoro, S.E. M.Eng. M.Sc.,
CIQnR, CIQar, IPU, CIPA, ASEAN Eng.
Mayor Jenderal TNI

Jakarta, Oktober 2022
Ketua Tim Peneliti,



Dr. Posma Sariguna Johnson Kennedy,
ST., SE., MSi., MSE.
NIDN. 0331017403

Menyetujui:
a.n Rektor
Universitas Pertahanan RI
Kepala LPPM,



Dr. Ir. I Nengah Putra A, S.T.,M.Si (Han).,ASEAN Eng.,CIPA.
Laksamana Muda TNI

ABSTRAK

PENGARUH KEKUATAN EKONOMI CHINA DALAM PENINGKATAN NATIONAL POWER NEGARA-NEGARA TRIATERAL AUKUS TERHADAP EKONOMI INDONESIA

Posma Sariguna Johnson Kennedy¹, Yudi Sutrasna², Haetami³

PRODI EKONOMI PERTAHANAN FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
UNIVERSITAS PERTAHANAN

E-mail: posmahutasoit@gmail.com

Munculnya Pakta trilateral AUKUS yang beranggotakan Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, menunjukkan telah meningkatnya pengawasan mereka di kawasan Indo-Pasifik, terutama dengan China. Munculnya pakta trilateral AUKUS semakin meningkatkan ketegangan di kawasan Indo-Pasifik, terutama dengan China. Terkait dengan meningkatnya persaingan pengaruh di kawasan Indo-Pasifik antara Amerika Serikat dan China, dikhawatirkan akan berdampak pada ekonomi Indonesia, terutama pada perdagangan internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah perdagangan internasional Indonesia dipengaruhi oleh konflik antara negara anggota Pakta Trilateral AUKUS dan China karena perang dagang dan situasi di Indo-Pasifik. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif dengan melakukan studi berbagai literatur dan mengolah data kuantitatif dari berbagai sumber. Penelitian ini akan menguji apakah perang dagang antara AS dan China mendorong terbentuknya Pakta Trilateral AUKUS di Indo-Pasifik yang dapat mempengaruhi arus perdagangan internasional antar negara anggota AUKUS ke Indonesia. Meningkatnya *national power* China telah mempengaruhi arus perdagangan internasional ke Indonesia dari masing-masing negara AUKUS. Ini membuktikan adanya rivalitas antara negara anggota AUKUS dengan China terkait *national power*-nya. China terus meningkatkan *national power*-nya, yang mengurangi *national power* negara lain, terutama Amerika Serikat. Namun, persaingan belanja militer, konflik perang dagang antara Amerika Serikat dan China, serta situasi di Indo-Pasifik belum terlalu mempengaruhi arus perdagangan internasional negara China dan dari masing-masing anggota AUKUS ke Indonesia.

Kata Kunci : AUKUS, China, Indonesia, Indo-Pasifik, Perdagangan Internasional

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF CHINA'S ECONOMIC POWER IN INCREASING THE NATIONAL POWER OF AUKUS TRILATERAL COUNTRIES ON THE INDONESIAN ECONOMY

Posma Sariguna Johnson Kennedy¹, Yudi Sutrasna², Haetami³

DEFENSE ECONOMICS PROGRAM DEFENSE MANAGEMENT FACULTY
DEFENSE UNIVERSITY

E-mail: posmahutasoit@gmail.com

The emergence of the trilateral AUKUS Pact, which consists of Australia, the United Kingdom and the United States, shows that their supervision has increased in the Indo-Pacific region, especially with China. The emergence of the AUKUS trilateral pact has further increased tensions in the Indo-Pacific region, especially with China. Related to the increasing competition for influence in the Indo-Pacific region between the United States and China, it is feared that it will impact the Indonesian economy, especially in international trade. This study aims to see whether Indonesia's international trade is affected by conflicts between member countries of the AUKUS Trilateral Pact and China due to trade wars and the situation in the Indo-Pacific. The method used in this study is quantitative and qualitative by studying various literature and quantitative processing data from various sources. This research will test whether the trade war between the US and China led to the formation of the AUKUS Trilateral Pact in the Indo-Pacific, which could affect the flow of international trade between AUKUS member countries to Indonesia. China's increasing national power has affected the flow of international trade to Indonesia from each AUKUS country. It proves the rivalry between AUKUS member countries and China regarding their national power. China continues to increase its national power, reducing other countries' national power, especially the United States. However, competition in military spending, trade war conflicts between the United States and China, and the situation in the Indo-Pacific have not greatly affected the flow of international trade between China and each member of AUKUS to Indonesia.

Keywords: AUKUS, China, Indonesia, Indo-Pacific, International Trade

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian ini dengan baik. Hasil penelitian ini disusun dalam rangka implementasi dosen Unhan melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Adapun judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Kekuatan Ekonomi China dalam Peningkatan National Power Negara-Negara Triateral AUKUS terhadap Ekonomi Indonesia.”** Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada civitas akademika Unhan dan para pihak lainnya yang terkait membantu kami dalam proses penyelesaian penelitian ini sebagai berikut :

1. Laksdya TNI Prof. Dr. Ir. Amarullan Octavian, S.T., M.Sc., DESD selaku Rektor Universitas Pertahanan RI;
2. Laksamana Muda TNI Dr.Ir. I Nengah Putra A, S.T.,M.Si (Han),ASEAN eng.,CIPA selaku Ketua LPPM Universitas Pertahanan RI;
3. Mayjen TNI Dr. Ir Susilo Adi Purwantoro, S.E., M.Eng.Sc., CIQnR., CIQaR., IPU., CIPA, CIPA, ASEAN Eng selaku Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan, Unhan RI;
4. Kolonel Laut (E) Dr.Ir Lukman Yuhdo Prakoso, S.IP. MAP. Sesprodi Ekonomi Pertahanan Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan RI
5. Kepada semua pihak yang telah membantu.

Akhirnya penulis berharap, semoga Allah SWT membalas budi baik Bapak/Ibu atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Penulis berharap penelitian bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca, dan bisa menjadi sebuah referensi bagi yang membutuhkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ekonomi pertahanan. Aamiin YRA.

Jakarta, Oktober 2022

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	HALAMAN SAMPUL.....	:	i
	HALAMAN PENGESAHAN.....	:	ii
	ABSTRAK.....	:	iii
	ABSTRACT.....	:	iv
	KATA PENGANTAR.....	:	v
	DAFTAR ISI.....	:	vi
	DAFTAR TABEL.....	:	viii
	DAFTAR GAMBAR.....	:	ix
BAB I	PENDAHULUAN.....	:	1
1.1	Latar Belakang.....	:	1
1.1.1	Dampak Pakta Trilateral AUKUS kepada Indonesia.....	:	1
1.1.2	Kondisi Geografis Indonesia.....	:	3
1.1.3	Terbentuknya Pakta Trilateral AUKUS.....	:	5
1.2	Rumusan Masalah, Tujuan dan Urgensi Penelitian....	:	7
2.1.1	Rumusan Masalah.....	:	7
2.1.2	Urgensi Penelitian.....	:	9
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	:	10
2.1	Teori Neorealisme.....	:	10
2.2	Konsep Geoekonomi.....	:	11
2.3	Geoekonomi di Era Baru.....	:	13
2.4	<i>Security Dilemma</i>	:	14
2.5	Konsep Kepentingan Nasional.....	:	15
2.6	Lingkungan Strategis.....	:	15
2.7	<i>Balance of Power</i>	:	15
2.8	Keseimbangan Dinamis.....	:	17
BAB III	METODE PENELITIAN.....	:	18
3.1	Metodologi.....	:	18
3.2	Pembentukan Model dan Penentuan Hipotesis Penelitian.....	:	19
3.2.1	Perdagangan Internasional dan Konflik.....	:	19
3.2.2	Model Gravitasi untuk Perdagangan Internasional.....	:	22
3.2.3	Penentuan Hipotesis Penelitian.....	:	26
3.3	Data.....	:	28
3.3.1	Data National Power.....	:	28
3.3.2	Data Ekonomi.....	:	31

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	:	37
4.1	Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	:	37
4.1.1	Kawasan Indo-Pasifik.....	:	37
4.1.2	Laut China Selatan dan Konflik yang Terjadi....	:	40
4.1.3	Pakta Triatral AUKUS.....	:	46
4.2	Pengaruh Perdagangan Internasional ke Indonesia....	:	52
4.3	Sikap terhadap AUKUS.....	:	71
4.3.1	Sikap ASEAN.....	:	59
4.3.2	Sikap Politik Indonesia.....	:	60
4.3.3	Implementasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif....	:	62
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	:	66
5.1	Kesimpulan.....	:	66
5.2	Saran.....	:	67
	DAFTAR PUSTAKA.....	:	70
	LAMPIRAN LUARAN.....	:	80
	LAMPIRAN 1: ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL NASIONAL TERINDEKS SINTA 5.....	:	81
	LAMPIRAN 2: ARTIKEL ILMIAH DALAM <i>INTERNATIONAL PROCEEDINGS</i>	:	91
	LAMPIRAN 3: ARTIKEL ILMIAH DALAM <i>INTERNATIONAL BOOKCHAPTER</i>	:	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	<i>National Power</i> dari Amerika, Inggris, Australia, China dan Indonesia (percent of global total).....	: 30
Tabel 2.	Data Penelitian Deskriptif Periode 2000-2020.....	: 31
Tabel 3.	Total Nilai Perdagangan Internasional menurut Negara Utama ke Indonesia (dalam juta US\$).....	: 32
Tabel 4.	GDP per capita (constant 2015 US\$).....	: 33
Tabel 5.	Pengeluaran Militer (% of GDP).....	: 35
Tabel 6.	Angka Neraca Perdagangan & Nilai Investasi Asing Langsung Indonesia.....	: 52
Tabel 7.	Hasil Regresi Data Panel.....	: 54
Tabel 8.	Hasil Regresi Data Panel (Panel 1).....	: 55
Tabel 9.	Hasil Output Komputer Regresi Data Panel dengan Berbagai Variasi Model (Panel 2-Panel 8).....	: 57
Tabel 10.	Hasil Output Komputer Regresi Data Panel dengan Berbagai Variasi Model (Panel 9 - Panel 16).....	: 58

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.	<i>National Power</i> Negara Australia, Inggris, Amerika, dan China dari Indeks Kekuatan Global..	:	31
Gambar	2.	GDP per kapita (Konstan US\$ 2015), 2001-2020...	:	33
Gambar	3.	Pengeluaran Militer (current USD), 2000-2020.....	:	34
Gambar	4.	Delta/Selisih Pengeluaran Militer dengan China	:	34
Gambar	5.	Pengeluaran Militer (% dari GDP), 2000-2020.....	:	35
Gambar	6.	Delta/Selisih Pengeluaran Militer dengan China....	:	36
Gambar	7.	Peta Indo-Pasifik.....	:	38
Gambar	8.	Lokasi dan rantai militer China dan AS. Pangkalan di Kawasan Indo-Pasifik.....	:	44
Gambar	9.	Kapal Selam Serangan Nuklir SSN 095 China.....	:	46
Gambar	10.	Kelompok Pertahanan, Intelijen, dan Keamanan...	:	47
Gambar	11.	Total Nilai Perdagangan Negara Utama ke Indonesia.....	:	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Dampak Pakta Trilateral AUKUS kepada Indonesia

Tujuan pemerintahan setiap negara di kancah internasional adalah untuk mengejar kepentingan nasionalnya, yang dapat merupakan campuran dari tujuan keamanan, kemakmuran dan nilai-nilai lainnya. Tujuan yang luas ini dapat menimbulkan konflik, sehingga diperlukan kebijakan untuk mengelola pertukaran tersebut. Ada hasil berbagai geopolitik yang dapat dicapai oleh pemerintah nasional dengan menggunakan alat-alat ekonomi dalam mempertahankan keunggulan global dengan kemampuan teknologi, memperoleh atau memperkuat aliansi, mendapatkan aliansi negara lain, mengubah sistem ekonomi atau politik negara lain, mempromosikan ideologi atau nilai sendiri, dan mengurangi ancaman (domestik dan global). Tujuan memaksimalkan kekuatan nasional juga termasuk didalamnya. (Golley et al., 2016)

Sebuah tatanan dunia baru sedang muncul, tatanan dunia geo- ekonomi, di mana aturan, norma, dan institusi yang terlibat dalam interaksi internasional yang dibentuk kembali. Domain kebijakan ekonomi dan keamanan yang sebelumnya berbeda menjadi kabur, terutama yang berkaitan dengan investasi, perdagangan dan teknologi. Era geoekonomi baru menuntut cara-cara baru untuk memahami strategi yang ditempuh negara lain, dan kemudian merumuskan kebijakan terbaik untuk kepentingan sendiri. Sebagai akibat dari perubahan yang signifikan dan cepat dalam lanskap geopolitik, ekonomi dan teknologi, pemikiran baru tentang bagaimana mengelola risiko dan memanfaatkan peluang yang dibutuhkan untuk memaksimalkan kemakmuran dan perdamaian. Konsep "geo-ekonomi" meletakkan dasar untuk mempertimbangkan cara-cara di mana pemerintah negara-negara dapat menerapkan kebijakan yang membantu masyarakat dan ekonomi di masa depan. "Perangkat geoekonomi" dapat digunakan untuk efek koersif dan menguntungkan. Geoekonomi menyediakan kerangka kerja yang berguna untuk menganalisis kebijakan. (Golley et al., 2016)

Di bidang geoekonomi, salah satu berita paling relevan adalah perjanjian trilateral yang ditandatangani oleh Australia, Inggris, dan Amerika Serikat

(AUKUS) untuk membantu Australia mengembangkan kapal bertenaga nuklir. Penandatanganan perjanjian tersebut telah memicu berbagai respons dari pemerintah beberapa negara, khususnya di kawasan Indo Pasifik (Zambelli, 2021). Tata dunia geoekonomi baru yang didirikan oleh Amerika Serikat memunculkan China sebagai pesaing sejawat. Ketegangan yang meningkat ini menyebabkan kaburnya kebijakan keamanan nasional dan kebijakan ekonomi internasional yang sebelumnya lebih terpisah. Justifikasi keamanan nasional mendorong kebijakan perumusan di bidang ekonomi, sementara kebijakan ekonomi dilihat sebagai strategi persaingan domain. Pembuat kebijakan Australia merasa memisahkan kepentingan keamanan dan ekonomi menjadi semakin sulit. Misalnya, permintaan dari AS atau China di satu domain kemungkinan akan menyebabkan menyebabkan di domain lain. Potensi ini membutuhkan lebih banyak koordinasi antara kepentingan Australia yang berbeda (Golley et al., 2016). Terbentuknya AUKUS menunjukkan Australia lebih memilih kepentingan keamanan daripada kepentingan ekonomi (Delanova, 2021).

Kemitraan keamanan trilateral antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, atau AUKUS, mendominasi diskusi tentang strategi lanskap Indo-Pasifik. Reaksi negara-negara di Asia Tenggara terhadap AUKUS sejauh ini beragam. Sementara beberapa negara khawatir bahwa AUKUS mungkin akan memicu perlombaan senjata regional, di lain pihak ada yang menyatakan harapan bahwa formulasi keamanan baru dapat menciptakan perdamaian dan keamanan regional. Pertanyaan muncul tentang bagaimana AUKUS dapat berdampak pada ASEAN. Namun, masalah utama sebenarnya adalah tantangan yang ditimbulkan oleh prakarsa-prakarsa tersebut terhadap persatuan ASEAN dalam membentuk posisi yang kuat dan kohesif dalam masalah keamanan regional. Sampai saat ini negara-negara anggota ASEAN tidak mampu mencapai konvensi tentang sikap terhadap pembentukan AUKUS. (Phua, 2021)

Berdasarkan paparan di atas, tentunya AUKUS memberikan dampak kepada Indonesia karena lokasi konflik sangat dekat dengan halaman rumah. Letak geografis menempatkan Indonesia dalam pusaran potensi konflik antara AUKUS dan Negara China (Putro, 2021). “Ini membuat Indonesia sangat waspada bahwa AUKUS akan secara signifikan meningkatkan proyeksi kekuatan di Indo-Pasifik. Indonesia mengambil posisi untuk menekankan

kewajiban semua pihak untuk menjaga perdamaian dan keamanan dengan menghormati hukum internasional yang berlaku” (Delanova, 2021). Direktur Jenderal Asia-Pasifik dan Afrika Indonesia, AK Jailani, menyatakan bahwa: “Ada alasan logis bagi Indonesia untuk khawatir karena tindakan yang dilakukan Australia akan mengubah situasi geopolitik di kawasan. Ini akan menjadi faktor destabilisasi. Karena tidak ada yang namanya akuisisi kapal selam bertenaga nuklir tanpa memicu kemungkinan perlombaan senjata nuklir.” (FPCI, 2021)

Indonesia akan terkena imbasnya karena semua kapal selam nuklir dan aset militer Australia akan melewati wilayah Indonesia untuk bergabung dengan sekutunya. “Indonesia menyatakan keprihatinan atas kesepakatan itu, memperingatkan bahwa hal itu dapat mengarah pada perlombaan senjata. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan bahwa mereka sangat prihatin dengan berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan di kawasan dan meminta Canberra untuk mempertahankan komitmennya terhadap perdamaian dan stabilitas regional”. (Star, 2021; Wikipedia, 2021)

Badan Keamanan Maritim Indonesia (Bakamla) mengatakan, pembentukan aliansi AUKUS yang terdiri dari Australia, Amerika Serikat dan Inggris mengindikasikan potensi sinyal peningkatan eskalasi di Laut China Selatan (LCS). Hal ini juga berdampak pada Indonesia. Dampak langsungnya dapat berupa banyaknya kekuatan militer dari negara-negara non-claimant di LCS. Kemudian juga dapat meningkatkan dinamika hubungan internasional terkait LCS. Selain itu, kontestasi di laut akan mendorong negara-negara yang terlibat untuk meningkatkan kemampuan perangnya, sehingga meningkatkan potensi pecahnya perang. Umumnya konflik antar negara mendorong nasionalisme, sehingga menimbulkan konflik horisontal antar manusia (Prakoso, 2021). Dampak dari Pakta Triateral AUKUS sangat penting untuk diteliti karena kepentingannya bersinggungan dengan Indonesia disebabkan berdekatan dengan China di kawasan Pasifik.

1.1.2 Kondisi Geografis Indonesia

(Perdana et al., 2021)

Indonesia sebagai negara kepulauan, berdasarkan ketentuan *United Nations Convention On The Law of the Sea* (UNCLOS, 1982), telah menyediakan tiga jalur laut: Melalui Samudera Hindia-Selat Sunda-Laut Cina

Selatan; Melalui Selat Makassar - Selat Lombok; dan Melalui Samudera Hindia - Laut Banda - Laut Maluku - Samudera Pasifik. Perairan Indonesia berperan sebagai penghubung dunia antara Asia Timur, Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Afrika, dan Eropa. Posisi Indonesia juga merupakan titik persilangan antara Samudera Pasifik, Samudera Hindia, Benua Asia, dan Australia. Bahkan di kawasan ASEAN, dua pertiga wilayahnya adalah perairan Indonesia (Yanti & Aviolita, 2020). Karena kepentingan ekonomi Barat dan Timur melewati perairan Indonesia, sudah sepatutnya Indonesia menjadi pemain utama di kawasan inti lalu lintas maritim dunia.

Melalui pengesahan perjanjian UNCLOS, Pemerintah Republik Indonesia juga mengonversi pakta tersebut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Yang kemudian melahirkan Hukum Laut Internasional pada tahun 1994. Melalui peraturan ini, Indonesia berhak memiliki hak berdaulat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang masuk ke wilayah laut Indonesia. Pasal 49 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa kedaulatan negara kepulauan meliputi perairan yang dibatasi oleh garis pangkal dan ruang udara di atasnya serta dasar laut dan daratan di bawahnya.

Bueger dalam Prasetyo et al., (2021) menyampaikan perspektif pertahanan dalam melihat kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang berpotensi mendapat ancaman dari corong strategis (*choke point control*). Karena itu, secara logis, media laut menjadi pusat gravitasi pertahanan Indonesia yang secara tegas dapat mewujudkan penguasaan laut secara utuh. Kondisi perairan Indonesia, baik dari segi geopolitik, geostrategi, maupun ekonomi, memiliki peran vital bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan lebih luas lagi secara global. Kondisi ini menuntut Indonesia untuk dapat merepresentasikan pertahanan maritimnya melalui peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang siap menghadapi berbagai kemungkinan dalam pengendalian chokepoints.

Dinamika di kawasan internasional memberikan reaksi bagi setiap negara dalam mengambil kebijakan masing-masing. Perspektif neorealisme tampaknya telah terjadi dalam sebuah fenomena aliansi AUKUS dalam serangkaian konflik di Laut Cina Selatan, baik di Indonesia, Australia, Cina, dan negara-negara lain yang terlibat dan negara-negara regional di sekitarnya. Posisi Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan juga didasarkan pada kepentingan nasional, prinsip

bebas dan aktif, berusaha senetral mungkin, dan membantu menjaga perdamaian tanpa terjepit di antara kekuatan besar.

Jika dilihat dari perspektif neorealisme, Indonesia dituntut untuk memiliki pandangan yang lebih realistis bahwa kekuatan suatu negara adalah akumulasi dari semua sumber daya yang dapat mempengaruhi dan mengendalikan negara lain dalam sistem internasional. Termasuk kondisi geografis, postur militer Indonesia, dan langkah politik apa yang harus diambil Indonesia. Sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif dan memiliki kepentingan nasional, Indonesia harus mampu memainkan posisinya dalam menyikapi Aliansi AUKUS dan China.

Indonesia memiliki peran vital dalam geopolitik, geostrategi, dan ekonomi. Tidak hanya untuk negara-negara di kawasan Asia Pasifik tetapi juga secara global secara lebih luas. Kondisi ini menuntut Indonesia untuk merepresentasikan pertahanan maritimnya melalui peran TNI yang siap menghadapi berbagai kemungkinan dalam pengendalian chokepoints. Postur militer Indonesia yang proporsional dan modern terus diupayakan melalui Minimum Essential Force (MEF). Pencapaian Indonesia di MEF masih jauh dari target yang ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa modernisasi alutsista belum maksimal untuk menghadapi dinamika dan konflik di bidang pertahanan di lingkungan internasional.

Oleh karena itu, Indonesia wajib mengambil posisi dan sikap politik yang strategis dalam menyikapi kehadiran Aliansi AUKUS. Indonesia juga diharapkan dapat berdiplomasi dan merangkul negara-negara ASEAN untuk menghasilkan pernyataan bersama yang dapat membatasi aliansi AUKUS untuk membuat kapal selam bertenaga nuklir yang kontroversial. Asas kebebasan dan aktivitas merupakan batasan bagi Indonesia untuk tidak memihak pada salah satu pihak karena bias yang lahir tentu akan merusak tatanan strategis Indonesia dan bertentangan dengan kepentingan nasional. (Perdana et al., 2021)

1.1.3 Terbentuknya Pakta Trilateral AUKUS

AUKUS (Australia, United Kingdom, United States), adalah sebuah pakta keamanan trilateral antara Australia, Britania Raya, dan Amerika Serikat (AS) yang didirikan pada 15 September 2021 (Ward, Alexander, 2021). Di bawah pakta tersebut, Amerika Serikat dan Britania Raya akan membantu Australia untuk mengembangkan dan mengerahkan kapal-kapal selam bertenaga nuklir,

selain mengerahkan militer Barat di kawasan Pasifik (Sanger & David, 2021). Meskipun pengumuman bersama oleh Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Perdana Menteri Britania Raya Boris Johnson, dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden tak menyebut nama negara lainnya, namun diduga pakta tersebut dirancang untuk melawan pengaruh Republik Rakyat China di kawasan Indo-Pasifik (Reuters, 2021).

Setelah Amerika menyatakan perang dagang pada Maret 2018. Presiden Donald Trump mengeluarkan "President Memorandum Targeting China's Economic Aggression" dan memperkenalkan tarif baja dan aluminium pada Maret 2018 (Kapustina et al., 2020)(Zhu, Yang dan Feng, 2018). Sejak itu, ketegangan antara kedua negara meningkat. Keberanian China menghadapi negara adidaya tidak diragukan lagi didukung oleh kekuatan perang yang diperhitungkan sudah sangat kuat. Apalagi, karena dugaan peningkatan militer telah dimulai jauh sebelumnya, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di China juga sangat tinggi.

Rivalitas antara Amerika Serikat dan China telah menjadi paradigma sentral hubungan internasional selama ini, membuat perdebatan strategis tentang dinamika politik, militer, dan ekonomi yang sebenarnya (Lippert & Perthes, 2020). Kebangkitan ini setidaknya sudah terlihat sejak reformasi ekonomi China pada 1987. Lompatan riset, ekonomi, teknologi, militer hingga mengungguli banyak negara Eropa, bahkan dapat dikatakan menyamai Amerika Serikat. Kebangkitan China tidak lepas dari kebijakan perdagangan internasionalnya yang memberikan reaksi dari Amerika Serikat sebagai penjamin stabilitas hegemonik saat ini (Suharman & Pramono, 2021).

Militer China juga melakukan reformasi besar, membelanjakan pertahanan lebih dari sebelumnya, untuk membuat angkatan bersenjata lebih kuat dan lebih efisien. China bertujuan untuk menjadi kekuatan maritim yang dapat mendominasi kawasan Asia-Pasifik, khususnya Laut China Selatan. Dalam tiga puluh tahun terakhir, pemerintah China berupaya mengubah kekuatan militernya yang lebih berteknologi maju menjadi kekuatan tingkat atas di dunia. Melalui anggaran yang melonjak tinggi selama satu dekade terakhir, China telah menjadi kekuatan terkemuka di dunia. Amerika sudah merasa China adalah saingan kekuatan besar, meskipun militernya belum menantang Amerika Serikat secara terbuka. (Maizland, 2020)

Walaupun Pakta Triateral AUKUS tidak menyinggung Indonesia, namun jika tidak diperhatikan atau diwaspadai tentunya akan berdampak juga pada ketahanan nasional. Ketahanan nasional inilah yang harus dijaga, karena memiliki hakekat sebagai keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan untuk menghadapi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan guna menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam perjuangan mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanahkan pada Pembukaan UUD 1945. Trilateral AUKUS merupakan tanggapan terhadap keamanan regional yang sudah tegang. AUKUS dapat dilihat sebagai mekanisme bagi negara-negara seperti Australia untuk mengatasi kerentanan mereka terhadap keamanan regional. Bagi AS, AUKUS adalah manifestasi terbaru dari pendekatan multilateral luas dan ambisinya dalam mempertahankan keunggulan Amerika di kawasan itu. AS secara eksplisit dengan mengatakan bahwa China tidak akan mencapai tujuan negara paling kuat di bawah pengawasannya. AUKUS merupakan lain dari kepentingan Amerika di kawasan ini, melalui kerja sama dengan sekutu dan jaringan mitra yang mengungkapkan ekspresi yang ditargetkan untuk dianggap perilaku agresif China. (Phua, 2021)

Pembentukan AUKUS, dan khususnya keputusan untuk mengeksport kapal selam bertenaga (SSN), telah menimbulkan reaksi di antara mitra Amerika di Asia Timur. Reaksi-reaksi ini sebagian besar dicerminkan oleh dua pendekatan yang bersaing: memperkuat supremasi militer dalam menghadapi kebangkitan Cina, di satu sisi, dan mencoba menghindari "Perangkap *Thucydides*" di sisi lain. "Perangkap *Thucydides*" khawatir bahwa AUKUS dapat memicu perlombaan senjata (nuklir) dan akan memicu kemungkinan di Asia Timur. Diantaranya: Indonesia, Malaysia dan Singapura, Thailand serta dekat China, Laos dan Kamboja, meskipun mereka belum menyatakan posisi yang jelas. (Julienne, 2021)

Negara-negara Asia Tenggara secara ekspresif jelas tidak ingin terlibat dalam politik kekuatan besar. ASEAN sangat berhati-hati sejauh melihat AUKUS sebagai upaya untuk melawan agresifitas China yang tumbuh di kawasan. Pada saat yang sama, memburuknya hubungan Australia-China dengan cepat dan cepat aktivitas aktivitas militer di Laut China Selatan, yang menunjukkan realitas keamanan regional. (Phua, 2021)

1.2 Rumusan Masalah, Tujuan dan Urgensi Penelitian

1.2.1 Rumusan Masalah

Dengan adanya Pakta Triateral AUKUS ini, keseimbangan kekuatan antar negara yang bersinggungan diduga mulai berubah, yang tercermin diantaranya adalah dari perubahan anggaran pertahanannya. Karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji hal ini, apakah Pakta ini akan mempengaruhi *balance of power* dari perubahan *national power* dari negara-negara yang bersinggungan, termasuk Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena wilayah Indonesia masih dekat dengan wilayah-wilayah perseteruan antara AUKUS dengan China, terutama di kawasan Indo-Pasifik.

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Apakah terdapat pengaruh dari konflik yang terjadi di Indo-Pasifik yang mendorong terbentuknya Pakta Trilateral AUKUS untuk menghadapi China terhadap perekonomian Indonesia, khususnya yang di-*proxy* dari aliran perdagangan internasional dari masing-masing negara anggota AUKUS (Amerika, Australia dan Inggris) ke Indonesia. Sub fokus dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melihat dampak AUKUS terhadap Indonesia ditinjau dari persaingan antara negara-negara anggota AUKUS dengan China, apakah berdampak terhadap ekonomi Indonesia yang dilihat dari aliran perdagangan internasionalnya dari masing-masing negara.
2. Menganalisis sikap terbaik Indonesia dalam menanggapi pakta pertahanan trilateral AUKUS karena berdampak pada negara-negara di lingkungan strategis Indo-Pasifik, khususnya Indonesia sebagai negara tetangga terdekat. Melihat arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam menyikapi kesepakatan pakta pertahanan trilateral AUKUS berdasarkan prinsip bebas aktif.

Beberapa temuan yang ingin menjadi target dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apakah terjadi peningkatan *national power* dari negara China dan negara-negara anggota AUKUS.
2. Mengetahui apakah peningkatan *national power* China dan persaingan anggaran pertahanannya, mempengaruhi aliran perdagangan internasionalnya ke Indonesia.

3. Mengetahui apakah *national power* China, besaran perdagangan internasional China dan persaingan anggaran pertahanannya dengan negara-negara anggota AUKUS mempengaruhi aliran perdagangan internasional anggota AUKUS ke Indonesia
4. Mengetahui bagaimana sikap Indonesia dalam melihat peluang atau risiko adanya Pakta Triateral AUKUS.

1.2.2 Urgensi Penelitian

Walaupun pada era globalisasi saat ini ditandai dengan fenomena tumbuh dan berkembangnya masyarakat internasional tidak lagi dihalangi oleh garis batas negara, namun secara realitas hubungan antar negara masih didominasi oleh isu-isu tradisional, seperti konflik wilayah di perbatasan. Fenomena ini menempatkan keamanan nasional dan kedaulatan wilayah suatu negara sebagai prinsip dasar yang penting dalam hubungan antar negara. Pandangan tradisional menganggap wilayah negara akan menentukan kedaulatan, kekuasaan, bahkan keamanan. Berdasar pandangan ini, perbatasan negara memainkan peranan penting dalam menentukan eksistensi suatu negara. Negara akan siap melakukan apapun untuk melindungi wilayah dan kemungkinan ancaman keamanan sehingga perlu dukungan militer yang kuat. Negara juga harus mampu memperhitungkan peluang dan risiko yang terjadi terhadap perubahan-perubahan di lingkungan strategisnya.

State of art dalam bidang yang diteliti ini adalah, dalam berbagai tulisan sebelumnya ditinjau ketegangan-ketegangan yang akan mungkin terjadi akibat adanya Pakta Triateral AUKUS ini, namun dalam penelitian ini akan ditinjau juga pengaruhnya terhadap Indonesia. Tentunya ini bukan saja hanya sebagai ancaman, tetapi juga akan dilihat sebagai peluang dalam pemenuhan kebutuhan dari negara-negara yang bersinggungan dengan adanya Pakta AUKUS ini. Misalnya peningkatan kekuatan ekonomi China tentunya juga mempengaruhi perekonomian Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Neorealisme

Sikap negara-negara pendiri AUKUS dapat menggunakan teori neorealisme, yang menyatakan bahwa sudah menjadi hukum alam bahwa setiap negara harus mengembangkan militer yang kuat untuk mempertahankan hidupnya dalam politik internasional yang anarkis. Jika tidak, negara harus menerima konsekuensi dapat ditaklukkan dalam perang dan diperbudak oleh negara lain (Hadiwinata, 2017). Kondisi anarki, dimana tidak ada pusat pusat yang dapat memastikan hukum dan sistem pemeliharaan akan mengakibatkan negara-negara saling bersaing dalam meningkatkan kekuatannya, terutama di bidang militer. Dalam situasi ini, kekuatan militer yang lebih besar akan mendukung suatu negara untuk mendominasi dan mempengaruhi negara lain (Ambarwati and Wijatmadja, 2016). Melalui teori Neorealisme, dapat dipahami alasan mengapa Australia, Inggris, dan Amerika Serikat membentuk pakta pertahanan, yaitu untuk memperkuat militer, khususnya militer Australia, dengan merencanakan pembangunan kapal yang mendukung kekuatan. (Muntasyir, Panji & Santoso, 2022)

Meskipun termasuk dalam perkembangan teori realisme, neorealisme memiliki beberapa perbedaan satu sama lain. Kaum realis berpendapat bahwa kerjasama antar negara seperti isapan jempol karena masing-masing negara sibuk hanya untuk memenuhi kekuatannya di dalam negeri. Sebaliknya, neorealisme tidak memungkiri bahwa ada peluang terjadinya kerjasama antarnegara. Namun, mereka memandang bahwa negara-negara yang bekerja sama akan selalu berusaha untuk memaksimalkan kekuatan relatif mereka dan mempertahankan otonomi mereka (Jackson & Sorensen, 2013). Neorealisme memandang komunikasi antar negara melalui sistem internasional yang anarkis, artinya sistem internasional yang tidak memiliki pemimpin dan tidak memiliki peraturan untuk mengatur tindakan suatu negara. Dengan sistem internasional yang anarkis, aktor-aktor pemerintah dan non-pemerintah harus mampu beradaptasi dengan segala kondisi. Karena tidak adanya aturan dalam sistem internasional, para aktor lebih mementingkan kelangsungan hidup negaranya sendiri dan fokus pada peningkatan keamanan. (Tawakal, 2022)

2.2 Konsep Geoekonomi

Konsep geoekonomi saat ini menjadi semakin gencar dipakai dalam mendukung para akademisi dan pembuat kebijakan sebagai orientasi pemikiran. Namun, seperti yang diamati Mattlin dan Wigell, (2016), sangat mengejutkan banyak analis menggunakan istilah geoekonomi sebagai kata kunci tanpa mendefinisikannya dengan jelas, atau setidaknya mempertimbangkan bagaimana orang lain menggunakannya. Kamus Webster memberikan definisi dari geoekonomi sebagai berikut “Kombinasi faktor ekonomi dan geografis yang berkaitan dengan perdagangan internasional” (Merriam-Webster, 2022). Blackwill dan Harris (2016) dalam bukunya mendefinisikan "geoekonomi" sebagai: "Penggunaan instrumen ekonomi untuk mempromosikan dan membela kepentingan nasional, dan untuk menghasilkan hasil geopolitik yang bermanfaat; dan dampak tindakan ekonomi negara lain terhadap tujuan geopolitik suatu negara”.

Definisi ini merupakan titik awal dalam membuat konsep geoekonomi. Contoh instrumen kebijakan ekonomi adalah kebijakan perdagangan dan investasi, sanksi, bantuan, bantuan pembangunan, kebijakan pendidikan tinggi, penelitian dan teknologi. Tindakan ekonomi oleh pemerintah dapat dianalisis melalui kerangka geoekonomi, setidaknya untuk mencapai tujuan strategi (non-ekonomi), atau ketika mereka mempengaruhi kepentingan geopolitik negara lain. Salah satu contohnya adalah ketika tarif dagang baru diterapkan di atas dasar keamanan nasional, bukan (murni) untuk perlindungan industri dalam negeri. Demikian pula, bantuan asing dapat dialokasikan ke negara tertentu dengan tujuan ganda: untuk membangun ekonomi serta untuk memperkuat sistem demokrasi dan membangun pengaruh terhadap negara tersebut. (Golley et al., 2016)

Istilah geoekonomi pertama kali diciptakan oleh ahli strategi AS Edward Luttwak pada tahun 1990, ketika khawatir bahwa Jepang akan menantang keunggulan globalnya dengan ekonomi daripada cara militer (Golley et al., 2016). Luttwak (1990) dalam artikelnya menggunakan istilah geoekonomi untuk menggambarkan sistem pasca Perang Dingin, merupakan arena persaingan utama antar negara yang mementingkan ekonomi daripada militer. Luttwak (1993) lebih lanjut mengelaborasi ide-idenya dalam sebuah buku yang diterbitkan tiga tahun kemudian. Dengan berakhirnya ancaman Soviet ke Eropa

dan Amerika Serikat, tidak dapat dibayangkan bakal terjadi perang besar atau konfrontasi militer dalam waktu dekat. (Scholvin dan Wigell, 2018)

Huntington (1993) juga mengamati, “Di dunia dimana konflik militer antara negara-negara besar tidak mungkin terjadi, kekuatan ekonomi akan semakin penting dalam menentukan keunggulan atau subordinasi negara”. Oleh karena itu, pandangan para ahli geoekonomi awal ini, akhir Perang Dingin tidak sama dengan 'akhir sejarah' yang diprediksi oleh Francis Fukuyama (Fukuyama, 2006). Sebaliknya, mereka meramalkan transformasi cara konflik yang dimainkan – “dengan modal sebagai pengganti senjata, inovasi sipil sebagai pengganti teknis militer, dan penetrasi pasar sebagai pengganti garnisun dan pangkalan” (Luttwak, 1990). Di era geoekonomi baru, negara-negara masih akan mengejar tujuan-tujuan nasionalnya tetapi melalui cara ekonomi dan bukan militer. (Scholvin dan Wigell, 2018)

Hirschman (1981) dalam *National Power and the Structure of Foreign Trade*, secara khusus mengakui saling ketergantungan ekonomi sebagai sumber kerentanan, setelah mempelajari tata negara ekonomi Nazi Jerman sebelum perang (Golley et al., 2016). Saling meningkatkan ekonomi ini menjadi meningkat pesat dalam skala internasional pada 1990-an, dan terlebih lagi pada 2000-an, begitu pula tantangan dan risikonya, banyak di antaranya bersifat geoekonomi. Sebagaimana dicatat, sering bersifat asimetris, artinya memerlukan sumber kekuatan dalam hubungan tawar-menawar, seperti yang ditunjukkan oleh Keohane & Nye (1977) dalam buku mereka. Risiko yang dihasilkan dari saling ketergantungan, dan yang mempengaruhi negara secara asimetris, termasuk gangguan pada rantai pasokan global dan perdagangan gelap serta penggunaan kerentanan asimetris sebagai strategi pengungkit (World Economic Forum, 2016). Kerentanan ini mendorong keamanan ekonomi menuju agenda global, dan menyarankan bahwa perhitungan geoekonomi harus menjadi yang terpenting dalam perhitungan strategi mereka antar negara baik negara besar ataupun kecil (Wigell, 2016). (Scholvin dan Wigell, 2018)

Apa yang sekarang disebut strategi geoekonomi seperti yang dilakukan oleh semua kekuatan besar di masa lalu, telah memberikan hasil positif bagi banyak negara yang telah memanfaatkan ekonomi dan keamanan dari strategi ini. Geoekonomi menyediakan "perangkat" yang dapat digunakan untuk

menganalisis dan mengejar tujuan yang berbeda dari setiap negara. (Golley et al., 2016)

2.3 Geoekonomi di Era Baru

Era baru kini melihat lebih besar pada aspek keamanan, karena kemakmuran dan keamanan telah menjadi fungsi yang kompleks satu sama lain. Ini kontras dengan tiga dekade terakhir di bawah sistem internasional adalah unipolar, ketika bobot perhatian terhadap kemakmuran (misalnya, "lapangan kerja dan pertumbuhan") jauh lebih tinggi daripada keamanan (dalam persaingan antar negara di antara kekuatan besar). (Golley et al., 2016)

Kali ini berbeda. Perbedaannya adalah, ini kali pertama hegemon dunia Amerika Serikat secara bersamaan menghadapi persaingan ekonomi dan militer terhadap satu negara yang sama (China). Ini terjadi di tengah masa dimana teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan batasan baru yang memungkinkan bentuk-bentuk baru tata negara. Pergeseran dari sistem internasional unipolar Kembali ke sistem multipolar menunjukkan bahwa akan terlihat lebih banyak konflik muncul. Perluasan fisik ke domain cyber berarti bahwa beberapa dari konflik itu akan mengambil bentuk yang sebelumnya tidak diketahui. Untuk alasan ini, kita akan melihat negara-negara bereksperimen dengan perangkat geoekonomi yang diperluas dalam beberapa tahun mendatang. (Golley et al., 2016)

Sementara itu, sebagian besar tulisan Luttwak masih sangat relevan saat ini. Dengan mengidentifikasi lima tren global baru yang bermanifestasi di perempatan politik, ekonomi, teknologi, dan masyarakat yang memunculkan tatanan baru ini (Golley et al., 2016):

1. Persaingan strategi antara Amerika dan China, dipicu oleh munculnya China sebagai kekuatan yang sangat besar, dimana model tatanan politik dan organisasi ekonominya sangat berbeda dengan Amerika Serikat.
2. Adanya kebijakan pemerintah domestik China dan strategi serta pengaruh internasionalnya, termasuk The Belt and Road Initiative -nya.
3. Perluasan masalah keamanan nasional yang mencakup banyak domain, termasuk dalam perdagangan dan investasi internasional.
4. Melemahnya tatanan berbasis aturan yang muncul di bawah kepemimpinan Amerika pada periode pasca-perang, baik karena tantangan yang

ditimbulkan oleh China dan negara-negara non-Barat lainnya, maupun tantangan dari legitimasi di mata publik Barat.

5. Tingkat saling ketergantungan global yang sangat tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk arus manusia, pengetahuan, barang dan modal, serta konektivitas di ruang siber.

Beijing dan Washington, serta ibu kota lainnya, kini terlibat dalam persaingan kekuatan besar yang kompetitif. Selama beberapa dekade proses globalisasi dengan situasi institusi global yang mendorong saling ketergantungan ekonomi. Ini dianggap sebagai pendorong perdamaian dan kemakmuran, setidaknya di dunia kapitalis. Saling meningkatkan ekonomi ini dilihat oleh analis keamanan sebagai sumber kerentanan dan ketidakamanan. (Golley et al., 2016)

2.4 *Security Dilemma*

Konsep dilema keamanan dapat diartikan sebagai fenomena aksi dan reaksi antara beberapa negara dimana tindakan suatu negara untuk meningkatkan keamanannya akan berdampak atau dianggap melemahkan keamanan negara lain (Jervis, 1978). Keseimbangan kekuatan dapat terjadi jika keseimbangan antara menyerang dan bertahan dapat terpenuhi. Jika pelanggaran mendominasi maka dilema keamanan akan semakin meningkat, yang akan mengakibatkan negara-negara lain berlomba-lomba meningkatkan keamanan negaranya masing-masing atau sering disebut dengan perlombaan senjata. Namun, perlombaan senjata dapat dicegah jika pertahanan lebih dominan daripada pelanggaran (Glaser & Kauffman, 1998). Teori ofensif-defense memberikan pandangan baru tentang politik internasional yang meyakini bahwa perang dapat dicegah ketika kekuatan pertahanan suatu negara dianggap mengungguli kekuatan penyerangan negara di sekitar wilayahnya. Kesesuaian atau ketidaksesuaian ideologi antar negara dapat menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada konflik. Hal ini rawan terjadi dalam hubungan antar negara. Para aktor akan berusaha mencegah konflik dengan meningkatkan keamanan negara. Dalam hal ini termasuk dalam dilema keamanan antar negara yang seringkali berujung pada terjadinya perlombaan senjata (Roe, 1999). Insiden ini didasarkan pada ketakutan dan rasa saling percaya bahwa suatu hari nanti negara lain akan mengancam keamanan

nasionalnya. Apalagi ketika negara merasa perlu meningkatkan keamanan negaranya untuk mencegah konflik. (Tawakal, 2022)

2.5 Konsep Kepentingan Nasional

Menurut Morgenthau, “Kepentingan nasional adalah kemampuan minimal suatu negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas politik, militer, dan budaya dari campur tangan negara lain” (Morgenthau, 1948). Nuechterlein mendefinisikan kepentingan nasional sebagai kebutuhan dan keinginan suatu negara terhadap negara lain dari lingkungan eksternal (Nuechterlein, 1976). Ada beberapa jenis kepentingan nasional; Nuechterlin mengatakan setidaknya ada empat kepentingan nasional, yaitu kepentingan pertahanan, ekonomi, ketertiban internasional, dan ideologi. Sementara itu, Sondermann menjelaskan bahwa kepentingan nasional berkaitan dengan hal-hal dalam politik luar negeri, yang nantinya akan menjadi sikap negara dalam menanggapi suatu isu internasional (Sondermann, 1960). (Pangestu dkk., 2021)

2.6 Lingkungan Strategis

Setiap aktor di tingkat internasional akan saling mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing sehingga lingkungan strategis menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan pertahanan dan keamanan. Lingkungan strategis dapat dipindai melalui berbagai dimensi. Bandoro menyatakan dimensi keamanan, ekonomi, politik, sosial, dan. Sifat lingkungan strategis menantang karena konsekuensi dari keputusan yang unik dan persyaratan kinerja. Menurut Owen Jacobs, lingkungan strategis memiliki karakteristik VUCA: volatile, penuh ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Volatilitas adalah sifat lingkungan strategis yang berubah begitu cepat. Ketika sifat perubahan yang begitu cepat melahirkan sifat ketidakpastian dalam lingkungan strategis. Hubungan antar elemen dalam lingkungan strategis sangat kompleks. Karena ambiguitas, perencanaan dan pengambilan keputusan menjadi semakin sulit dalam lingkungan strategis (Putra & Hakim, 2016). (Pangestu et al., 2021)

2.7 *Balance of Power*

Besaran ancaman tradisional/eksternal sangat sensitif dengan keberadaan kekuatan dari setiap negara relatif dengan kekuatan negara-negara tetangganya. Besaran ini mengasumsikan semakin besar kapabilitas relatif suatu negara (*nation's relative capability*), semakin besar pula pengaruh politik dan militernya terhadap lingkungan strategisnya. Distribusi kapabilitas ini asimetrik diantara negara-negara sehingga membentuk ancaman dan tekanan di antara mereka.

Chatterjee (1972) menjelaskan, secara klasik keseimbangan distribusi kekuatan ini atau *balance of power* sangat dipengaruhi paling besar oleh kekuatan militer suatu negara baik jumlah tentara, jumlah persenjataan maupun teknologi yang tercermin pada anggaran militernya. Hopkins & Mansbach (1973) menjelaskan bahwa konsep ini sebenarnya memiliki beberapa kelemahan. Pertama, pada kenyataannya penyesuaian kekuatan itu tidak berjalan otomatis, tetapi tergantung pada kemampuan para aktor atau negarawan untuk melihat dan manafsirkannya secara tepat. Kedua, dalam kasus-kasus spesifik sangat sulit mengetahui apakah perubahan-perubahan dalam sumber daya itu dipengaruhi para aktor atau tidak. Ketiga, model *balance of power* ini tidak memperhitungkan tujuan dan motivasi negara-negara tersebut, karena tidak semua negara menggunakan pengaruhnya untuk terus melakukan peningkatan sumber daya dan kekuatan demi memperoleh pengaruh dalam politik internasional.

Treverton & Jones (2005) menjelaskan dalam melihat kekuatan nasional, adalah dengan menghitung total sumber-sumber daya nasional. Kontainer-kontainer kapabilitas (*capability containers*) negara tersebut ditransformasi atau dikonversi melalui proses-proses tingkat negara menjadi kekuatan yang dapat digunakan. Proses-proses aktual dalam kerangka kerja ini difokuskan pada faktor-faktor yang sangat kritis. Faktor-faktor tersebut itulah yang membentuk kekuatan nasional.

Perbedaan keseimbangan kekuatan antar negara dapat memberikan persepsi ancaman bagi yang lebih lemah. Lebovic & Ishaq (1987) mendefinisikan situasi mengancam adalah terjadinya distribusi kekuatan yang asimetris antar negara yang menciptakan suatu kondisi mengancam (*threat*) dan ketegangan (*tension*) atau eskalasi diantara mereka. Dengan demikian situasi

mengancam ini dapat diekspresikan sebagai konsep kekuatan relatif. Namun bentuk asimetris kekuatan ini dilihat dari sudut pandang berbeda-beda tergantung motif apa yang melandasi kondisi ini. Dari persepsi ini maka suatu negara membuat kebijakan pengeluaran pertahanan mereka.

2.8 Kesetimbangan Dinamis

Untuk menanggapi kecenderungan konflikual di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia menggagas konsep yang disebut *Dynamic Equilibrium* karena hadirnya dua kekuatan baru. Doktrin Natalegawa telah resmi digunakan oleh Indonesia sejak tahun 2011, sebagaimana tertuang dalam pidato pernyataan tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Kementerian RI, 2011). Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa (era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono) mengeluarkan doktrin kebijakan keseimbangan dinamis. Doktrin keseimbangan dinamis dapat dikatakan sebagai prinsip bebas aktif yang diangkat ke tingkat regional. Natalegawa mendefinisikan “*Dynamic Equilibrium*” sebagai keselarasan dalam kerjasama antar negara yang berinteraksi secara damai dan menciptakan rasa saling menguntungkan tanpa adanya kekuatan dominan tunggal di kawasan (Sutiono et al., 2019). Natalegawa menyatakan, “Keseimbangan dinamis adalah kondisi di mana tidak ada kekuatan tunggal yang dominan di kawasan. Bukan karena blok politik melainkan karena jenis hubungan internasional baru yang menekankan pada keamanan bersama, kemakmuran bersama, dan stabilitas bersama” (Kementerian RI, 2011). Ia menjelaskan tiga tantangan yang dihadapi di kawasan Indo-Pasifik untuk mencapai perdamaian dan stabilitas: Pertama, ada defisit kepercayaan; kedua, masih ada klaim teritorial yang belum terselesaikan; dan Ketiga, mengelola dampak perubahan di kawasan Indo-Pasifik (Natalegawa, 2013). (Pangestu et al., 2021).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metodologi

Metode penelitian terutama yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Model alur perdagangan internasional akan dibangun untuk menguji apakah konflik antara negara anggota pakta trilateral AUKUS (Amerika, Australia, dan Inggris) dengan China mempengaruhi perdagangan internasional ke negara-negara tersebut. Model arus perdagangan internasional dibangun berdasarkan model gravitasi, yang merupakan adaptasi dari model gravitasi Newton. Model gravitasi yang digunakan untuk menjelaskan variasi yang diamati dalam arus perdagangan dibangun pada tahun 1960-an, yang menggambarkan arus perdagangan bilateral dari negara i ke negara j (Tinbergen, 1962; Linneman, 1966). (Liu, 2018)

Selain itu digunakan juga metode kualitatif melalui studi kepustakaan berbasis dokumen (Bakry, 2016) atau penelitian kualitatif berbasis literatur (Creswell, 2016). Penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deduktif yang melihat hubungan antara konsep dan data penelitian. Penelitian deduktif disusun berdasarkan kerangka analisis tertentu untuk menjelaskan fenomena tertentu. Data sekunder diperoleh dari studi literatur yang telah ada dan berkontribusi dalam penelitian ini, seperti buku, jurnal, artikel, dokumen, dan surat kabar yang telah melalui triangulasi data sehingga dapat digunakan untuk mendukung tujuan penelitian (Azwar, 2010).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dari berbagai data-data statistik yaitu:

- Aliran perdagangan internasional antara Indonesia-Amerika
- Aliran perdagangan internasional antara Indonesia-Inggris
- Aliran perdagangan internasional antara Indonesia-Australia
- Aliran perdagangan internasional antara Indonesia-China
- *National power* dari negara Amerika
- *National power* dari negara Inggris
- *National power* dari negara Australia
- *National power* dari negara China
- GDP perkapita dari negara Amerika
- GDP perkapita dari negara Inggris

- GDP perkapita dari negara Australia
- Selisih besaran anggaran militer antara negara Amerika dan China
- Selisih besaran anggaran militer antara negara Inggris dan China
- Selisih besaran anggaran militer antara negara Australia dan China
- Penggambaran konflik melalui dummy variabel

Untuk penelitian kualitatif pencarian data adalah dengan menggunakan berbagai dokumen baik dari berbagai literature, artikel ilmiah dan berita terkait. Selain itu diskusi-diskusi juga dilakukan, terutama dalam menjawab pertanyaan penelitian terhadap sikap Indonesia dalam melihat peluang atau risiko adanya Pakta Triateral AUKUS.

3.2 Pembentukan Model dan Penentuan Hipotesis Penelitian

3.2.1 Perdagangan Internasional dan Konflik

(Temurov & Kilicaslan , 2016)

Perdagangan adalah salah satu elemen sentral dalam sistem hubungan internasional yang kompleks, yang memediasi hampir semua jenis pembagian kerja internasional dan menghubungkan semua negara ke dalam satu sistem dunia. “Perdagangan adalah bagaimana negara memenuhi kebutuhan mereka yang tidak terbatas. Ada berbagai upaya untuk memodelkan arus perdagangan internasional secara empiris dari hubungan perdagangan klasik ke modern. Perdagangan Internasional adalah bentuk tertua dari hubungan ekonomi internasional. Itu ada jauh sebelum pembentukan ekonomi dunia saat ini dan revolusi industri dan meningkat secara eksponensial. Oleh karena itu, perkembangan perdagangan internasional menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi global dengan memicu inovasi dan perluasan pasar dalam jangka panjang. Dalam proses ini, stabilitas politik dan jarak antar negara sangat penting untuk pengembangan perdagangan internasional lebih lanjut. (Temurov & Kilicaslan , 2016)

Menurut Khudoykina (1998), *konflik* digunakan dalam berbagai pengertian. Sebagai sinonim untuk perselisihan internasional, masalah militer internasional, atau semua situasi, konflik hanyalah kontradiksi hubungan. Kata *konflik* berarti perselisihan antar pihak. Terlepas dari perbedaan definisi istilah *konflik* dalam hukum dan ekonomi internasional, klasifikasi berikut paling cocok dengan penelitian ini karena penelitian ini terutama tertarik pada konsekuensi ekonomi dari konflik tersebut. Yaitu: sengketa diplomatik, klaim teritorial,

kontradiksi ekonomi, dan konflik militer (termasuk perang). Konflik Keamanan disebut sebagai konflik militer, sedangkan Konflik Diplomatik dikenal sebagai sengketa politik dengan negara lain. Konflik diplomatik diterima sebagai konflik jangka pendek, dan Konflik Keamanan diterima sebagai konflik jangka panjang dan berdampak tertunda. (Temurov dan Kilicaslan, 2016)

Hubungan antara konflik politik dan perdagangan telah lama menarik banyak perhatian. Literatur tentang konflik mengkaji efek interaktif dari jarak dan perdagangan pada konflik dan kerja sama internasional. Polachek (1980) berpendapat bahwa perdagangan mengurangi perselisihan karena konflik membebankan biaya perdagangan yang meningkat pada mitra dagang. Hubungan antara perdagangan dan konflik mendapat perhatian lebih ketika (Polachek, 1997) mengkaji bagaimana perdagangan mempengaruhi konflik dengan menggunakan Fungsi Kesejahteraan Sosial. Dalam penelitian ini, Polachek (1997) menemukan bahwa (1) Semakin besar tingkat perdagangan antar negara, semakin rendah konflik di antara mereka (Polachek, 1997, p.301), (2) Ada hubungan positif antara elastisitas perdagangan dan konflik antara mitra dagang, lebih sedikit konflik (Polachek, 1997, p.302) , dan terakhir, demokrasi mengurangi konflik dan meningkatkan kerja sama (Polachek , 1997, hlm. 305-306)

Karya Morrow (1999) mengkaji logika umum dari argumen bahwa perdagangan internasional mencegah konflik karena kemungkinan kerugian ekonomi dengan menggunakan model teori permainan untuk mengkaji bagaimana perdagangan mempengaruhi resolusi relatif perselisihan dan menyimpulkan bahwa perdagangan mengurangi keinginan untuk berperang. Baik di area inisiasi maupun target. Hubungan antara perdagangan dan konflik telah mendapat investigasi empiris yang substansial juga. Beberapa penelitian telah menemukan bahwa perdagangan mengurangi konflik. Morrow (1999) membahas kemungkinan efek tidak langsung dari konflik pada perdagangan, disajikan oleh Pollins (1989) , yang belum diuji secara eksplisit. Morrow (1999) menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki kepentingan dekat dengan Amerika Serikat, yang diukur dengan kesetaraan dalam voting PBB, memiliki tingkat perdagangan yang lebih tinggi dengan Amerika Serikat.

Beberapa penelitian telah berfokus lebih khusus pada dampak perang terhadap perdagangan, dan ada beberapa perdebatan di sini juga. Barbieri dan

Levy (1999) berpendapat bahwa perang tidak selalu mengganggu perdagangan. Mereka memeriksa tujuh mitra dagang, yang masing-masing mengalami satu perang dalam periode yang sedang dipertimbangkan. Mereka menemukan bahwa perang dikaitkan dengan gangguan serius dalam perdagangan hanya dalam kasus yang satu ini. Namun, penulis mengakui bahwa sampel yang kecil membuat generalisasi menjadi sulit. Memang, Kastner (2007) mempertimbangkan jumlah kasus yang lebih besar dan menemukan bahwa perang, khususnya perang jangka panjang, merugikan perdagangan.

Beberapa studi yang meneliti korelasi antara perdagangan dan konflik menunjukkan bahwa negara-negara akan memiliki sengketa militer yang relatif rendah ketika mereka memiliki hubungan dagang yang baik. Hubungan politik antar negara dapat, secara langsung dan tidak langsung, mempengaruhi perdagangan mereka. Ketika dua mitra dagang berada dalam konflik politik, dan yang satu memiliki posisi ekonomi yang menguntungkan di atas yang lain, ia dapat mempertimbangkan untuk membatasi perdagangan untuk memajukan sisi konfliknya. Morrow et al. (1998) menunjukkan bahwa hubungan politik antara dua negara sangat mempengaruhi arus perdagangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dua negara mitra dengan hubungan perdagangan tinggi memiliki interaksi politik yang tinggi sedangkan negara dengan perdagangan rendah memiliki hubungan politik yang relatif buruk. Temuan utama Morrow et al. (1998) adalah bahwa perselisihan militer secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap perdagangan pada tahun terjadinya perselisihan tersebut. Artinya, perselisihan berdampak tertunda.

Kepentingan yang bertentangan dapat berdampak negatif pada perdagangan bahkan ketika ada sedikit potensi eskalasi perang atau sanksi perdagangan yang komprehensif karena negara kadang-kadang memberi isyarat dengan cara yang dapat merugikan perdagangan, bahkan ketika titik tawar untuk ketidaksepakatan relatif rendah. Misalnya, setelah insiden pesawat mata-mata tahun 2001 antara Amerika Serikat dan China, Beijing mengisyaratkan ketidaksenangannya dengan kebijakan pengintaian AS dengan menyarankan kemungkinan membeli lebih banyak pesawat Airbus dan lebih sedikit pesawat Boeing.

Selain perang, konflik diplomatik dan keamanan dapat sangat merugikan perdagangan internasional antara mitra yang berkonflik dan seluruh dunia.

Misalnya, embargo terbaru terhadap Republik Islam Iran (IRI) memutuskan semua hubungan dagang IRI dengan AS dan Eropa. Sanksi ekonomi yang sedang berlangsung terhadap Rusia adalah contoh lain. Ini membawa kerusakan serius pada ekonomi negara-negara pelaksana serta ekonomi global. ” (Temurov & Kilicaslan, 2016) Ini adalah contoh dari efek langsung di mana konflik politik mengarah pada pembatasan perdagangan. Konflik juga dapat secara tidak langsung memengaruhi arus perdagangan dengan meningkatkan persepsi risiko perusahaan perdagangan dan agen ekonomi lain yang terlibat.

Model alur perdagangan internasional akan dibangun untuk menguji apakah konflik antara negara anggota pakta trilateral AUKUS (Australia, Inggris, dan Amerika Serikat) dengan China mempengaruhi perdagangan internasional ke negara-negara tersebut. Model arus perdagangan internasional dibangun berdasarkan model gravitasi, yang merupakan adaptasi dari model gravitasi Newton. Model gravitasi yang digunakan untuk menjelaskan variasi yang diamati dalam arus perdagangan dibangun pada tahun 1960-an, yang menggambarkan arus perdagangan bilateral dari negara i ke negara j (Tinbergen, 1962; Linneman, 1966). (Liu, 2018)

3.2.2 Model Gravitasi untuk Perdagangan Internasional

Model gravitasi sempat dikritik pada tahun 1960-an, "Sebagai proposisi empiris murni untuk menjelaskan arus perdagangan bilateral dan kurangnya dukungan teoretis. Pada akhir 1970-an, persamaan gravitasi *dilegitimasi* oleh serangkaian artikel teoretis yang menunjukkan bahwa bentuk persamaan gravitasi dasar adalah konsisten dengan berbagai model arus perdagangan. Saat ini, model gravitasi banyak digunakan untuk menjelaskan paradoks perdagangan internasional. Penerapan model gravitasi secara empiris diperluas untuk mencakup berbagai masalah seperti dampak jarak geografis, perdagangan regional perjanjian, perbatasan negara, serikat mata uang, perang, sengketa perdagangan, dan konflik." (Temurov & Kilicaslan, 2016)

Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa arus perdagangan internasional mengikuti prinsip fisika gravitasi (Head, 2000; Porojan, 2001; Kepaptsoglou, 2010). "Dengan kata lain, dua kekuatan yang berlawanan menentukan volume perdagangan bilateral antar negara atau blok ekonomi—atau bahkan antara negara dan blok ekonomi. Volume perdagangan bilateral

didasarkan pada tingkat aktivitas ekonomi, pendapatan dan hambatan perdagangan. Yang terakhir termasuk biaya transportasi, kebijakan perdagangan, tingkat ketidakpastian, perbedaan budaya, karakteristik geografis, skema preferensi konsumen, hambatan peraturan, dan batas bersama” (Anderson & Wincoop, 2003).

Sementara potensi perdagangan adalah kapasitas ekspor dan permintaan impor, “pada tingkat analisis yang lebih agregat, kedekatan permintaan, pendapatan per kapita, dan budaya, merupakan penentu ekonomi makro utama dari potensi ekspor. Dengan demikian, berbagai kombinasi variabel ekonomi makro, seperti PDB dan populasi dengan jarak geografis, merupakan prediktor kuat potensi perdagangan. Oleh karena itu, persamaan gravitasi menggunakan variabel-variabel tersebut dan telah digunakan secara luas dalam berbagai literatur empiris tentang perdagangan internasional” (Bayoumi & Eichengreen , 1997) .

Model ini telah banyak digunakan dalam literatur empiris untuk mengevaluasi determinan perdagangan bilateral. “Ini menjelaskan variabel dependen terkait perdagangan dengan kombinasi variabel ekonomi makro, seperti ukuran negara, pendapatan, nilai tukar, harga, dan sebagainya untuk kedua negara. Selain itu, indikator biaya transportasi antara kedua negara dan variabel akses pasar yang lebih umum biasanya ditambahkan. Model tersebut menyatakan bahwa arus perdagangan bilateral berhubungan positif dengan ukuran ekonomi (PDB atau GNI) negara i dan j . Dia juga menyatakan bahwa arus perdagangan bilateral berhubungan negatif dengan jarak antara kedua negara.” (Liu, 2018)

Model gravitasi untuk perdagangan internasional adalah model empiris sederhana yang digunakan untuk menganalisis arus perdagangan antar negara. “Sejarah model dimulai dengan Hukum Gravitasi Newton (Head, 2000) ”. Model gravitasi perdagangan internasional mirip dengan “persamaan gravitasi Newton. Pada 1687, Newton mengusulkan Hukum Gravitasi Universal. Hukum ini menyatakan bahwa gaya tarik-menarik antara dua benda, i dan j , diberikan sebagai berikut:

$$F_{ij} = G \cdot M_i \cdot M_j / D_{ij}^2 \quad (1)$$

Dimana F_{ij} adalah gaya tarik-menarik, G adalah konstanta gravitasi, M_i dan M_j adalah massa kedua benda tersebut, D_{ij} adalah jarak antara dua benda, i dan j .

Berdasarkan persamaan gravitasi Newton seperti yang diberikan di atas, Tinbergen (1962) mengusulkan hubungan fungsional yang sama untuk menjelaskan arus perdagangan internasional.” (Liu, 2018) Persamaan yang diusulkan dalam bentuk sederhana adalah:

$$T_{ij} = A (Y_i \cdot Y_j) / (D_{ij}) \quad (2)$$

Dimana, T_{ij} adalah arus perdagangan bilateral (*ekspor plus impor*) antar negara i dan j , $Y_i(j)$ adalah GDP atau GNI negara i (j), D_{ij} adalah jarak antara keadaan i dan j , dan A adalah konstanta proporsionalitas. Mengingat logaritma, persamaan mengambil bentuk berikut:

$$\ln (T_{ij}) = a_0 + a_1 \ln (Y_i \cdot Y_j) + a_2 \ln (D_{ij}) \quad (3)$$

Model dasar yang dikembangkan oleh Deardorff (1995) untuk diterapkan pada T_{ij} , yaitu:

$$T_{ij} = A_{ij} \cdot (GDP_i \cdot GDP_j) / Dist_{ij} \quad (4)$$

Dimana, “ T_{ij} adalah volume T atau arus perdagangan aktual dari negara asal i ke negara tuan rumah j ; GDP_i adalah PDB aktual negara asal; PDB_j adalah PDB sebenarnya dari negara tuan rumah; $Dist_{ij}$ adalah distance atau jarak antara home country i dan host country j , dan A_{ij} adalah konstanta pembanding.

Tanda-tanda di atas berarti menurut model gravitasi, arus perdagangan berbanding lurus dengan ukuran ekonomi atau GDP negara tuan rumah dan negara asal (tanda positif) dan berbanding terbalik dengan jarak/hambatan antara negara tuan rumah dan negara asal (tanda negatif). Jadi dalam model dasar atau basic gravity model ada hubungan :

$$T_{ij} = f (A_{ij}, PDB_i, PDB_j, Dist_{ij}) \quad (5)$$

Persamaan ini merupakan kondisi ekuilibrium dalam *jangka panjang*. Jadi, dalam jangka panjang, T_{ij} yang diharapkan harus sama dengan T_{ij} yang sebenarnya. Namun, pada kenyataannya, beberapa negara menerima T_{ij} kurang dari yang diharapkan atau bahkan menerima lebih dari yang diharapkan. Dalam model ini, terdapat konstanta A_{ij} di mana jika PDB suatu negara menjadi

nol, aliran T_{ij} antara kedua negara juga nol. Di sini nilai A_{ij} menjadi konstanta proporsional.

Dalam menerapkan model pada konstanta proporsional, ukuran populasi (POP) kedua negara juga dimasukkan sehingga konstanta proporsional menjadi (A) dikalikan dengan $(POP_i \times POP_j) / (GDP_i \times GDP_j)$ di mana A_{ij} menjadi konstanta A . Dengan demikian diasumsikan bahwa semakin besar jumlah penduduk akan menarik arus FDI yang lebih besar, beberapa diantaranya:

$$T_{ij} = A \times (POP_i \times POP_j) \times (GDP_i / POP_i \times GDP_j / POP_j) \times (1/ Dist_{ij}) \quad (6)$$

dimana T_{ij} meningkat sejalan dengan peningkatan GDP_i dan GDP_j , dan GDP menjadi fungsi dari GDP per kapita ($GDPC = GDP / POP$), sehingga dapat ditulis ulang menjadi:

$$T_{ij} = A \times (POP_i \times GDPC_i) \times (POP_j \times GDPC_j) \times (1/ Dist_{ij}) \quad (7)$$

Meskipun GDP_i / POP_i tidak konstan, variabel ini dapat dihilangkan karena tidak dapat digunakan sebagai variabel penjelas untuk menjelaskan penyimpangan arus perdagangan (T) ke negara tuan rumah. Jadi, jika dicatat, kita dapat memodelkan persamaan empiris sebagai berikut:

$$\ln T_{ij} = \beta_0 + \beta_1 \ln GDPC_j + \beta_2 \ln POP_j - \beta_3 \ln Dist_{i,j} + \varepsilon_{ij} \quad (8)$$

Tanda-tanda di atas berarti bahwa menurut model gravitasi, arus Perdagangan (T) berbanding lurus dengan PDB per kapita dan jumlah penduduk negara tuan rumah (tanda positif) dan berbanding terbalik dengan jarak/hambatan antara negara asal dan negara tuan rumah (tanda negatif). (Kennedy, 2018)

Meskipun model gravitasi dasar dapat menjelaskan arus Perdagangan (T) dalam analisis jangka panjang, model tersebut tidak menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi volatilitas arus perdagangan dalam jangka pendek. Persamaan di atas adalah persamaan dasar untuk model gravitasi. Namun, banyak penyesuaian model telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Model akan disesuaikan dengan tujuan penelitian dari penelitian ini. Oleh karena itu perlu dibuat suatu *model gravitasi yang dimodifikasi*.

Dengan identifikasi masalah dalam konteks penelitian yaitu untuk melihat apakah konflik di Laut Cina Selatan yang mendorong munculnya AUKUS

berdampak pada arus perdagangan Indonesia, model gravitasi yang dimodifikasi dapat dituliskan sebagai berikut:

1. Ukuran ekonomi proksi negara asal diubah dari PDB menjadi kekuatan nasional negara asal.
2. Dalam model tersebut ditambahkan kekuatan nasional dari China karena ingin melihat dampak arus perdagangan ke Indonesia dari negara-negara anggota AUKUS. Bagaimanapun, China adalah penyebab munculnya konflik.
3. *GDP/POP* diambil dari data *GDP* per kapita negara asal.
4. Jarak yang semula jarak antara *home country* dan *host country* diganti dengan variabel barrier yaitu dengan proksi selisih anggaran militer antara negara AUKUS dengan China yang dianggap dapat mengurangi arus perdagangan.
5. Dalam model tersebut ditambahkan arus perdagangan internasional dari China karena kita ingin melihat dampak arus perdagangan ke Indonesia dari masing-masing negara anggota AUKUS karena China dipandang sebagai penyebab munculnya konflik.
6. *Variabel boneka* ditambahkan, menunjukkan konflik (terinspirasi oleh Temurov & Kilicaslan , 2016) atau perang dagang antara AS dan China selama periode tersebut. Konflik yang terlihat bermula di Indo-Pasifik seiring dengan perang dagang dengan AS yang mulai dirasakan meresahkan Australia dinilai *dummy*=1 jika konflik perang dagang belum terjadi *dummy*=0.

3.2.3 Penentuan Hipotesis Penelitian

Dari model yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dibentuk model empiris untuk mencari jawaban atau membuktikan hipotesis dari masalah penelitian. Dalam penentuan hipotesis ditentukan terlebih dahulu variabel-variabel yang terlibat dalam model, yaitu:

Arus perdagangan internasional ke Indonesia = *fungsi dari* (*National Power* dari negara AUKUS, *National Power* dari China, *GDP* per kapita negara AUKUS, Selisih anggaran militer antara negara AUKUS dan China, Total aliran perdagangan dari China ke Indonesia, dan konflik dalam bentuk variabel *dummy*)

Persamaan empiris dapat ditulis sebagai berikut:

$$\ln T_{ij,t} = \beta_0 + \beta_1. (National\ Power_{a,t}) + \beta_2. (National\ Power_{c,t}) + \beta_3. \ln (GDP\ percapita_{a,t}) + \beta_4. \square Defense_{a,c,t} + \beta_5. \ln T_{a,c,t} + \beta_6. dummy_t + \varepsilon_t$$

i =host country = Indonesia ; a =home country = negara anggota AUKUS ;
 c = China ; t =time = periode pengamatan

Persamaan di atas menjelaskan bahwa perkembangan arus perdagangan ke Indonesia dari negara anggota AUKUS dipengaruhi oleh *national power*-nya. Dilema keamanan ini terjadi dari perlombaan pembelanjaan pertahanan antara negara anggota AUKUS dengan China, serta konflik perang dagang dengan China dan situasi di Indo-Pasifik. Keadaan ini akan dibuktikan dalam penelitian ini dengan membangun hipotesis sebagai berikut:

Ho_{1A} : *National Power home country* (masing-masing negara anggota AUKUS) tidak mempengaruhi arus perdagangan dari *home country* ke Indonesia (*host country*)

Ho_{2A} : *National Power China* tidak mempengaruhi arus perdagangan dari *home country* ke Indonesia (*host country*)

Ho_{3A} : *GDP per kapita* dari *home country* (masing-masing negara anggota AUKUS) tidak mempengaruhi arus perdagangan dari *home country* ke Indonesia (*host country*)

Ho_{4A} : Selisih anggaran pertahanan antara *home country* (masing-masing negara anggota AUKUS) dan China tidak mempengaruhi arus perdagangan dari *home country* ke Indonesia (*host country*)

Ho_{5A} : Aliran perdagangan dari China ke Indonesia tidak mempengaruhi arus perdagangan dari *home country* (masing-masing negara anggota AUKUS) ke Indonesia

Ho_{6A} : Konflik perang dagang dan situasi di Indo-Pasifik tidak mempengaruhi arus perdagangan dari *home country* (masing-masing negara anggota AUKUS) ke Indonesia

Demikian pula sebaliknya, untuk melihat pengaruh situasi konflik di Indo-Pasifik terhadap aliran perdagangan internasional dari China ke Indonesia, dengan hipotesis sebagai berikut:

Ho_{1C}: *National Power home country* (China) tidak mempengaruhi arus perdagangan dari *home country* (China) ke Indonesia (*host country*)

Ho_{2C} : *National Power* dari masing-masing negara anggota AUKUS tidak mempengaruhi arus perdagangan dari *home country* (China) ke Indonesia.

Ho_{3C} : *GDP per kapita* dari *home country* tidak mempengaruhi arus perdagangan dari *home country* ke Indonesia (*host country*)

Ho_{3C} : Selisih anggaran pertahanan antara *home country* (China) dan masing-masing negara anggota AUKUS tidak mempengaruhi arus perdagangan dari *home country* (China) ke Indonesia (*host country*).

Ho_{4C} : Aliran perdagangan dari masing-masing negara anggota AUKUS ke Indonesia tidak mempengaruhi arus perdagangan dari *home country* (China) ke Indonesia.

Ho_{5C} : Konflik perang dagang dan situasi di Indo-Pasifik tidak mempengaruhi arus perdagangan dari *home country* (China) ke Indonesia (*host country*).

Hipotesis ini akan diuji untuk membuktikan apakah konflik antara negara AUKUS dan China di kawasan Indo-Pasifik tidak mempengaruhi arus perdagangan ke Indonesia dengan negara-negara tersebut. Untuk menjawab tujuan penelitian ini, data yang akan dikumpulkan adalah dari negara-negara anggota AUKUS (Amerika Australia, dan Inggris), Indonesia, dan China secara *time series*.

3.3 Data

3.3.1 Data *National Power*

Konsep *national power* sangat penting dan mengundang banyak perdebatan. Cara menentukan besarnya power adalah yang utama dan fundamental hal penting dalam perdebatan yang terjadi. Sebab, mau tidak mau, konsep power sangat berpengaruh dalam lingkungan strategis internasional. Setiap negara ingin menyeimbangkan kekuatannya untuk menghadapi ancaman dari musuh atau tetangganya di lingkungan internasional.

Ukuran ancaman tradisional/eksternal sangat sensitif terhadap kekuatan masing-masing negara relatif terhadap kekuatan negara tetangganya. “Besarnya ini mengasumsikan bahwa semakin besar kemampuan relatif suatu negara (*nation's relative capability*), semakin besar pula pengaruh politik dan militernya terhadap lingkungan strategisnya. Distribusi kemampuan ini tidak simetris antar negara sehingga menciptakan ancaman dan tekanan antar negara. (Kennedy & Siregar , 2018)

Chatterjee (1972) menjelaskan secara klasik bahwa keseimbangan distribusi kekuasaan, atau *balance of power*, paling banyak dipengaruhi oleh kekuatan militer suatu negara, jumlah pasukan, jumlah senjata, dan teknologi yang tercermin dalam anggaran militernya. Hopkins & Mansbach (1973) menjelaskan bahwa konsep ini memiliki beberapa kelemahan. Pertama, penyesuaian kekuasaan tidak berjalan secara otomatis tetapi bergantung pada kemampuan para aktor atau politisi untuk melihat dan memaknainya secara tepat. Kedua, dalam kasus tertentu, sangat sulit untuk mengetahui apakah perubahan sumber daya dipengaruhi oleh aktor. Ketiga, model *balance of power* ini tidak mempertimbangkan tujuan dan motivasi negara-negara tersebut karena tidak semua negara menggunakan pengaruhnya untuk meningkatkan sumber daya dan kekuatan untuk mendapatkan pengaruh dalam politik internasional. (Kennedy & Siregar, 2018)

Treverton & Jones (2005) menjelaskan bahwa melihat kekuatan nasional dilakukan dengan menghitung total sumber daya nasional. Wadah kemampuan (*container*) negara diubah melalui proses level negara menjadi kekuatan yang dapat digunakan. Proses aktual dalam kerangka kerja ini difokuskan pada faktor-faktor yang sangat kritis. Faktor-faktor tersebut membentuk *national power*. Salah satu besaran yang harus diperhatikan adalah pengeluaran untuk pertahanan suatu negara (Kennedy et al., 2018).

Perbedaan keseimbangan kekuatan antar negara dapat memberikan ancaman yang dirasakan bagi negara yang lebih lemah. Lebovic & Ishaq (1987) mendefinisikan situasi yang mengancam sebagai distribusi kekuasaan yang asimetris antar negara yang menciptakan kondisi yang mengancam (ancaman) dan ketegangan atau eskalasi di antara mereka. Dengan demikian situasi yang mengancam ini dapat dinyatakan sebagai konsep kekuatan relatif. Namun, bentuk kekuasaan yang asimetris ini dilihat dari berbagai sudut pandang tergantung motif yang melatarbelakangi kondisi tersebut. Dari persepsi ini, suatu negara membuat kebijakan pembelanjaan pertahanannya." (Kennedy & Siregar, 2018)

Perhitungan *power* untuk kajian negara pertama kali dipikirkan untuk dianalisis oleh seorang ahli statistik Jerman Johann Peter Submilch pada tahun 1741, yang memimpin perhitungan *power* di bidang statistik. Tidak mengherankan jika rumus *power* pertama kali muncul melalui pengembangan

statistik yang sistematis. Pada tahun 1741-1960 beberapa ahli mulai mengembangkan beberapa persamaan. Perhitungan yang lebih sistematis mulai terlihat pada tahun 1960-an dengan persamaan dari Clifford German (1960), yang membuat model menjadi lebih umum. Formula German (1960) terdiri dari empat kategori, yaitu: (1) ekonomi nasional, (2) tanah, (3) penduduk, dan (4) kekuatan militer. (Chang, 1999)

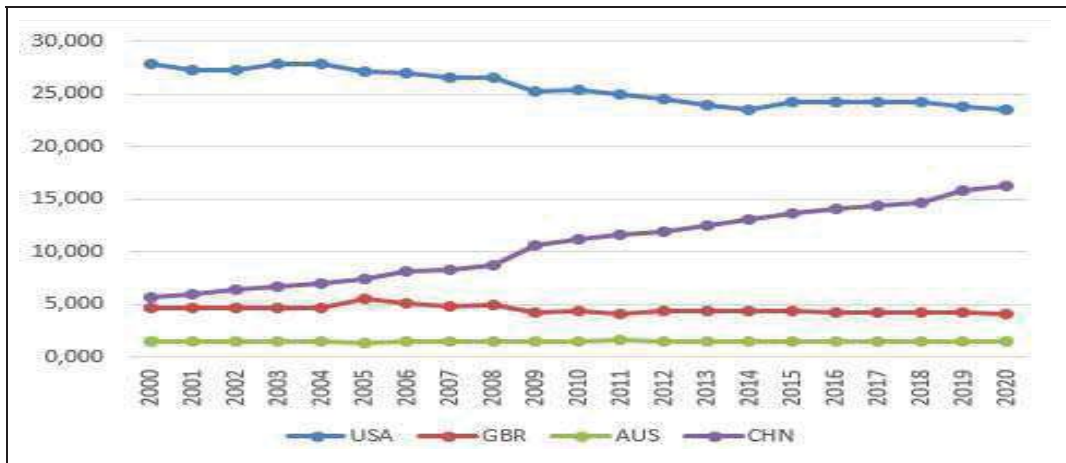
Berikut data *national power* dari negara-negara yang terlibat dalam penelitian ini, yaitu negara-negara anggota AUKUS (Amerika, Australia, Inggris) dan negara China, pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. *National Power* dari Amerika, Inggris, Australia, China dan Indonesia
Power index, Global Power Index (*percent of global total*)

No.	Tahun	National Power Amerika	National Power Inggris	National Power Australia	National Power China	National Power Indonesia
1.	2000	27,870	4,631	1,480	5,644	0,722
2.	2001	27,340	4,670	1,494	5,984	0,724
3.	2002	27,290	4,719	1,520	6,371	0,734
4.	2003	27,800	4,748	1,499	6,745	0,754
5.	2004	27,840	4,620	1,479	7,064	0,762
6.	2005	27,150	5,545	1,393	7,460	0,652
7.	2006	27,020	5,180	1,505	8,168	0,632
8.	2007	26,610	4,833	1,531	8,284	0,646
9.	2008	26,570	4,979	1,509	8,685	0,663
10.	2009	25,190	4,230	1,553	10,640	0,687
11.	2010	25,350	4,367	1,530	11,250	0,737
12.	2011	24,980	4,162	1,614	11,610	0,775
13.	2012	24,540	4,342	1,523	11,930	0,788
14.	2013	23,970	4,342	1,533	12,510	0,827
15.	2014	23,580	4,356	1,554	13,040	0,835
16.	2015	24,290	4,356	1,531	13,700	0,823
17.	2016	24,300	4,319	1,536	14,100	0,852
18.	2017	24,270	4,302	1,542	14,410	0,877
19.	2018	24,170	4,268	1,546	14,740	0,909
20.	2019	23,740	4,202	1,505	15,830	0,997
21.	2020	23,510	4,161	1,500	16,330	1,038

Source: https://www.ifs.du.edu/IFs/frm_PackagedDisplaysFlex.aspx

Berikut gambaran grafik dari *national power* setiap negara.



Gambar 1. *National Power* Negara Australia, Inggris, Amerika, dan China dari Indeks Kekuatan Global (persen dari total global)

Sumber: Olah data dari
https://www.ifs.du.edu/IFs/frm_PackagedDisplaysFlex.aspx

Pada gambar di atas terlihat bahwa *National Power* (persen total global) dari AS (periode 2000-2020) cenderung mengalami tren penurunan dari 27.870 (tahun 2000) menjadi 23.510 (tahun 2020). Berbeda dengan China, Kekuatan Nasionalnya cenderung meningkat dari 5.644 (2000) menjadi 16.330 (2020). Sementara itu, negara anggota AUKUS lainnya (Inggris dan Australia) hampir mendatar, dimana Inggris mengalami tren penurunan sedangkan Australia mengalami peningkatan landai (hampir mendatar).

2.3.2 Data Ekonomi

Berikut adalah data deskriptif dari hasil pengumpulan data.

Tabel 2. Data Penelitian Deskriptif Periode 2000-2020

Sample: 2000 2020 Common sample							
	TRADE?	POWERC?	POWER?	GDPC?	TRADEC?	MILITARY?	DUMMY?
Mean	8.895016	10.69024	10.54903	10.81891	10.24993	-0.889935	0.142857
Median	9.044262	11.25000	4.356000	10.83857	10.49451	-0.542453	0.000000
Maximum	10.26172	16.33000	27.87000	11.01349	11.19674	0.175721	1.000000
Minimum	7.530158	5.644000	1.393000	10.57718	8.976656	-3.183167	0.000000
Std. Dev.	0.897343	3.423840	10.83243	0.119126	0.754123	0.954247	0.352738
Skewness	-0.094278	0.033617	0.686669	-0.261749	-0.358520	-0.930884	2.041241
Kurtosis	1.684517	1.621885	1.562004	1.850367	1.666229	2.669953	5.166667
Jarque-Bera	4.635878	4.997267	10.37897	4.188728	6.019365	9.384667	56.07292
Probability	0.098476	0.082197	0.005575	0.123149	0.049307	0.009165	0.000000
Sum	560.3860	673.4850	664.5890	681.5912	645.7454	-56.06590	9.000000
Sum Sq. Dev.	49.92389	726.8063	7275.174	0.879848	35.25945	56.45639	7.714286
Observations	63	63	63	63	63	63	63
Cross sections	3	3	3	3	3	3	3

Sumber: Hasil pengolahan data dari Software EVIEWS

Informasi:

PERDAGANGAN = Total arus perdagangan internasional (ekspor+impor) dari masing-masing negara anggota AUKUS (Australia, Inggris, dan Amerika Serikat) ke Indonesia.

TRADEC = Total arus perdagangan internasional (ekspor+impor) dari China ke Indonesia.

POWER = Kekuatan Nasional masing-masing negara anggota AUKUS

POWERC = Kekuatan Nasional Negara China

GDPC = Produk Domestik Pertumbuhan Per Kapita (PDB) setiap negara anggota AUKUS

MILITARY = Selisih anggaran militer terhadap GDP China dan masing-masing negara anggota AUKUS (Australia, Inggris, dan Amerika Serikat)

DUMMY = tahun terjadinya perang dagang antara AS dan China (nilai 0 jika tidak ada perang dagang, nilai 1 jika ada perang dagang, mulai dari tahun 2018)

Beberapa penggambaran data disampaikan melalui grafik, seperti pada gambar-gambar di bawah. Berikut perkembangan total arus perdagangan internasional dari negara-negara anggota AUKUS (Amerika, Australia, dan Inggris) serta China dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Total Nilai Perdagangan Internasional menurut Negara Utama ke Indonesia (dalam juta US\$), 2000-2020

No.	Tahun	Nilai Perdagangan AS - Indonesia	Nilai Perdagangan Inggris - Indonesia	Nilai Perdagangan Australia - Indonesia	Nilai Perdagangan China – Indonesia
1.	2000	13 057,5	2 224,2	7 130,0	7 916,1

2.	2001	13 645,2	2 322.5	6 792.7	8 513,9
3.	2002	11 382.7	1944.5	7 415,7	9 229.5
4.	2003	11 428,4	1863.4	7 105,0	11 042.7
5.	2004	12 507,5	2 413,2	9 909,1	12 243,1
6.	2005	13 599,6	2 109,2	9 214.5	15 567,0
7.	2006	15 855,5	2 012.9	10 296,6	17 138,4
8.	2007	16 401.4	2 108,2	6 398.6	18 233,4
9.	2008	20 917,0	2 614.5	8 108.5	26 883.7
10.	2009	17 933,9	2 303,9	6 700,2	25 501,5
11.	2010	23 665.8	2 631.1	8 343,4	36 116,8
12.	2011	27 272,3	2 893.6	10 759,6	49 153,2
13.	2012	26 477.0	3 063.1	10 203.0	51 045.3
14.	2013	24 757,4	2 716,7	9 408.7	52 451,0
15.	2014	24 700,2	2 553,4	10 595,9	48 230,2
16.	2015	23 834.0	2 346.0	8 518,1	44 457,3
17.	2016	23 439,8	2 484,2	8 469.8	47 591.3
18.	2017	25 916,1	2 455.7	8 533,3	58 849,9
19.	2018	28 616.0	2 677,8	8 645,1	72 670,0
20.	2019	27 106,2	2 399,5	7 843.9	72 892,5
21.	2020	27 202,7	2 331.4	7 152,3	71 416,5

Sumber: <https://www.bps.go.id/indicator/8/336/3/neraca-perdagangan-beberapa-negara.html>

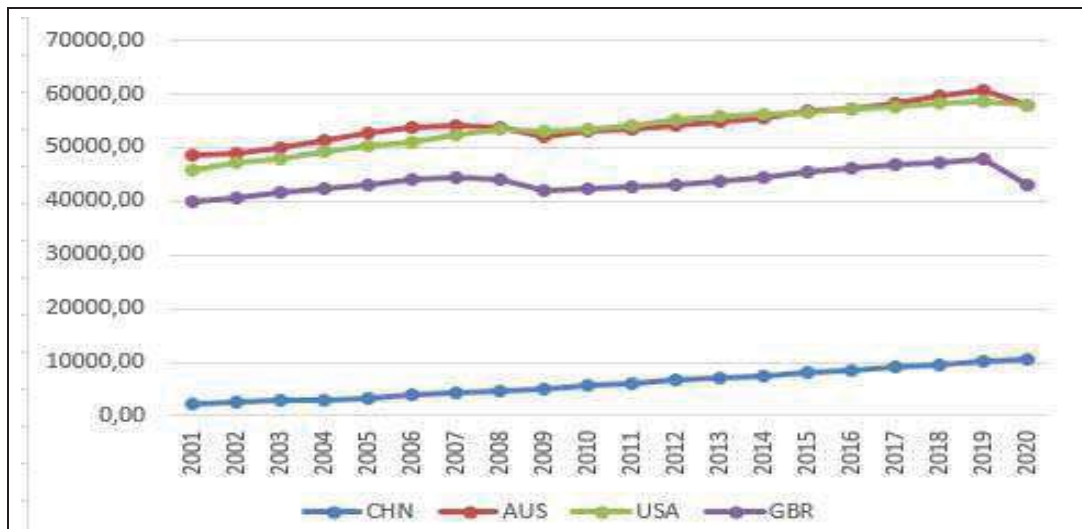
Berikut tabel untuk data PDB atau GDP perkapita.

Tabel 4. GDP per capita (constant 2015 US\$)

No.	Tahun	GDP perkapita Amerika	GDP perkapita Inggris	GDP perkapita Australia
1.	2001	45864,77	39888,50	48726,58
2.	2002	47127,28	40563,34	49095,33
3.	2003	47997,14	41598,21	50036,23
4.	2004	49439,12	42336,55	51485,21
5.	2005	50332,87	43137,26	52789,73
6.	2006	50948,22	43927,89	53738,09
7.	2007	52538,98	44576,37	54299,62
8.	2008	53338,60	44120,93	53854,16
9.	2009	53225,95	41928,61	51996,18
10.	2010	53542,83	42487,93	52963,46
11.	2011	54108,11	42771,64	53394,86
12.	2012	55254,61	43099,60	54213,46
13.	2013	55723,95	43621,06	54830,78
14.	2014	56305,98	44596,19	55675,39
15.	2015	56707,02	45404,57	56762,73
16.	2016	57358,78	46081,72	57292,54
17.	2017	57695,57	46746,64	58215,41
18.	2018	58447,25	47231,34	59600,05
19.	2019	58781,05	47750,88	60687,23
20.	2020	58029,52	43166,16	58060,31

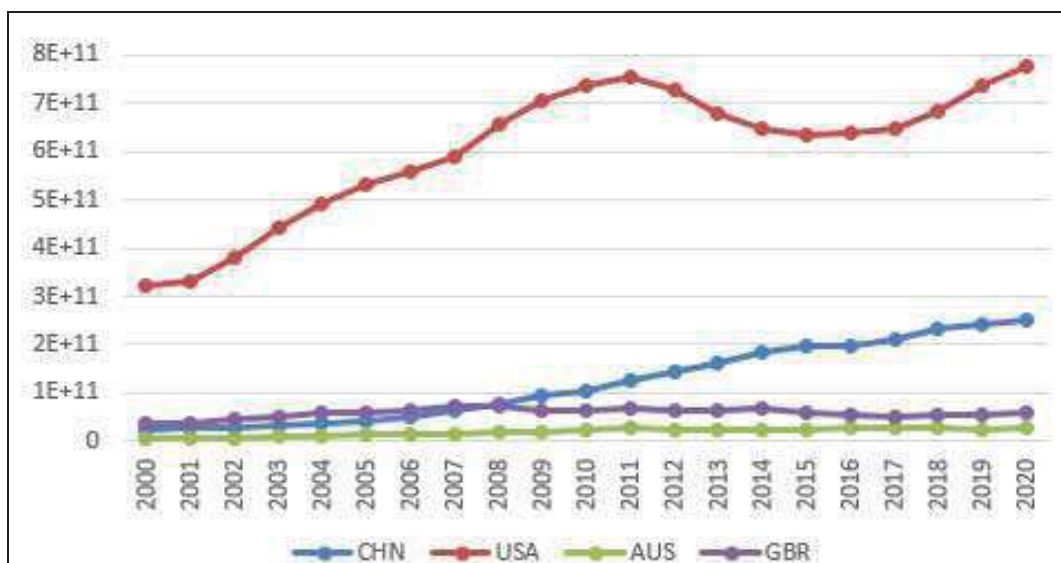
Sumber: Data diolah dari World Development Indicator (WDI, 2022)

Pada Gambar di bawah terlihat bahwa seluruh negara (Australia, Inggris, Amerika Serikat, dan China) memiliki Pertumbuhan *Per Capita Domestic Product* (GDP) yang cenderung meningkat (Periode 2000-2020), dimana AS dan Australia memiliki PDB per kapita tertinggi.

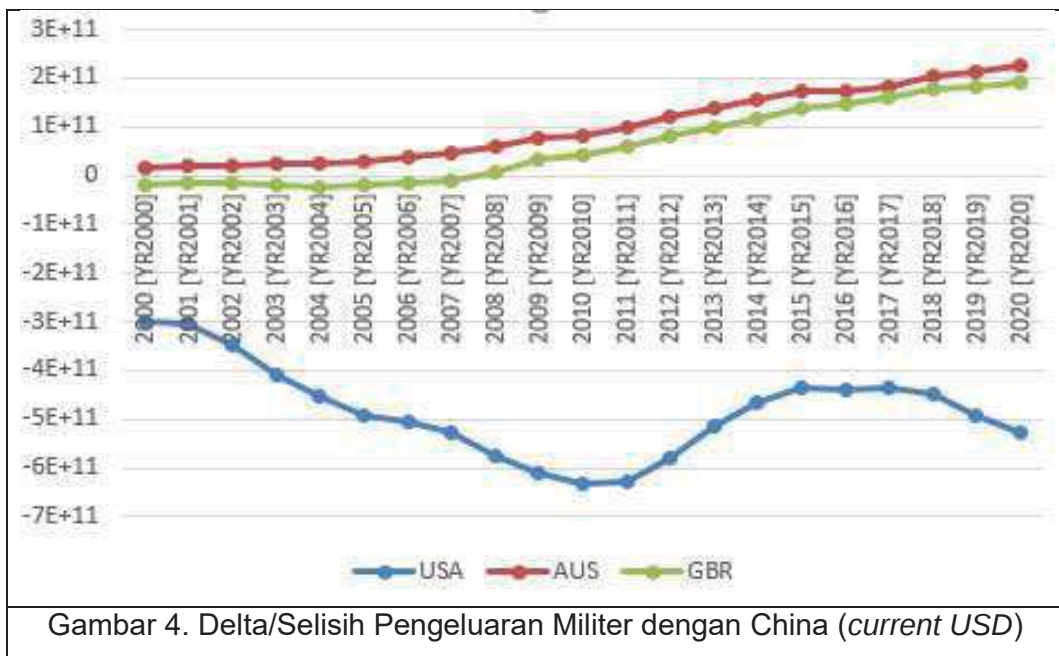


Gambar 2. GDP per kapita (Konstan US\$ 2015), 2001-2020
Sumber: Data diolah dari Indikator Pembangunan Dunia (WDI, 2022)

Berikut adalah data-data anggaran militer dari masing-masing negara, Amerika, Australia, Inggris, dan Cina, yang digambarkan secara grafis.



Gambar 3. Pengeluaran Militer (*current USD*), Tahun 2000-2020



Sumber: Data olahan dari World Development Indicators (WDI, 2022)

Berikut adalah data-data pengeluaran militer (persen dari GDP) dari negara-negara Amerika, Inggris, Australia dan China yang dapat dilihat pada tabelaris di bawah ini.

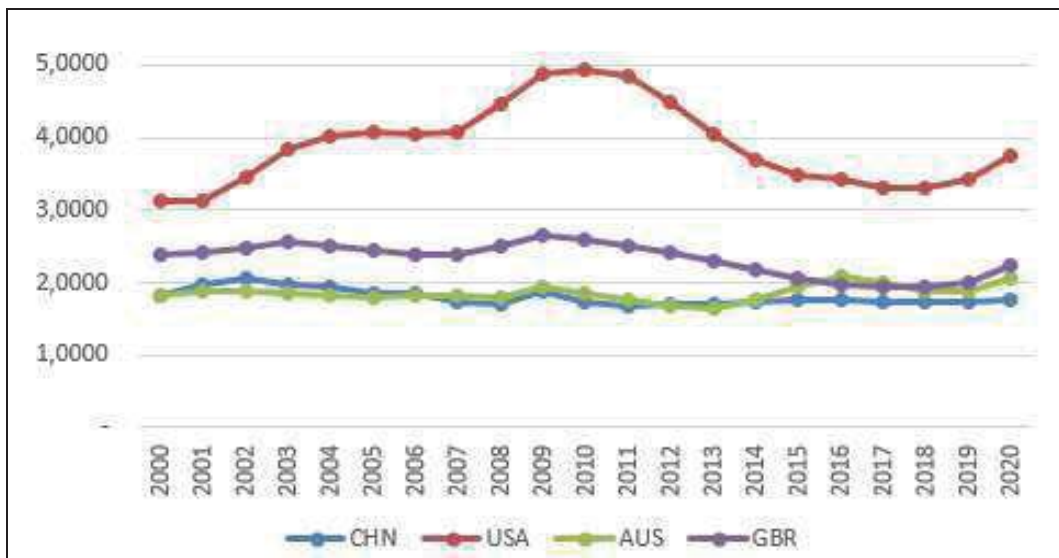
Tabel 5. Pengeluaran Militer (% of GDP)

No.	Tahun	Anggaran Militer Amerika (% of GDP)	Anggaran Militer Inggris (% of GDP)	Anggaran Militer Australia (% of GDP)	Anggaran Militer China (% of GDP)
1.	2000	3,1122	2,3728	1,8298	1,8303
2.	2001	3,1238	2,4111	1,8701	1,9762
3.	2002	3,4476	2,4857	1,8740	2,0497
4.	2003	3,8272	2,5521	1,8463	1,9834
5.	2004	4,0163	2,4978	1,8274	1,9278
6.	2005	4,0900	2,4342	1,8025	1,8533
7.	2006	4,0416	2,3731	1,8223	1,8546
8.	2007	4,0797	2,3742	1,8153	1,7398
9.	2008	4,4638	2,4957	1,7985	1,7123
10.	2009	4,8856	2,6535	1,9269	1,8861
11.	2010	4,9226	2,5782	1,8568	1,7395
12.	2011	4,8402	2,5027	1,7571	1,6656
13.	2012	4,4774	2,4206	1,6710	1,6934
14.	2013	4,0467	2,2936	1,6397	1,7029
15.	2014	3,6959	2,1839	1,7722	1,7287
16.	2015	3,4778	2,0455	1,9510	1,7507
17.	2016	3,4189	1,9814	2,0837	1,7707

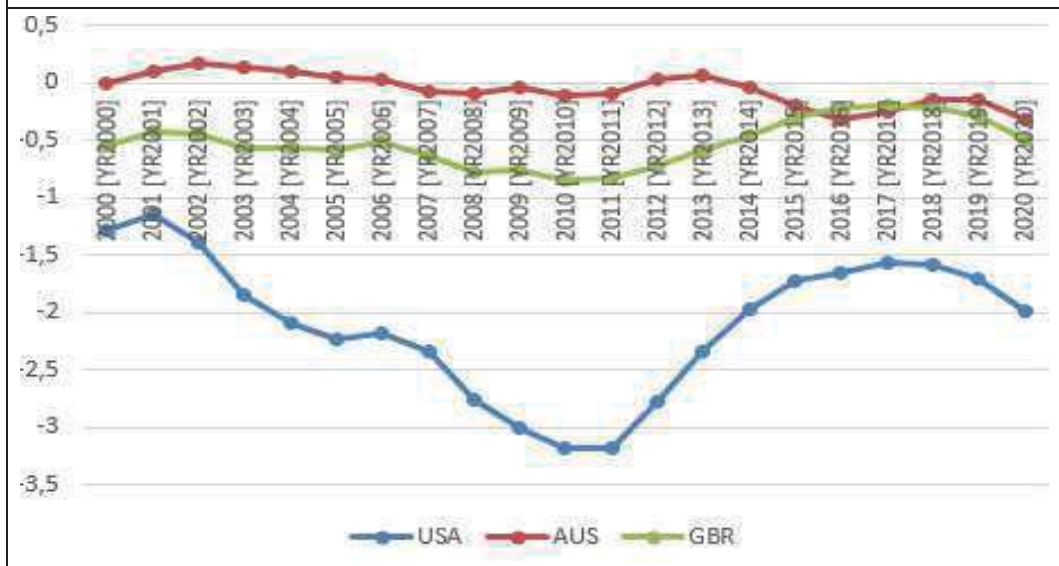
18.	2017	3,3134	1,9463	1,9976	1,7465
19.	2018	3,3162	1,9488	1,8906	1,7395
20.	2019	3,4271	2,0130	1,8797	1,7278
21.	2020	3,7412	2,2465	2,0630	1,7498

Sumber: Data olahan dari World Development Indicators (WDI, 2022)

Berikut dalam grafik untuk penggambaran pengeluaran militer (% dari GDP), periode 2000-2020.



Gambar 5. Pengeluaran Militer (% dari GDP), 2000-2020



Gambar 6. Delta/Selisih Pengeluaran Militer dengan China (% dari PDB)

Sumber: Data olahan dari World Development Indicators (WDI, 2022)

Grafik di atas menggambarkan pengeluaran militer masing-masing negara (Australia, Inggris, Amerika Serikat, dan China, Periode 2000-2020)

dalam USD (nominal) saat ini dan % dari PDB. Secara nominal, belanja militer dari AS dan China cenderung meningkat, sedangkan Amerika memiliki belanja militer tertinggi. Sementara itu, secara nominal, belanja militer dari Australia dan Inggris cenderung mendatar, sedangkan Inggris terus menurun. Jika dilihat dalam % GDP, belanja militer AS dan China cenderung menurun dan mulai meningkat lagi di tahun 2018. Sementara itu, belanja militer dari Australia dan Inggris cenderung mendatar ke arah peningkatan bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara tersebut memiliki motivasi untuk meningkatkan anggaran militernya mulai sekitar tahun 2018.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Kawasan Indo-Pasifik

(Pangestu, 2021)

Wilayah Indo-Pasifik menggabungkan wilayah Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Secara geografis, kawasan Indo-Pasifik merupakan wilayah yang membentang dari Samudera Hindia bagian timur hingga Samudera Pasifik bagian barat dan terhubung dengan Selat Malaka. Indo-Pasifik telah menjadi pusat aktivitas geopolitik, keamanan, perdagangan, dan lingkungan maritim (Passarelli, 2014). Setidaknya ada lebih dari 50 negara di ring Indo-Pasifik. Samudra Hindia, samudra terbesar ketiga di dunia (setelah Pasifik dan Atlantik), menempati sekitar 20 persen permukaan Bumi, dengan luas total 73,56 juta mil persegi (Michel & Stickler, 2012). Wilayah Samudera Hindia banyak mengandung mineral, minyak, dan gas alam. Negara-negara di kawasan Samudera Hindia memiliki lebih dari dua pertiga cadangan minyak dunia yang diketahui, sehingga kawasan Samudera Hindia diyakini kaya akan cadangan energi (Albert, 2016). Setidaknya 35 persen cadangan gas dunia, 60 persen uranium, 40 persen emas, 80 persen seluruh cadangan intan, dan sejumlah besar berbagai zat mineral lainnya (Future Directions International, 2012).

Samudra Pasifik memiliki luas sekitar 63,8 juta mil persegi (165,25 juta km persegi). Samudra Pasifik jauh lebih luas daripada samudra Hindia dan Atlantik. Selain itu, luasnya lebih dari sekedar permukaan tanah bumi. Samudra Bumi membentang dari pesisir Antartika hingga Selat Bering hingga garis lintang 135°, sekitar 15.600 mil (15.500 km). Daerah memanjang terbesarnya adalah sekitar 19.000 mil (19.300 km) sepanjang garis lintang 5°LU, antara pantai Kolombia di Amerika Selatan dan Semenanjung Malaya di Asia. Kedalaman rata-rata adalah 14.040 kaki (4.280 meter), dan kedalaman terbesar yang diketahui adalah 36.201 kaki (11.034 meter) di Palung Mariana (Cotter, Bardach, & Morgan, 2019).

Sejak pertengahan abad ke-20, telah terjadi pertumbuhan luar biasa dalam perdagangan antara Lingkar Pasifik bagian barat. Terutama Cina, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Amerika Utara, dan tidak ketinggalan

Amerika Serikat. Perdagangan juga berkembang antara Amerika Utara dan negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Di kawasan Pasifik barat, perdagangan meningkat antara Jepang dan Korea Selatan (Cotter, Bardach, & Morgan, 2019). Dengan demikian, Samudra Pasifik mendukung beberapa rute perdagangan terpenting di dunia.”



Gambar 7. Peta Indo-Pasifik (CRS, 2022)

Gagasan Indo-Pasifik telah ada sejak akhir abad ke-20. Setelah Perang Dunia II, pada tahun 1960-an, Asia-Pasifik mendominasi konsepsi Asia. “Umumnya dipahami sebagai wilayah yang menghubungkan Asia Timur Laut dan Tenggara dengan Oseania (dan karenanya Australia) dan Amerika. Sebagian besar tujuan gagasan ini adalah untuk mencerminkan dan memperkuat peran strategis dan ekonomi penting AS di Asia, serta keberhasilan negara-negara industri Asia Timur sebagai mitra dagang AS Asia-Pasifik mencapai tingkat relevansi dan pelembagaan baru pada akhir 1980-an dengan pembentukan proses Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC). mulai goyah dengan dua faktor yang muncul pada tahun 1990-an. Pertama, kebangkitan India sebagai kekuatan ekonomi dan militer yang substansial dengan kepentingan di luar Asia Selatan. Kedua, meningkatnya hubungan antara kekuatan ekonomi Asia Timur dan kawasan Samudra Hindia terutama terkait dengan permintaan energi dan sumber daya lainnya” (Medcalf, 2018).

Kawasan Indo-Pasifik tidak terbentuk dengan sendirinya. Konsep ini pertama kali dicetuskan oleh Khurana (2007), “Seorang direktur eksekutif

National Maritime Foundation di India dan pernah menjadi Kapten Angkatan Laut India, dalam artikelnya yang berjudul “*Security of Sea Lines: Prospect for India-Jepang.*” (Kuo, 2018). Istilah Indo-Pasifik berasal dari konsep geografis yang dikombinasikan dengan perspektif ekonomi. Dengan adanya peluang geoekonomi yang luar biasa serta tantangan keamanan yang krusial. Dimana tidak hanya untuk Asia tetapi juga untuk seluruh dunia. Kemudian dibangun satu kawasan konstruksi yaitu Indo-Pasifik. Uraian tersebut menjelaskan penyatuan kawasan Samudera Hindia dan Pasifik Barat, termasuk lautan yang berdekatan di Asia Timur dan Asia Tenggara, menjadi satu konstruksi kawasan (Khurana, 2017). Kemudian Indo-Pasifik yang terkait erat digunakan dalam konteks ekspresi geopolitik.

Fondasi penting lainnya dari gagasan Indo-Pasifik adalah semakin menonjolnya India. Bangkitnya kekuatan India di awal abad ke-21 menjadi salah satu pemicu Khurana menciptakan istilah Indo-Pasifik. Pada tahun 1990-an, India mengalami pertumbuhan ekonomi yang mengesankan dan signifikan. Titik awalnya adalah peningkatan kerja sama AS-India di bidang ekonomi perdagangan, keamanan, dan pertahanan (Iriawan, 2018). Hal itu membuat India dan Samudera Hindia tidak lagi dikesampingkan dalam geopolitik Asia. Padahal *Indo* di *Indo-Pasifik* mewakili Samudera Hindia, bukan India. Khurana mengharapkan India memainkan peran utama dalam memastikan lingkungan maritim yang kondusif untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Terkendala saat itu karena konstruksi pandangannya menggunakan frase *Asia-Pasifik*, sehingga tidak memadai dan ambigu dalam hal memasukkan India dalam urusan regional. Alasan lain munculnya istilah Indo-Pasifik adalah meningkatnya ketegangan politik-militer China, yang mengakibatkan hubungan antara India dan Jepang meningkat sejak tahun 2006. (Pangestu, 2021)

Konsep *Indo-Pasifik* belum mendapatkan penerimaan penuh di kalangan analis dan pembuat kebijakan regional karena mereka masih belum yakin untuk merangkul gagasan tersebut sepenuhnya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa konsep Indo-Pasifik muncul sebagai ruang strategis yang signifikan dan teater persaingan geopolitik untuk mendapatkan kekuatan besar (Ayres, 2019; Chen, 2018; Khurana, 2017; Natalegawa, 2013). Pendukung konsep Indo-Pasifik berasumsi bahwa hubungan ekonomi yang berkembang (De P, 2019) dan kebutuhan akan kerja sama dan koordinasi politik dan keamanan yang lebih

besar memerlukan perluasan konsep kawasan. Menurut beberapa orang, Indonesia dan India dianggap penting dalam proses regionalisasi dan merupakan pengadopsi awal gagasan Indo-Pasifik (Khurana, 2017). Salah satu inisiatif Indonesia untuk mengembangkan konsep Indo-Pasifik didasarkan pada serangkaian masalah keamanan dan ekonomi yang didominasi oleh persaingan antara Beijing dan Washington dalam kerangka Asia-Pasifik (Natalegawa, 2013). Keinginan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mencegah dominasi ekonomi dan politik China menjadi pendorong penting konstruksi geopolitik yang coba dimainkan Indonesia di kawasan. Faktor-faktor tersebut memberikan batasan yang signifikan terhadap integrasi kawasan Indo-Pasifik yang coba dipromosikan oleh Indonesia, berbeda dengan pemahaman konsep Indo-Pasifik dalam pemahaman negara-negara besar lainnya seperti Amerika Serikat” (Ayres, 2019). (Saputra, 2020)

4.1.2 Laut China Selatan dan Konflik yang Terjadi

(Mas'udi, 2020)

Setelah keberhasilan program ekonominya yang ambisius berdasarkan pembebasan ekonomi dan internasionalisasi sejak tahun 1978, agenda China selanjutnya adalah modernisasi militer (Henry, 2016). Sejak 2009, media AS telah melaporkan secara agresif perilaku agresif China di seluruh dunia. Kemajuan ekonomi yang diikuti dengan kemajuan militer membuat China semakin agresif. Setidaknya, itulah yang ditangkap atau dilihat oleh negara-negara lain di kawasan Asia-Pasifik, seperti Jepang dan Amerika Serikat. Agresivitas China sangat terlihat ketika negara lain menanggapi klaim China tentang Laut China Selatan yang dikenal dengan *klaim sembilan garis putus-putus*, serta sengketa teritorial lain yang melibatkan Jepang dan Korea Selatan. (Mas'udi, 2020)

Menanggapi respon dari negara lain, China mengirimkan militernya ke daerah konflik alih-alih menggunakan diplomasi. Di bawah klaimnya atas Kepulauan Spratly, China membangun fasilitas militer di sana. Hal itu menyebabkan Amerika Serikat terlibat dalam menanggapi aktivitas ilegal China di wilayah yang disengketakan. Dengan nilai-nilai demokrasinya, Amerika Serikat menganggap apa yang dilakukan China salah. Amerika Serikat menganggap China melanggar hukum internasional di bawah *Freedom of Navigation Operations (FONOPs)*. Amerika Serikat berpendapat bahwa

pembangunan fasilitas militer tersebut dapat menggoyahkan kawasan karena Laut China Selatan termasuk dalam salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia.

Tindakan China tersebut ditanggapi oleh Amerika Serikat dengan *kebijakan rebalancing*, yaitu *Pivot to Asia*. Melalui kebijakan ini, Amerika Serikat berkomitmen untuk tetap terlibat secara ekonomi dan militer di Kawasan Asia-Pasifik. Di bidang ekonomi, Amerika Serikat berupaya untuk tetap terlibat melalui program *Kemitraan Trans-Pasifik* (TPP). Dari perspektif militer, Amerika Serikat mempertahankan kehadiran angkatan lautnya di Kawasan Laut Cina Selatan, memperdalam dan memperkuat hubungan dengan negara-negara sekutu seperti Australia.

Australia adalah salah satu negara terpenting bagi Amerika Serikat karena Australia setuju menjadikan Darwin, salah satu ibu kota negara bagiannya, sebagai pangkalan militer yang berbeda. Dengan demikian, kontribusi Australia terhadap *kebijakan rebalancing AS* sangat jelas. Apalagi selain Darwin, Australia juga memberikan akses ke salah satu kawasan terpentingnya, *Celah Pinus*, di Negara Bagian Utara sebagai salah satu pangkalan militer Amerika Serikat yang bergerak di bidang intelijen. "Pine Gap, di Wilayah Utara Australia, adalah rumah bagi beberapa fasilitas intelijen terpenting AS. Ini adalah pangkalan yang menyediakan sistem peringatan dini untuk serangan rudal balistik dan data intelijen untuk pasukan luar negeri AS (Brown & Bretherton, 2016).

Pada tahun 2016, Mahkamah Internasional memutuskan gugatan yang diajukan oleh Filipina atas klaim China atas *Scarborough Shoal*. Pengadilan internasional memutuskan *Scarborough Shoal* menjadi milik Filipina karena kawasan tersebut masih termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Filipina. China telah melanggar hukum internasional karena klaim ini, dan China melarang Filipina menjelajahi kawasan *Beting Scarborough*. Pengadilan arbitrase internasional memutuskan bahwa China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah tersebut. Namun, Beijing tidak menerima keputusan pengadilan internasional. Mereka yakin 99% wilayah Laut China Selatan adalah milik China. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persaingan militer antara China dan Amerika Serikat di kawasan Laut China Selatan akan terus

berlanjut dan kemungkinan akan meningkat intensitasnya, apalagi China menolak keputusan internasional tersebut. (Mas'udi, 2020)

Upaya meredakan ketegangan antara China dan Filipina terkait isu Laut China Selatan ditujukan untuk mendorong Stabilitas dan Keamanan di Laut China untuk mencegah terjadinya insiden maritim. Kondisi terciptanya kawasan damai di Laut China tidak diikuti dengan sikap China yang diam-diam melakukan pembangunan dan reklamasi pulau, membangun pangkalan militer di wilayah sengketa. Klaim sepihak China atas perairan Natuna bahwa perairan Natuna yang diklaim China sebagai daerah *penangkapan ikan tradisional China* sejak nenek moyang bangsa China juga menimbulkan masalah dalam hubungan dengan Indonesia terkait Kepulauan Natuna. Bahkan China telah membangun reaktor nuklir terapung untuk menyuplai kebutuhan China di Laut China Selatan. Sekitar 20 reaktor nuklir terapung telah dibangun, terutama di kepulauan Spratly dan Paracel. (Sutrisno & Meirinaldi, 2020)

Adanya reklamasi dan *reaktor nuklir bergerak* dianggap sebagai langkah China untuk menegaskan bahwa perairan Laut China Selatan adalah milik China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina. Indonesia sedang mengalami masalah hubungan dengan China terkait perairan di Kepulauan Natuna, terkait klaim sepihak China bahwa perairan Natuna di Laut China Selatan merupakan daerah *penangkapan ikan tradisional China*. Rute strategis ini dilalui oleh kapal-kapal pengangkut barang dagangan senilai lebih dari US\$5. Triliun dalam setahun. ASEAN menghadapi sengketa teritorial dengan China di Laut China Selatan. Karena letaknya yang strategis dari segi geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi. (Sutrisno & Meirinaldi, 2020)

Kekhawatiran negara-negara di kawasan Indo-Pasifik terhadap China bermula dari tindakan agresif negara tersebut di beberapa kawasan, terutama di perairan Laut China Selatan (LCS). Tercatat China tidak segan-segan mengkonfrontasi negara lain (seperti Filipina) dan melakukan beberapa pelanggaran perbatasan di wilayah tersebut (misalnya pelanggaran perbatasan di Indonesia). (Delanova, 2021) Persaingan China-Amerika di Laut China Selatan (Sutrisno & Meirinaldi, 2022)

Laut China Selatan telah menciptakan tarik-menarik antara dua kekuatan ekonomi dan militer dunia antara China dan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Persaingan pengaruh/hegemoni dan superioritas militer di kawasan

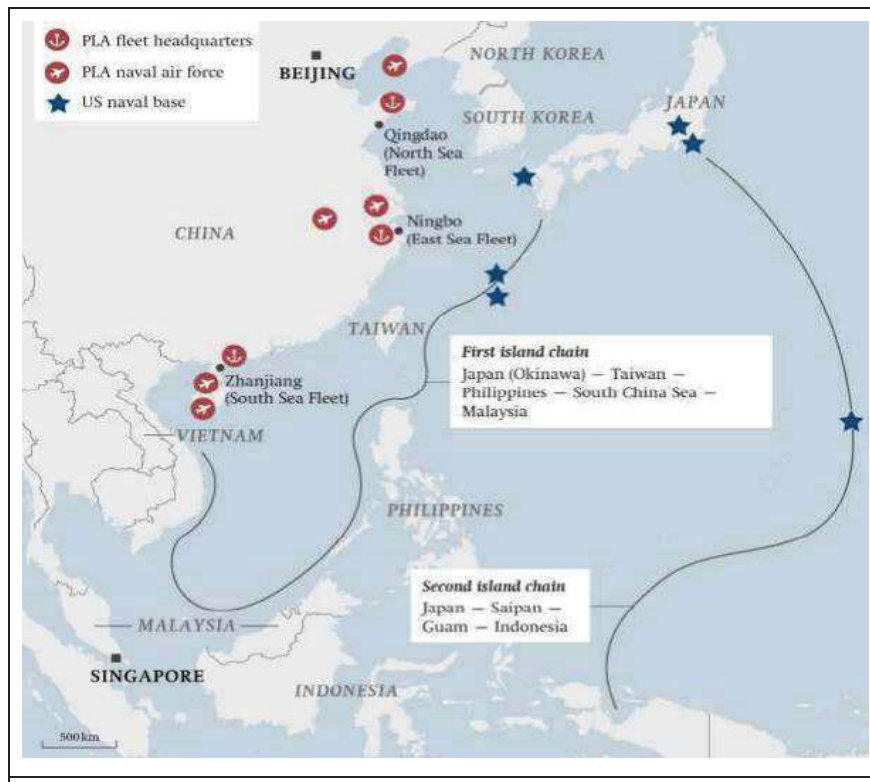
Asia Pasifik antara Amerika Serikat dan China telah meningkatkan ketegangan di Asia Pasifik. Pembuatan pangkalan militer China di Laut China Timur di pulau-pulau yang disengketakan dengan Jepang dengan membuat atau mengklaim wilayah udara atau (*Zona Identifikasi Pertahanan Lintas Udara /ADIZ*) secara sepihak China. Kehadiran kekuatan militer di Laut China Selatan telah meningkatkan ketegangan di kawasan Asia dengan negara-negara yang bersengketa dengan China.

Di sisi lain, Amerika Serikat melakukan pengawasan militer di kawasan Asia Pasifik yang semakin ditingkatkan. Ini memastikan kehadiran dan kekuatan/kontrol politik di kawasan Asia Pasifik. Isu geopolitik lainnya adalah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea antara Korea Utara dan Korea Selatan yang dibantu oleh Amerika Serikat. Uji coba/peluncuran *rudal balistik* antar pulau yang dilakukan oleh Korea Utara, di mana klaim Korea Utara bahwa rudal berujung nuklir dapat mencapai kota-kota di Amerika Serikat telah meningkatkan ketegangan di semenanjung Korea. Antara lain dengan memperbanyak latihan perang antara Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk menghadapi sikap agresif Korea Utara.

Menanggapi/menanggapi Korea Utara yang terus melakukan uji coba rudal nuklirnya, Amerika Serikat telah mengirimkan senjata pencegat anti-rudal ke Korea Selatan. Perangkat pertahanan anti-rudal Amerika Serikat, *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD), diimplementasikan di Korea Selatan pada April 2017. Amerika Serikat menempatkan THAAD di Korea Selatan untuk mencegah jatuhnya korban dan kerusakan lain jika Korea Utara meluncurkan rudal menyerang dengan tip. Ledakan nuklir di Korea Selatan dan Amerika Serikat (pulau Hawaii). Selain itu juga untuk melindungi 24.000 tentara Amerika Serikat di Korea Selatan.

Karena kebijakan Amerika Serikat menempatkan rudal untuk pencegat rudal nuklir Korea Utara, China memprotes dan mengajukan keberatan atas pengiriman senjata THAAD Amerika Serikat ke Korea Selatan. Karena China menganggap radar THAAD sangat kuat mengancam keamanan wilayah China, di mana misil antimisil Amerika Serikat bisa mencapai wilayah China. Di sisi lain, Korea Utara juga menganggap keberadaan THAAD dan kapal perang Amerika mengancam Korea Utara.

Jepang dan Inggris adalah sekutu terdekat Amerika Serikat dengan kepentingan bersama dalam "menahan pengaruh" China di Laut China Selatan. Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang khawatir bahwa China dapat menguasai rute perdagangan yang menghubungkan Asia dengan Eropa dan Amerika Serikat. Sengketa China dengan Jepang atas pulau Shinkoku, serta China dengan Vietnam, Taiwan, Malaysia, dan Filipina atas pulau Spratly dan Paracel di Laut China Selatan, telah menambah ketegangan geopolitik di Kawasan Asia Pasifik. (Republika, 2018)





Gambar 8. Lokasi dan rantai militer China dan AS

Pangkalan di Kawasan Indo-Pasifik (Red Square, 2021)

Pada 2 Oktober 2018, China mengungkapkan kemarahannya kepada Amerika Serikat setelah kapal perusak/freegard Angkatan Laut AS USS Decatur berlayar di dekat pulau-pulau yang diklaim oleh China di Laut China Selatan. China dengan tegas menentang operasi kapal perusak AS, yang dianggapnya sebagai "ancaman" terhadap kedaulatan China. Seorang pejabat AS mengatakan kapal perusak AS USS Decatur berlayar sejauh 12 mil laut dari Pulau Gaven dan Johnson Reefs di Spratly pada 30 September 2018. Kementerian Pertahanan China mengatakan sebuah kapal Angkatan Laut China dikirim untuk memperingatkan kapal AS agar meninggalkan perairan. Kementerian Pertahanan China mengatakan China memiliki kedaulatan yang tak terbantahkan atas pulau-pulau di Laut China Selatan dan sekitarnya. Pihak berwenang China marah kepada Amerika Serikat karena sanksi AS terhadap militer China yang disebabkan oleh China membeli peralatan militer dari Rusia dan ketegangan antara China dan Amerika Serikat karena dukungan AS untuk Taiwan. (Republika, 2018a)

China bangkit dan kuat, sehingga mengancam kepentingan Amerika Serikat. Angkatan Laut China memasuki Samudra Pasifik untuk bersaing dengan Angkatan Laut AS. Angkatan Laut China membangun kapal induk dan

kapal perusak peluru kendali 055D, kapal selam serang nuklir SSN 095, dan kapal selam nuklir strategis 096-SSBN. Dengan demikian, mengejar efektivitas tempur Angkatan Laut AS dan mengancam Armada Pasifik Ketujuh Angkatan Laut AS. Amerika Serikat mengumumkan kembali ke kebijakan Asia-Pasifik, yang tugas pertamanya adalah menahan China dan menghambat pembangunan China di kawasan Pasifik. Kelompok penyerang kapal induk AS dikirim setiap bulan untuk berlayar bebas di Laut Cina Selatan. (Red Square, 2021)

Klaim China atas wilayah Laut China Selatan ditentang oleh AS dan negara-negara Asia Tenggara, seperti Vietnam, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Namun, China dan ASEAN menyepakati draft yang akan *menjadi dasar Code of Conduct* atau pedoman perilaku di Laut China Selatan. Dengan adanya *Code of Conduct*, ASEAN dan China berharap sengketa klaim di Laut China Selatan dapat diselesaikan secara aktif terhadap kedua negara yaitu China dan Amerika Serikat. (Sutrisno & Meirinaldi, 2020)



Gambar 9. Kapal Selam Serangan Nuklir SSN 095 China (Red Square, 2021)

4.1.3 Pakta Triatral AUKUS

Pembentukan Pakta Triatral AUKUS

China menantang tatanan geopolitik yang berlaku karena Angkatan Lautnya saat ini adalah yang terbesar di dunia (Bahtić, 2021). Memiliki dua kapal induk dan satu kapal induk nuklir tambahan yang sedang dibangun

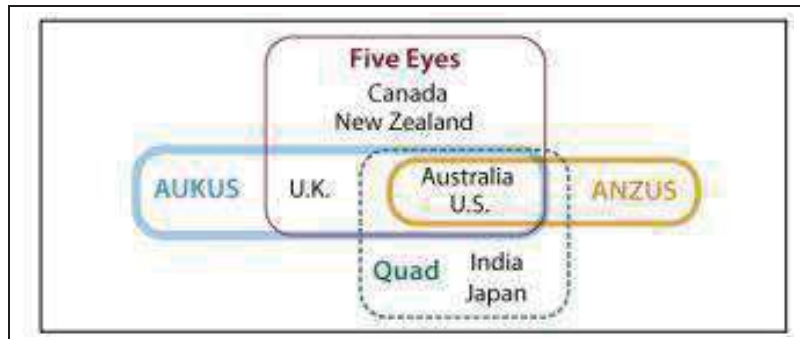
menjadikan Angkatan Laut Tiongkok sebagai Angkatan Laut terbesar secara numerik di dunia, dengan kekuatan tempur keseluruhan sekitar 355 kapal dan kapal selam, termasuk sekitar lebih dari 145 kombatan permukaan utama (Bahtić, 2021) sebagai momok yang sangat menakutkan bagi Australia. China juga sudah memiliki lebih banyak kemampuan serangan jarak jauh non-nuklir dengan jangkauan yang bisa menghantam Australia (Shugart, 2021), sehingga penguatan langkah-langkah pertahanan merupakan urgensi yang harus segera diatasi. Membangun jaringan pangkalan militer baru di Laut China Selatan telah memperkuat niat Australia untuk memilih opsi penyeimbangan dengan pengadaan kapal selam. Hal itu dinilai efektif karena China relatif rentan terhadap ancaman dari bawah laut. Australia yakin investasi dalam pembangunan kapal selam bertenaga nuklir canggih akan menyamai kekuatan China. (Delanova, 2021)

Hal itu kemudian mendorong Australia untuk mempersiapkan kekuatan yang lebih baik untuk menghadapi agresivitas ini dan memastikan bahwa kedaulatan negara lain dapat dilindungi dari visi predator China. Melalui *peta garis sembilan putus*, yang didukung oleh kemampuan mereka menggunakan paksaan ekonomi dan penggunaan militer untuk mencapai tujuan diplomasi mereka (Goodman, 2017). Langkah Australia ditujukan untuk meredam pengaruh dan kekuatan militer China yang tumbuh dan sebagai pembalasan atas intimidasi agresif terhadap Australia, Jepang, dan Taiwan (McGuirk, 2021).

Pakta pertahanan trilateral AUKUS (Australia, United Kingdom, United States) ditandatangani pada 15 September 2021, pada dasarnya dimaksudkan untuk menyeimbangkan kekuatan militer China dengan AS untuk menciptakan Stabilitas, keamanan, dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik. Namun, pakta tersebut dapat menimbulkan potensi eskalasi konflik di kawasan Indo-Pasifik. Karena komitmen Australia, Inggris, dan AS untuk menjaga Stabilitas, keamanan, dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik dengan menggunakan instrumen pengembangan teknologi persenjataan. Konsep ini merupakan konsep kuno yang umum digunakan pada era perang dingin melalui *perlombaan senjata yang biasa dilakukan oleh AS, Uni Soviet, dan negara-negara proksinya*. (Putro, 2021)

AUKUS bisa dikatakan sebagai kelanjutan dari strategi Amerika untuk melawan perkembangan pengaruh China di kawasan Indo-Pasifik yang semakin

masif akibat beberapa kebijakan negara Asia tersebut. Seperti *Nine Dash Line*, *One China Policy*, dan *Belt and Road Initiative* (BRI), hingga pembangunan ekonomi dan sosial, kepentingan militer setiap tahun. Sebelumnya, Amerika juga telah memperkuat kerja sama *Quadrilateral Security Dialogue* (QUAD) dengan anggota AS, India, Jepang, dan Australia, hingga *Five Eyes* dengan anggota AS, Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru, sebagai upaya untuk menangkal perkembangan China.



Gambar 10. Kelompok Pertahanan, Intelijen, dan Keamanan (CRS, 2022)

Dalam kerangka kerjasama AUKUS, terlihat bahwa Australia akan menjadi basis kekuatan pendukung utama jika terjadi perang antara Amerika dan China di Pasifik. Situasi ini tentu saja menambah daftar panjang perlombaan senjata dan masalah stabilitas kawasan. Kerja sama AUKUS mencakup beberapa bidang, antara lain intelijen, teknologi kuantum, dan pembelian rudal jelajah. Namun, kapal selam bertenaga nuklir menjadi masalah yang sangat memprihatinkan di seluruh dunia. (Santoso, 2021)

Tindak lanjut pakta pertahanan trilateral AUKUS dalam pembangunan delapan kapal selam bertenaga nuklir di Australia akan menambah dampak negatif terhadap stabilitas keamanan ASEAN yang sebelumnya menjadi wilayah sengketa dengan China. Pengembangan kapal selam bertenaga nuklir melalui pakta pertahanan trilateral AUKUS mendapat banyak kritik dan perhatian dari banyak negara. Pada intinya menyatakan bahwa pakta pertahanan trilateral AUKUS merupakan provokasi yang dapat merusak stabilitas keamanan kawasan Indo-Pasifik, membawa sentimen era perang dingin, mengintensifkan perlombaan senjata, dan menjadikan kawasan Indo-Pasifik sebagai zona nuklir. Kapal selam tersebut berpotensi melintasi perairan ASEAN, yang akan melanggar perjanjian *Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara* (SEANWFZ)

yang disepakati negara-negara ASEAN pada 15 Desember 1995. Perjanjian ini merupakan komitmen untuk melestarikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan nuklir. -area bebas dan senjata pemusnah massal lainnya untuk mencapai perdamaian dan keamanan internasional. (Putro, 2021)

Amerika menyatakan Australia, Inggris, dan AS tidak akan melanggar *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT) yang ditandatangani ketiga negara pada 1 Juli 1968. Perlombaan senjata, terlihat dari kesepakatan pakta pertahanan trilateral AUKUS, dikhawatirkan akan meningkatkan ketegangan antara AUKUS dengan China. Hal ini dikhawatirkan dapat memicu perang nuklir, dan dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi keamanan kawasan Indo-Pasifik bahkan bagi perdamaian dunia. Adapun NPT, disepakati bahwa negara-negara yang menandatangani NPT berkomitmen untuk membatasi kepemilikan senjata nuklir melalui perlucutan senjata nuklir, non-proliferasi nuklir, dan penggunaan bahan nuklir untuk tujuan damai. (Putro, 2021)

Dampak AUKUS di Indo-Pasifik (Delanova, 2021)

Hubungan internasional regional dianggap sesuatu yang lebih rumit. Negara-negara mulai menyadari pentingnya peningkatan keamanan, yang kini menjadi kenyataan di Indo-Pasifik. Keamanan saat ini juga terkait dengan bidang lain selain militer, seperti ekonomi dan lingkungan. Oleh karena itu, negara-negara di seluruh dunia menyadari pentingnya perlindungan finansial untuk mencegah kemungkinan kolaps (Farrell, Hettne, & Langenhove, 2005).

Indo-Pasifik menyumbang dua pertiga dari *pertumbuhan Produk Domestik Bruto* (PDB) karena Indo-Pasifik menyumbang setidaknya 60 persen dari PDB global (The Department of Defense USA). Fakta bahwa Indo-Pasifik telah muncul sebagai pusat gravitasi ekonomi dan geopolitik dunia, serta menjadikan kawasan ini sebagai pusat persaingan antara AS dan China, membuat kondisi keamanan kawasan ini menjadi sangat penting. Indo-Pasifik juga diharuskan waspada terhadap ancaman nuklir dan konvensional yang ditimbulkan oleh Korea Utara sebagai sumber lain pecahnya perang kekuatan besar. Karena kemampuan rudal jarak jauh dan program nuklir Korea Utara serta ketidakstabilan Semenanjung Korea akan memiliki dampak strategis, ekonomi, dan kemanusiaan yang parah. (Delanova, 2021)

Negara-negara di kawasan Indo-Pasifik sadar bahwa melawan China adalah keputusan yang merugikan ekonomi mereka. Kondisi ini membuat

distribusi *kekuasaan* di daerah tidak seimbang. Dari pemahaman tersebut, dapat dikatakan bahwa AUKUS merupakan cara untuk memastikan *distribusi kekuatan* di Indo-Pasifik, tidak hanya berfokus pada proyeksi kekuatan militer China. Dengan melengkapi Australia dengan kapal selam serang bertenaga nuklir, Australia menjadi saingan China. Namun, dengan dimensi ekonomi yang sesuai, sekutu AUKUS dapat terhindar dari saling merugikan karena mereka mengejar kepentingan ekonominya secara sepihak. (Delanova, 2021)

Konsekuensi dari bilateralisme ekonomi AS akan berdampak lebih langsung pada sekutunya, di dalam AUKUS, dan di luarnya. Cina berkembang pesat dari kekuatan militer lokal menjadi kekuatan global yang meningkat. Tentara China (PLA) berada di jalur untuk mendapatkan kemampuan yang mengancam akses negara lain ke pasar internasional dan sumber daya energi—dan mendapatkan kekuatan koersif langsung atas kesejahteraan ekonomi beberapa mitra dagang mereka. Lembaga penelitian CNAS menyatakan, "Untuk Indo-Pasifik, aliansi dan kemitraan AS tetap menjadi landasan kemakmuran dan keamanan kawasan. Sinyal permintaan untuk keterlibatan regional AS secara diplomatis tumbuh di tengah meningkatnya ketegangan dan pergeseran kekuasaan." (CNAS, 2021).

Kecemasan kolektif terhadap pengaruh China tidak dapat dihindari mengingat selain menempatkan kepemilikan atas Laut China Selatan, China juga menunjukkan bahwa Samudra Hindia bagi mereka juga merupakan bagian dari ambisinya untuk meningkatkan jaringan fasilitas militer dan komersialnya di sepanjang jalur komunikasi maritim (SLOC) yang membentang dari daratan China hingga Pelabuhan Sudan di Tanduk Afrika. Alur laut China melewati berbagai *chokepoint maritim*, seperti Selat Mandeb, Selat Malaka, Hormuz, dan Selat Lombok. Serta pusat-pusat maritim strategis lainnya di Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Maladewa, dan Somalia, negara-negara pesisir Samudera Hindia. Hal ini membuat banyak negara yang memiliki kedaulatan yang sah atas wilayah tersebut khawatir akan penggunaan kekerasan dan pemaksaan ekonomi dari China (Santhosh & Mulia, 2020). Sehingga bangkitnya banyak kekuatan laut di kawasan diharapkan terus dilakukan oleh negara-negara lain di kawasan yang sedang mengalami peningkatan di bidang ekonomi, politik, militer, senjata konvensional, dan senjata modern, dll. (Delanova, 2021)

Belt and Road, yang dianggap mempercepat globalisasi, memberikan dorongan untuk meningkatkan partisipasi regional di antara negara-negara Indo-Pasifik. Tercatat bahwa tatanan kawasan baru di bawah inisiatif China membuatnya mampu memblokir pengaruh negara-negara lain di kawasan tersebut. Sehingga hal ini menimbulkan ambiguitas dalam konsep dan cara negara-negara kawasan mengejar orientasi kebijakan luar negerinya. Sebagian besar pemain di kawasan strategis ini memiliki berbagai kekhawatiran tentang kawasan yang menjanjikan untuk abad maritim baru di mana semua mantan raksasa Asia akan bangkit kembali. Perdamaian akan berkembang melalui keseimbangan perdagangan dan praktik pembangunan yang lebih baik yang didominasi oleh perkembangan dari China sebagai negara yang mengajukan inisiatif, tidak ada jaminan bahwa China akan menunda ambisi globalnya demi memperluas peran regionalnya. Sekali lagi, realisme berkorelasi dengan fenomena Cina di mana *kekuasaan* digunakan sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai, meskipun dengan berbagai konsekuensi yang menyertainya. (Delanova, 2022)

Negara-negara Indo-Pasifik juga perlu menyadari memburuknya hubungan Australia-China dan meningkatnya aktivitas militer China di Laut China Selatan dan Selat Taiwan. Realitas keamanan kawasan semakin parah dan membutuhkan tindakan nyata melalui pertimbangan material, baik ekonomi maupun militer. Di sisi lain, AUKUS juga merupakan perwujudan dari pendekatan multilateral AS untuk mempertahankan keunggulan regionalnya dan menggagalkan ambisi China untuk menjadi negara terkuat (Phua, 2021), yang mengesampingkan kepentingan bersama di kawasan. Perubahan rencana dan strategi Australia merupakan langkah logis mengingat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dianggap telah menjauhkan negara dari perang dan menghindari konflik untuk mendorong perdamaian dunia, telah menjadi janji palsu (Mearsheimer, 2001) yang dalam perkembangannya belum mampu menghentikan agresivitas China. (Delanova, 2022)

Kecenderungan AS untuk tetap berpegang pada strategi *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) sebagai landasan kebijakan mereka adalah sebuah jaminan. Mereka menempuh *alih teknologi* melalui AUKUS memang dimaksudkan sebagai langkah penyeimbang yang baik dan revitalisasi gagasan tatanan berbasis aturan internasional di Indonesia. Kawasan Indo-Pasifik.

Namun, lihatlah sulitnya mencapai posisi bersatu dalam situasi tertentu, seperti isu Uyghur di Myanmar. Dalam hal itu menggambarkan bahwa kawasan ini masih berada dalam siklus demokrasi yang rapuh dan menjadi penghambat utama agenda AS di kawasan (Phua, 2021).

Kondisi ini menunjukkan bahwa pandangan realisme yang menyatakan, “Sikap negara sebagian besar akan terbentuk dari struktur material yang ada” (Mearsheimer, 2007), merupakan pandangan yang dapat dipahami secara jelas dalam fenomena keamanan Indo-Pasifik. Selain itu, kaum realis berpendapat bahwa kerja sama antar negara seperti isapan jempol karena masing-masing negara sibuk memenuhi kekuasaan di dalam negeri (Jackson & Sorensen, 2013; Tawakal, 2022). Kondisi material negara-negara Indo-Pasifik yang jauh tertinggal dari penguasaan material ekonomi dan militer China, membuat banyak negara yang ada mengharapkan peran yang lebih besar dari AS yang dianggap memiliki kemampuan untuk menjamin keamanan dengan menghentikan China. Terbentuknya AUKUS dapat dilihat sebagai perwujudan lembaga internasional. Itu dibuat sebagai tanggapan terhadap kepentingan nasional banyak negara di kawasan ini. (Delanova, 2021)

4.2 Pengaruh Perdagangan Internasional ke Indonesia

Indonesia terdiri dari sekitar 30% daratan dan 70% lautan, dengan pulau-pulau besar Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, pulau-pulau kecil seperti Bali, Lombok, Timor, dan pulau-pulau kecil lainnya (Sutrisno dan Meirinaldi, 2020). Indonesia sebagai negara kepulauan, menurut ketentuan *United Nations Convention on the Law of The Sea* (UNCLOS, 1982), telah menyediakan tiga jalur laut, yaitu: Melalui Samudera Hindia - Selat Sunda - Laut Cina Selatan; Melalui Selat Makassar - Selat Lombok; dan Samudera Hindia - Laut Banda - Laut Maluku - Samudera Pasifik.

Perairan Indonesia menghubungkan Asia Timur, Samudera Pasifik, Samudera Hindia, Afrika, dan Eropa. Posisi Indonesia juga merupakan titik persilangan antara Samudera Pasifik, Samudera Hindia, benua Asia, dan Australia. Bahkan di kawasan ASEAN, dua pertiga wilayahnya merupakan perairan Indonesia (Yanti & Aviolita, 2020). Karena kepentingan ekonomi Barat dan Timur melewati perairan teritorial Indonesia, sudah sepatutnya Indonesia

menjadi pemain utama di kawasan inti lalu lintas maritim dunia. (Perdana dkk, 2021)

Jumlah penduduk pada akhir tahun 2019 tercatat sebanyak 267 juta jiwa, dengan pendapatan per kapita sebesar USD 4.050, - pertumbuhan ekonomi 5,03%, penduduk miskin 24,78 juta jiwa, pengangguran mencapai 7,00 juta jiwa, Produk Domestik Bruto (PDB) Rp . 15,583 Triliun. Barang ekspor didominasi oleh barang/komoditas primer seperti Crude Palm Oil (CPO), karet, kakao, kopi, batubara, dan hasil tambang lainnya, dengan nilai perdagangan ekspor impor sebesar USD 293,061 miliar (Sutrisno dan Meirinaldi , 2020). Neraca perdagangan Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Angka Neraca Perdagangan & Nilai Investasi Asing Langsung Indonesia

	2015	2016	2017	2018	2019
Neraca Perdagangan (Miliar USD)	293.06	280.84	325.81	368,72	338.25
Investasi Langsung (Triliun Rupiah)	545.5	612.8	692.8	721.3	809.6

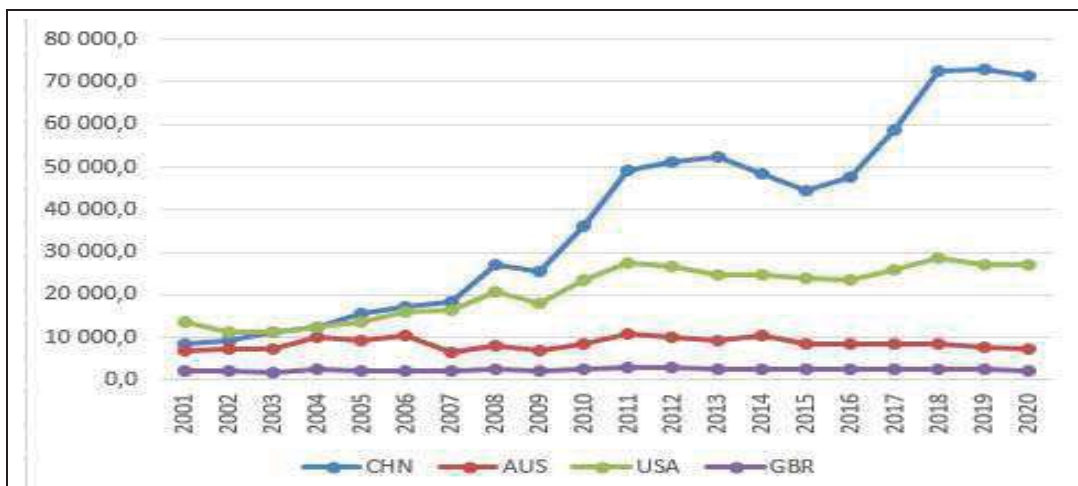
Sumber : Sutrisno dan Meirinaldi (2020)

Terkait pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II tahun 2020 mengalami kontraksi - sebesar 5,32%, dan untuk pemulihan ekonomi akibat Covid 19, Indonesia telah mengeluarkan dana sebesar Rp . 695,2 triliun, terdiri dari Rp . 695,2 triliun untuk pemulihan kesehatan. 87,5 triliun, Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp807,7 triliun, dan penyaluran dana hibah modal kerja pelaku usaha Ultra Mikro dan Mikro sebanyak 12 juta orang/pelaku usaha yang masing-masing mendapatkan hibah sebesar Rp2,4 juta. Juga subsidi gaji bagi pegawai yang gajinya di bawah Rp 5 juta per bulan, dengan subsidi per orang Rp 600.000 per bulan selama empat bulan untuk 13,7 juta pegawai. Stimulus ekonomi bertujuan untuk mendorong permintaan/konsumsi masyarakat, mengingat konsumsi masyarakat mengalami penurunan sekitar 5,3%. (Sutrisno dan Meirinaldi, 2020)

Kajian ini akan menguji apakah perang dagang antara AS dan China mendorong terbentuknya Pakta Trilateral AUKUS di Indo-Pasifik yang dapat mempengaruhi arus perdagangan internasional antar negara anggota AUKUS (Australia, Inggris, dan Amerika Serikat) ke Indonesia. "Perang dagang antara Amerika dan China telah berlangsung sejak 2018 di bawah kepemimpinan

Presiden AS Donald Trump. Perang dagang dimulai karena Trump tidak senang dengan neraca perdagangan negaranya yang selalu mencatat defisit dengan China. Karena itulah, ia memilih proteksionisme untuk memperbaiki neraca perdagangan AS. Trump memutuskan untuk menaikkan bea masuk panel surya dan mesin cuci masing-masing menjadi 30 persen dan 20 persen. Sejak itu, tepatnya 22 Januari 2018, perang dagang dimulai” (CNN, 2020) .

Berikut perkembangan total arus perdagangan internasional dari negara-negara anggota AUKUS (Australia, Inggris, dan Amerika Serikat) dan China, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pada gambar ini terlihat bahwa total nilai arus perdagangan ke Indonesia dari AS dan China (periode 2000-2020) memiliki tren yang meningkat, namun China memiliki peningkatan yang sangat besar dibandingkan dengan AS. Sementara itu, Australia dan Inggris cenderung memiliki tren yang mendatar, bahkan Australia terlihat sedikit menurun dalam hal total arus perdagangan ke Indonesia.



Gambar 11. Total Nilai Perdagangan Negara Utama ke Indonesia (dalam juta US\$) Tahun 2001-2020

Sumber: Data diolah dari

<https://www.bps.go.id/indicator/8/336/3/neraca-perdagangan-several-negara.html>

Berikut adalah hasil regresi dari data penelitian dari model utama dengan menggunakan regresi data panel, yang memberikan hasil sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Regresi Data Panel

Dependent Variable: TRADE? Method: Pooled Least Squares Date: 11/20/22 Time: 16:52 Sample: 2000 2020 Included observations: 21 Cross-sections included: 3 Total pool (balanced) observations: 63				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.901030	4.439446	1.329227	0.1894
POWERC?	-0.080642	0.017877	-4.510973	0.0000
POWER?	-0.161670	0.018017	-8.973309	0.0000
GDPC?	0.105430	0.424619	0.248293	0.8048
TRADEC?	0.433684	0.078963	5.492281	0.0000
MILITARY?	0.022283	0.039381	0.565814	0.5739
DUMMY?	-0.031542	0.047653	-0.661915	0.5108
Fixed Effects (Cross)				
_AUS--C	-1.351404			
_USA--C	3.434608			
_GBR--C	-2.083204			

Sumber: Hasil keluaran komputer dari pengolahan data menggunakan *EViews*

Pengujian dilakukan dengan menggunakan regresi berdasarkan bentuk umum data panel dengan *efek tetap* dan menghindari terjadinya matriks singular yang dapat menyebabkan tidak dihasilkannya regresi. Nilai *R square* atau koefisien determinasi dari hasil pengolahan data panel adalah 0,989083 atau 98,91%, artinya terdapat kecocokan model sebesar 98,91%, dimana variabel independen dapat menjelaskan perubahan variabel dependen sebesar 98,91%. Variabel menjelaskan sisanya - Variabel lain tidak termasuk dalam model. Sementara itu, *Adjusted R-squared* adalah 0.987465. Fhitung diperoleh 611,5257 dengan probabilitas 0,00000 (di bawah taraf signifikansi 1%), artinya signifikan menolak H_0 . Artinya adalah bahwa ada hubungan linier antara variabel independen dan dependen.

Uji t-statistik dan probabilitas digunakan untuk menguji apakah koefisien regresi parsial berbeda secara individual terkait dengan variabel dependen. Dari uji t-statistik terlihat bahwa variabel independen dalam model berpengaruh signifikan terhadap variabel independen (total aliran perdagangan internasional dari masing-masing negara anggota AUKUS ke Indonesia). Berdasarkan hasil output *EViews*, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Regresi Data Panel (Panel1)

Hipotesa	Variabel	Koefisien	Probability	Signifikansi	Hasil
Konstan	C	5.901030	0,1894	10%	Tidak menolak Ho
$H_{0\ 1A}$	POWER	-0,161670	0,0000	1%	Menolak Ho
$H_{0\ 2A}$	POWERC	-0,080642	0,0000	1%	Menolak Ho
$H_{0\ 3A}$	GDPC	0,105430	0,8048	10%	Tidak menolak Ho
$H_{0\ 4A}$	MILITARY	0,022283	0,5739	10%	Tidak menolak Ho
$H_{0\ 5A}$	TRADE	0,433684	0,0000	1%	Menolak Ho
$H_{0\ 6A}$	DUMMY	-0,031542	0,5108	10%	Tidak menolak Ho

Sumber: Hasil keluaran komputer dari pengolahan data menggunakan *EViews*

Dengan demikian variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (total aliran perdagangan internasional dari masing-masing negara anggota AUKUS ke Indonesia) adalah:

- (1) *National power* masing-masing negara anggota AUKUS (*POWER*), dengan koefisien tanda negatif
- (2) *National power* dari China (*POWERC*), dengan koefisien tanda negatif
- (3) Total arus perdagangan internasional (ekspor+impor) dari China ke Indonesia (*TRADEC*) dengan koefisien positif.

Variabel yang tidak mempengaruhi total arus perdagangan internasional dari masing-masing negara anggota AUKUS ke Indonesia adalah Per Capita Growth Domestic Product (GDP) masing-masing negara anggota AUKUS (*GDPC*). Juga selisih anggaran militer terhadap GDP (*MILITARY*) China dengan masing-masing negara anggota AUKUS (Australia, Inggris, dan Amerika Serikat), serta terjadinya konflik perang dagang antara Amerika dengan China dan situasi di Indo Pasifik (*DUMMY*).

Secara umum dari hasil regresi dapat dikatakan bahwa:

- Konflik perang dagang tidak mempengaruhi arus perdagangan internasional ke Indonesia dari negara-negara yang terlibat konflik perang dagang dan situasi di Indo-Pasifik.
- Perbedaan anggaran pertahanan masing-masing negara anggota AUKUS dan China tidak mempengaruhi arus perdagangan internasional ke Indonesia dari negara-negara yang terlibat konflik. Padahal, menurut Gambar 4-7, pengeluaran militer China telah meningkat secara signifikan, yang diimbangi oleh Amerika (perlombaan militer), yang telah didorong oleh Amerika Serikat untuk ditingkatkan lagi mulai tahun 2017.

- Perubahan Pertumbuhan Produk Domestik (PDB) per kapita masing-masing negara anggota AUKUS tidak mempengaruhi arus Perdagangan internasional ke Indonesia dari masing-masing negara anggota AUKUS (Australia, Inggris, dan Amerika Serikat).
- Kekuatan Nasional China ternyata berpengaruh negatif terhadap arus perdagangan internasional ke Indonesia dari masing-masing negara anggota AUKUS (Australia, Inggris, dan Amerika Serikat). Artinya ketika terjadi peningkatan kekuatan nasional dari China, maka berdampak pada penurunan arus perdagangan internasional ke Indonesia dari masing-masing negara anggota AUKUS.
- Kekuatan Nasional dari masing-masing negara anggota AUKUS ternyata berpengaruh negatif terhadap arus perdagangan internasional ke Indonesia dari masing-masing negara anggota AUKUS. Hal tersebut menunjukkan bahwa memang terdapat rivalitas antara negara anggota AUKUS (Australia, Inggris, dan Amerika Serikat) dengan China. Menuju peningkatan kekuatan nasional China yang menyebabkan penurunan kekuatan nasional negara-negara anggota AUKUS, meskipun arus perdagangan internasional ke Indonesia dari masing-masing negara tetap konstan meningkat.

Regresi dilanjutkan dengan berbagai pola variabel. Karena variabel GDP perkapita tidak berpengaruh, maka variabel tersebut dikeluarkan dalam model selanjutnya. Berikut tabel hasil dari regresi data panel dengan menggunakan beberapa kemungkinan variabel.

1. Untuk variabel dependen adalah aliran total perdagangan internasional dari masing-masing negara anggota AUKUS (Amerika, Australia dan Inggris) ke Indonesia dengan beberapa variasi model. Dapat dilihat hasilnya dari tabel di bawah ini.

Tabel 9. Hasil Output Komputer Regresi Data Panel dengan Berbagai Variasi Model (Panel 2 - Panel 8)

	Panel 2	Panel 3	Panel 4	Panel 5	Panel 6	Panel 7	Panel 8
C	7.1186**	6.9314**	7.0497**	10.3536**	10.4215**	10.4387**	10.8127**
TradeC	0.4197**	0.4494**	0.4316**				
PowerA	- 0.1617**	- 0.1633**	- 0.1626**	- 0.1603**	- 0.1631**	- 0.1630**	- 0.1891**
PowerC	- 0.0763**	- 0.0845**	- 0.0807**	0.0165**	0.0103*	0.0179**	
Military	no security dilemma	0.0197	no security dilemma	- 0.0781*	0.0932**	no security dilemma	- 0.0903*
Dummy	-0.0279	no conflict	no conflict	0.0904*	no conflict	- 0.1129**	-0.0173
R²	0.9890	0.9889	0.9889	0.9824	0.9816	0.9814	0.9807
<i>Adj.R²</i>	0.9878	0.9878	0.9879	0.9805	0.9800	0.9798	0.9790

<i>Prob (F)</i>	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Keterangan: Dependent variable: TradeA = aliran total perdagangan internasional dari masing-masing negara anggota AUKUS (Amerika, Australia dan Inggris) ke Indonesia TradeA = Aliran perdagangan (total ekspor dan impor) dari masing-masing negara AUKUS (Amerika, Australia, Inggris) ke Indonesia, PowerA = <i>National power</i> dari masing-masing negara AUKUS (Amerika, Australia, Inggris) PowerC = <i>National power</i> dari negara China Military = Selisih anggaran militer China per-GDP dengan dari masing-masing negara AUKUS (Amerika, Australia, Inggris) Dummy = Konflik perang dagang antara China dengan Amerika, yang dimulai tahun 2018, (nilai = 0 sebelum tahun 2018, dan nilai = 1 dimulai tahun 2018). Sumber: Hasil keluaran komputer dari pengolahan data menggunakan <i>EViews</i>							

Dari hasil regresi, berdasarkan tabel di atas, ada atau tidak adanya konflik dan perlombaan senjata, *national power* dari masing-masing negara, baik anggota AUKUS (Amerika, Australia dan Inggris) serta China memberikan pengaruh negatif terhadap aliran perdagangan (ekspor dan impor) dari masing-masing negara AUKUS ke Indonesia. Kenaikan *national power* dari masing-masing negara tersebut berpengaruh terhadap aliran perdagangan anggota AUKUS ke Indonesia.

Jika variabel perdagangan internasional China-Indonesia dihilangkan, hanya *national power* yang dimasukkan/dipersaingkan ke dalam model, maka yang terjadi sebaliknya. Kenaikan *national power* dari China berpengaruh positif, dapat mempengaruhi peningkatan aliran perdagangan Cina ke Indonesia. Sementara itu kenaikan *national power* dari masing-masing negara anggota AUKUS dapat menurunkan aliran perdagangan anggota AUKUS ke Indonesia.

Perbedaan anggaran militer yang terjadi, terutama dari China yang berusaha mendekati besaran anggaran militer dari negara Amerika dan masing-masing anggota AUKUS lainnya, dimana penurunan selisih/perbedaan jumlah anggaran militer per-GDP antara kedua pihak, menyebabkan kenaikan aliran perdagangan dari negara AUKUS ke Indonesia, walaupun jika dilihat dari konstantanya pengaruhnya sangat kecil.

Demikian juga konflik yang terjadi, menunjukkan pengaruh yang negatif. Peningkatan eskalasi konflik dapat menurunkan aliran perdagangan dari masing-masing negara anggota AUKUS ke Indonesia.

2. Untuk variabel dependen adalah aliran total perdagangan internasional dari masing-negara China ke Indonesia dengan beberapa variasi model. Dapat dilihat hasilnya dari tabel di bawah ini.

Tabel 10. Hasil Output Komputer Regresi Data Panel dengan Berbagai Variasi Model (Panel 9 - Panel 16)

	Panel 9	Panel 10	Panel 11	Panel 12	Panel 13	Panel 14	Panel 15	Panel 16
C	- 1.2887	-1.5273	-2.2594	- 2.7176*	7.6621**	7.7647**	7.9111**	7.7222**
TradeA	0.8645**	0.8916**	0.9743**	1.0263**				
PowerA	0.1434**	0.1460**	0.1556**	0.1609**	0.0047	0.0006	- 0.0032	
PowerC	0.2059**	0.2017**	0.2071**	0.2003**	0.2202**	0.2109**	0.2246**	0.2193**
Military	- 0.1611**	- 0.1682**	no security dilemma	no security dilemma	- 0.2286**	- 0.2514**	no security dilemma	- 0.228**
Dummy	- 0.0584	no conflict	- 0.0924	no conflict	- 0.1366*	no conflict	- 0.2024**	- 0.1356*
R^2	96,95 %	96,91 %	96,39 %	96,27 %	95,09 %	94,84	93,89	95,08
Adj.R ²	0.9656	0.9658	0.9600	0.9595	0.9456	0.9439	0.9335	0.9465
Prob (F)	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Sumber: Hasil keluaran komputer dari pengolahan data menggunakan *EViews*

Keterangan:

Dependent variable: TradeC = aliran total perdagangan internasional dari China ke Indonesia

TradeA = Aliran perdagangan (total ekspor dan impor) dari masing-masing negara AUKUS (Amerika, Australia, Inggris) ke Indonesia,

PowerA = *National power* dari masing-masing negara AUKUS (Amerika, Australia, Inggris)

PowerC = *National power* dari negara China

Military = Selisih anggaran militer China per-GDP dengan dari masing-masing negara AUKUS (Amerika, Australia, Inggris)

Dummy = Konflik perang dagang antara China dengan Amerika, yang dimulai tahun 2018, (nilai = 0 sebelum tahun 2018, dan nilai = 1 dimulai tahun 2018).

Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa, ada atau tidak adanya konflik perang dagang, perubahan national power dari setiap negara AUKUS dan negara China berpengaruh positif terhadap aliran perdagangan (ekspor dan impor) dari China ke Indonesia. Dimana kenaikan national power dari negara-negara AUKUS dan China justru meningkatkan aliran perdagangan dari China ke Indonesia.

Peningkatan perlombaan anggaran militer, dimana China berusaha mendekati besaran anggaran militer dari negara Amerika dan masing-masing anggota AUKUS lainnya. Dengan adanya penurunan selisih/perbedaan yang semakin kecil antara jumlah anggaran militer per-GDP antara kedua pihak, akan berpengaruh negatif, menyebabkan kenaikan (berpengaruh negatif) aliran perdagangan dari China ke Indonesia. Ini menunjukkan kenaikan volume aliran perdagangan juga dipengaruhi oleh kekuatan militer dari suatu negara, atau dibaliknya ada kekuatan pertahanan yang menyertai/mengawalinya.

Aliran perdagangan (ekspor dan impor) ke Indonesia dari masing-masing negara anggota AUKUS justru berpengaruh positif terhadap aliran perdagangan (ekspor dan impor) dari China ke Indonesia. Kenaikan

perdagangan negara AUKUS berpengaruh terhadap peningkatan perdagangan dari China ke Indonesia, baik ada konflik maupun tidak ada konflik.

Jika dalam regresi hanya dimasukkan variabel national power, dari hasil dapat dikatakan, sepertinya China tidak peduli terhadap nasional power dari negara-negara AUKUS (tidak ada pengaruh). Namun perbedaan anggaran militer dan konflik berpengaruh terhadap transaksi dagangnya dengan Indonesia. Peningkatan eskalasi konflik dapat menurunkan aliran perdagangan China ke Indonesia (berpengaruh negatif).

Sementara itu, dari hasil regresi data panel yang dapat dilihat dari tabel, model gravitasi menunjukkan/membuktikan bahwa peningkatan national power dan kemampuan militer melalui peningkatan pengeluaran pertahanan suatu negara, dalam hal ini China, dapat mempengaruhi peningkatan perdagangannya. Ini dibuktikan kenaikan aliran perdagangan internasional antara China dengan Indonesia.

4.3 Sikap terhadap AUKUS

4.3.1 Sikap ASEAN

(Putro, 2021)

Sejak China melancarkan agresivitas di Laut China Selatan (LCS), negara-negara ASEAN sebenarnya tidak pernah memiliki sikap yang sama terhadap konflik LCS karena masing-masing negara memiliki kepentingannya masing-masing. Sebagai negara-negara yang bersengketa, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Indonesia telah mengambil sikap menentang sembilan garis putus-putus China. Namun, Brunei Darussalam dan Kamboja menunjukkan sikap pasif terhadap China. Pasalnya, Brunei Darussalam dan Kamboja memiliki ketergantungan ekonomi terhadap China. Di sisi lain, latar belakang serupa mendasari sikap Filipina yang memiliki hubungan dekat dengan AS. Oleh karena itu, sikap bersama dan multilateralisme ASEAN dalam menanggapi ketegangan antara AUKUS dan China sulit diwujudkan karena negara-negara ASEAN memiliki preferensi dan kepentingan nasional masing-masing. Indonesia dapat berperan aktif melalui multilateralisme dan ASEAN dengan memiliki kesamaan sikap untuk menyerukan stabilitas, keamanan, dan perdamaian kawasan, terutama karena ASEAN merupakan salah satu aktor penting di Indo-Pasifik secara geografis antara China dan Australia. Namun, dalam hal ini,

multilateralisme ASEAN kemungkinan akan sulit diwujudkan, mengingat negara-negara ASEAN cenderung memiliki sikap yang berbeda. (Putro, 2021).

Misalnya, terkait perjanjian pakta pertahanan trilateral AUKUS, Filipina menjadi negara ASEAN yang telah mendukung perjanjian AUKUS. “Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin, pada 21 September 2021 mengungkapkan bahwa negara-negara anggota Asean tidak memiliki kekuatan militer untuk menjaga perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara”. Sikap Filipina itu bisa dimaklumi, mengingat Filipina adalah sekutu lama AS. Selain itu, Filipina merupakan salah satu negara ASEAN dalam konflik LCS yang wilayahnya paling banyak diklaim oleh China, tepatnya di Kepulauan Spratly. (Anadolu, 2021)

4.3.2 Sikap Politik Indonesia

(Perdana et al., 2021)

ASEAN telah terpecah atas program kapal selam bertenaga nuklir Australia bersama dengan Aliansi AUKUS. Filipina mendukung, Malaysia mengawasi, dan Indonesia bisa dibilang memberikan penolakan paling kuat. Banyak pertanyaan muncul sebagai tanggapan atas sikap politik Indonesia. Terlepas dari kedekatan geografis, situs sejarah mungkin membuat kedua negara ini mesra di meja makan, tetapi keduanya menyimpan pisau di pinggang mereka. Ada beberapa peristiwa atau konflik bilateral di ranah diplomatik antara Indonesia dan Australia dalam beberapa tahun terakhir.

Menyikapi hal tersebut, menjadi tantangan bagi Indonesia untuk terus berperan aktif dalam eskalasi ketegangan antara AUKUS dan China yang dapat berujung pada konflik militer bahkan perang nuklir di kawasan Indo-Pasifik. Sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia harus mampu memainkan posisinya, yaitu (Perdana et al., 2021):

- Pertama, Indonesia harus berkomitmen penuh untuk berdiri sebagai negara netral, tidak condong ke kiri atau ke kanan. Indonesia harus mampu menjadi “jembatan” dari potensi konflik masa depan yang terjadi baik di utara (Laut Cina Selatan) maupun di selatan (*Nuclear Powered Submarines*).
- Kedua, sebagai salah satu pendiri ASEAN, idealnya Indonesia bisa tampil sebagai pemimpin untuk kemudian melobi negara-negara di ASEAN. Indonesia harus mampu menggerakkan diplomasinya dan meyakinkan negara-negara ASEAN. Menghasilkan pernyataan bersama yang menyatakan bahwa ASEAN secara kolektif menyesali dan menolak keberadaan program

kapal selam bertenaga nuklir militer Australia karena dikhawatirkan akan memperburuk situasi di kawasan.

- Ketiga, jika langkah diplomasi di ASEAN menemui jalan buntu, Indonesia harus memberikan perhatian khusus pada sektor anggaran pertahanannya. Dengan demikian, diharapkan Indonesia akan memiliki pengaruh dan posisi yang lebih kuat.

Indonesia tidak memihak atau memilih satu dari yang lain karena ketidakpercayaan yang mendalam. Indonesia tidak percaya satu kekuatan besar secara inheren unggul secara ekonomi, militer, atau moral. Hal ini juga didukung sepanjang sejarah strategis Indonesia, yaitu bahwa setiap kekuatan besar telah merusak tatanan domestik Indonesia atau bertindak bertentangan dengan kepentingan strategisnya. Dengan pengalaman ini, Indonesia telah mengembangkan visi tatanan regional yang berfokus pada menjaga stabilitas dan legitimasi di kawasan, merumuskan strategi, dan menolak hegemoni kekuatan besar di kawasan. Tujuan-tujuan tersebut mendukung politik luar negeri Indonesia yang sebagian besar masih berpandangan negatif terhadap dinamika regional. Sementara strategi penghindaran seperti itu telah bekerja dengan baik di Jakarta, mereka tidak lagi cocok untuk era baru persaingan kekuatan besar di Indo-Pasifik. (Laksmiana, 2021)

4.3.3 Implementasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif

(Putro, 2021)

Posisi Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan didasarkan pada kepentingan nasional, yang melibatkan prinsip bebas aktif, yang dipegang dengan berusaha senetral mungkin. Mengacu pada konsep Morgenthau, kepentingan nasional suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi internal tetapi juga oleh lingkungan eksternal. Sebagai negara yang strategis dalam posisi dan perannya dalam konflik Laut China Selatan, Indonesia perlu mengetahui dan mengkaji dinamikanya. Namun, beberapa pihak memandang upaya dialog yang terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN yang bersengketa akan sia-sia karena pemerintah China tidak mengakui UNCLOS 1982.

Dalam kasus aliansi AUKUS, Indonesia berusaha sebaik mungkin untuk menghindari afiliasi dengan aliansi untuk mematuhi prinsip-prinsip politik luar

negeri secara konsisten. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia diharapkan dapat memimpin ASEAN melalui langkah-langkah dialog dengan pemerintah China. Namun, konsentrasi diplomasi Indonesia bisa “terbelah” akibat meningkatnya ketegangan di Laut Natuna akibat kehadiran *Coast Guard* China. Indonesia selalu memprioritaskan menempatkan diri sebagai episentrum dalam menjaga stabilitas kawasan tanpa harus mengurangi hubungan bilateral dengan Amerika dan China (Hamilton-Hart & McRae, 2015). Pemikir neorealis seperti Mearsheimer mengatakan bahwa politik internasional tidak selalu dikonversi melalui perang nyata tetapi juga beralih ke unsur kompetisi keamanan dan pertahanan (Fitryasa, 2011). (Perdana dkk., 2021)

Dalam menyikapi sulitnya mewujudkan sikap bersama dan multilateralisme ASEAN, Indonesia perlu memiliki sikap dalam menyikapi situasi di kawasan Indo-Pasifik berdasarkan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dianut Indonesia. Namun prinsip politik luar negeri bebas aktif tidak dapat diartikan sebagai netralitas tanpa sikap yang jelas.

Banyak pihak mengklaim bahwa ketegangan antara AUKUS dan China dapat menjadi perlombaan senjata yang berpotensi untuk terus berkembang, yang mengarah ke perang dingin edisi kedua, terutama karena kepemilikan senjata nuklir oleh kedua belah pihak. Indonesia perlu merespons ini sebagai sinyal peringatan terhadap prospek keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Kehadiran China dan Amerika sebagai dua “pemain besar” di kawasan Indo-Pasifik akan menciptakan negara-negara satelit yang disebut *proxy*. Indonesia memiliki hubungan militer yang erat dengan negara-negara AUKUS dan secara teknis sedang berkonflik dengan China di Laut China Selatan. Memiliki potensi besar untuk memihak AUKUS dan menjadi wakil AUKUS, didukung oleh sikap diplomasi Indonesia belakangan ini yang cenderung berpihak pada AUKUS.

Berkenaan dengan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia perlu memiliki sikap yang berdasarkan prinsip-prinsip tersebut tetapi berorientasi pada kepentingan nasional. Posisi Indonesia yang terlibat dalam konflik LCS dan berada di tengah pusaran ketegangan dan potensi konflik militer antara AUKUS dan LCS, membuat Indonesia ke depan tidak dapat menghindari dampak ketegangan antara kedua pihak. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tidak boleh netral tanpa bertindak tetapi harus berhati-hati dalam membuat kebijakan luar negeri yang tentunya dapat menguntungkan Indonesia.

Jika dilihat dari sisi keuntungan, kedekatan Indonesia dengan negara-negara AUKUS di bidang militer akan menguntungkan Indonesia dalam memodernisasi alutsista TNI. Meski kedekatan ini membuat Indonesia terkesan cenderung berpihak pada AUKUS dan tidak menjalankan politik luar negeri bebas aktif, pilihan ini merupakan pilihan yang rasional bagi Indonesia. Mengingat saat ini Indonesia masih terlibat dalam sengketa Laut Natuna Utara dengan China sebagai bagian dari konflik LCS, sehingga melakukan modernisasi. Terhadap alutsista dan pertahanan lainnya, unsur merupakan hal penting yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Indonesia.

Politik luar negeri yang bebas aktif tidak dapat diartikan sebagai netralitas tanpa sikap yang jelas. Jadi kedekatan dengan AUKUS dapat diartikan sebagai sikap politik yang berorientasi pada kepentingan nasional di bidang pertahanan, bukan sebagai keberpihakan yang terbuka satu sama lain. Salah satu pihak, seperti yang dilakukan Filipina, agar Indonesia tidak melabeli dirinya sebagai proksi salah satu pihak, baik AUKUS, maupun China. Kedekatan Indonesia dengan AUKUS di bidang pertahanan dapat berjalan beriringan dengan kedekatan ekonomi Indonesia dan China saat ini. Indonesia akan tetap berada pada posisi tawar yang menguntungkan untuk kerjasama ekonomi di masa depan.

Dalam hal ini, Indonesia dapat memanfaatkan dua pihak yang bertikai di bidang pertahanan dan ekonomi secara bersamaan. Itulah ungkapan “mendayung di antara dua batu”, prinsip utama politik luar negeri bebas aktif yang dicetuskan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 2 September 1948. Sikap Indonesia terhadap AUKUS dan China dapat menjadi penegasan bahwa politik luar negeri memang merupakan kebijakan luar negeri. aturan. Bebas aktif masih relevan dengan perkembangan politik internasional yang jauh berbeda dengan era perang dingin sebelumnya karena masih dapat diterapkan dengan berorientasi pada kepentingan nasional Indonesia.

Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah diplomasi dengan melakukan komunikasi yang intens dan merangkul pihak-pihak yang menjadi pusat konflik, baik AUKUS, China, bahkan ASEAN, dengan tetap menjaga stabilitas, keamanan, dan perdamaian di kawasan Indo-Pasifik serta komitmen untuk melaksanakan pencegahan perang nuklir sebagai narasi utama. Ini akan menjadi penting dalam pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Indonesia di

masa depan. Dalam hal ini, tujuan utama politik luar negeri Indonesia berorientasi pada kepentingan nasional. Dalam praktiknya, masih menunjukkan citra Indonesia yang tidak bias atau lebih condong ke satu pihak tertentu. (Putro, 2021)

Ketegangan antara AUKUS dan China memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk memprioritaskan Semangat ASEAN untuk berperan dalam menyeimbangkan kekuatan yang saling bertentangan. Dampak konflik, jika menjadi perang terbuka, dampak konflik pada akhirnya akan dirasakan oleh Indonesia dan seluruh anggota ASEAN di Kawasan Regional. Persatuan ASEAN yang dipimpin oleh Indonesia menjadi peluang terbaik untuk meredakan ketegangan yang sedang terjadi saat ini.

Indonesia harus memelihara dan memajukan politik luar negeri yang bebas aktif. Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2023, memberikan kesempatan dan harus mampu berperan di Kawasan Regional. Dalam menyikapi pembentukan AUKUS, pihaknya mengutamakan kebersamaan negara-negara ASEAN. Memprioritaskan kepentingan ASEAN mengurangi kepentingan negara tertentu saja. (Prakoso, 2021)

Indonesia dan ASEAN memelihara dan mempromosikan Perjanjian Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) atau Perjanjian Bangkok tahun 1995. Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara atau Perjanjian Bangkok, biasa disingkat SEANWFZ. Merupakan kesepakatan antara negara-negara Asia Tenggara yang terdiri dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam untuk mengamankan kawasan ASEAN dari nuklir. (Prakoso, 2021)

Ini memprioritaskan Outlook ASEAN tentang Indo-Pasifik. ASEAN Outlook on Indo-Pacific merupakan penegasan posisi ASEAN dalam menjaga perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik yang meliputi Asia Pasifik dan Samudra Hindia. AOIP ini mengedepankan pendekatan yang terbuka dan inklusif terhadap dialog dan kerjasama di bidang prioritas ASEAN, yaitu maritim, ekonomi, konektivitas, dan pencapaian SDGs, menjadikan ASEAN sebagai bargaining chip dari kepentingan negara-negara di luar kawasan dengan kepentingan di ASEAN. wilayah. (Prakoso, 2021; Pangestu et al., 2021)

Setelah melakukan serangkaian proses, diplomasi, dan negosiasi dinamika organisasi, konsep Indo-Pasifik Indonesia akhirnya dipercaya dan disetujui oleh ASEAN. ASEAN mengadopsi konsep tersebut, sehingga diberi nama *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*, disepakati pada KTT ASEAN di Bangkok pada 22 Juni 2019. Kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa strategi diplomatik Indonesia dalam menyampaikan pandangan telah berhasil. Penting bagi kita bahwa Indonesia memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas kawasan, perdamaian dunia, dan menjaga keutuhan ASEAN. (Pangestu et al., 2021)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Terbentuknya pakta trilateral AUKUS menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi Australia kalah dengan kepentingan keamanan, karena merasa terancam dengan agresifitas China sehingga mulai merasa terganggu kepentingannya. Selain itu mendorong munculnya AUKUS dapat dimungkinkan karena ketidakmampuan nyata ASEAN dalam secara efektif mengantisipasi perubahan lingkungan geopolitik yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik. AUKUS merupakan tanggapan terhadap modernisasi alat perang militer China, dimana ASEAN belum mampu menghadapinya dan memberikan posisi yang seimbang. Ini merupakan tantangan ke depan untuk menjaga keamanan regional bersamaan dengan menjaga momentum perekonomian, melalui kebijakan geo-ekonominya secara hati-hati.

Di tengah eskalasi konflik di Indo-Pasifik yang mendorong terbentuknya Pakta trilateral AUKUS, menyebabkan dugaan akan berpengaruh terhadap perekonomian, terutama terganggunya aliran perdagangan internasional ke Indonesia, terutama dari negara-negara yang berkonflik. Dengan demikian dalam penelitian ini ingin dilihat apa sebenarnya yang terjadi terhadap aliran perdagangan masing-masing negara AUKUS dan juga China ke Indonesia.

Dari hasil analisa data dari model yang dibangun berdasarkan model gravitasi untuk perdagangan internasional ditemukan karakter perdagangan internasional negara-negara tersebut ke Indonesia. Ke dalam model dimasukkan variabel *national power* dari masing-masing negara yang bersaing dan persaingan anggaran militer apakah memberikan pengaruh terhadap aliran perdagangan dari masing-masing negara tersebut ke Indonesia.

Temuan yang didapat ternyata *national power* dapat mempengaruhi aliran perdagangan internasional ke Indonesia, namun memberikan hasil yang berbeda. *National power* dari negara-negara anggota AUKUS memberikan pengaruh negatif terhadap aliran perdagangan internasionalnya ke Indonesia. Sedangkan peningkatan *national power* dari negara China justru mendorong peningkatan aliran perdagangannya ke Indonesia (berpengaruh positif).

Peningkatan perlombaan militer dan eskalasi dari konflik perang dagang juga mempengaruhi aliran perdagangan internasional ke masing-masing negara ke Indonesia. Bagi negara-negara AUKUS pengaruhnya memang masih kecil, namun China sepertinya tidak memperdulikan situasi yang terjadi dengan tetap meningkatkan *national power* dan belanja pertahanannya untuk mendukung peningkatan perdagangan internasionalnya ke Indonesia.

Peningkatan *national power* dari negara China telah mempengaruhi arus perdagangan internasional ke Indonesia dari masing-masing negara AUKUS. Ini membuktikan adanya rivalitas antara negara anggota AUKUS dengan China terkait kekuatan nasionalnya. China terus meningkatkan kekuatan nasionalnya, mengurangi kekuatan nasional negara lain, terutama Amerika Serikat. Karena perhitungan kekuatan nasional didasarkan pada persentase total global, peningkatan kekuatan nasional suatu negara akan memberikan kemungkinan penurunan kekuatan nasional negara lain. Meskipun pakta AUKUS telah ditandatangani di kawasan Indo-Pasifik, dialog dan diplomasi tetap akan dilakukan antar negara yang berkonflik agar perdagangan internasional yang berlangsung di kawasan selama ini tidak terganggu.

5.2 Saran

Dalam pembentukan Pakta AUKUS antara Amerika, Australia dan Inggris yang semakin memanaskan kawasan Indo-Pasifik, khususnya dengan China, Indonesia harus mampu berdiplomasi dan menempatkan diri pada posisi terbaik di antara kedua kekuatan besar tersebut. Dengan politik bebas aktif Indonesia, maka:

- Indonesia harus menunjukkan arah dan pelaksanaan hubungan luar negeri yang menghormati kedaulatan dan kemerdekaan dalam menentukan kebijakan dalam dan luar negeri Indonesia.
- Indonesia harus bisa memainkan peran dan posisinya. Ia harus mampu menempatkannya dalam persaingan pengaruh antara Amerika Serikat dan China di Asia Pasifik. Tidak memihak atau memasuki blok dua negara yang bersaing.
- Indonesia dapat meningkatkan manfaat ekonomi yang mendorong peningkatan investasi dan perdagangan baik dari Amerika Serikat maupun China.

Pandangan optimis perlu ditanamkan dengan mengedepankan perdamaian regional melalui dialog-dialog dan diplomasi untuk mencegah dan memberi alasan mengapa tidak perlu adanya perang. Perang akan merugikan kedua belah pihak, baik yang kalah maupun yang menang. Ada sikap saling membutuhkan dalam hubungan ekonomi antara Amerika dan China selama ini. Apalagi China tidak mau menggantikan posisi Amerika sebagai penguasa dunia. Untuk itu, China dan Amerika sendirilah yang paling utama bertanggung jawab menjaga stabilitas kawasan dan negara-negara di lingkungan strategis Indo-Pasifik, khususnya Indonesia dan ASEAN.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena periode penelitian dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2020 belum mencakup periode setelah terbentuknya Pakta Trilateral AUKUS yang dibentuk pada tanggal 15 September 2021. Jadi peneliti belum bisa melihat dampak nyata dari terbentuknya AUKUS. Kita hanya bisa mengamati periode konflik yang mengarah pada pembentukan AUKUS sebagai perang dagang dan ketegangandi Indo-Pasifik. Untuk itu perlu dilakukan penambahan periode pengamatan setelah terbentuknya AUKUS, dan dapat menggunakan model lain yang lebih baik untuk menangkap dampak konflik terhadap perekonomian negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, khususnya Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert, E. (2016). Competition in the Indian Ocean. *Council on Foreign Relations*. Retrieved from: <https://www.cfr.org/backgrounder/competition-indian-ocean>
- Ambarwati, dan Wijatmadja S. (2016). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Malang: Penerbit Intrans.
- Anadolu. (2021). Filipina Dukung Aukus. *Koran Jakarta* p.4, 22 September 2021.
- Anderson, J. E., and Wincoop, E.V. (2003). Gravity with gravitas: a solution to the border puzzle. *American Economic Review*, p.170-192.
- Ayres, A. (2019). Strategi Indo-Pasifik AS Membutuhkan Lebih Banyak Samudra Hindia. Diambil dari <https://www.cfr.org/expert-brief/us-indo-pacific-strategy-needs-more-indian-ocean>
- Azwar, S. (2010). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bahtic, F. (2021). Angkatan Laut China adalah Angkatan Laut terbesar di dunia, laporan baru menunjukkan. Diambil dari *Naval Hari Ini* 5 November 2021: <https://www.navaltoday.com/2021/11/05/chinese-navy-is-the-largest-navy-in-world-new-report-shows/>
- Bakry, AS (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bayoumi T., and Eichengreen B. (1997). Is regionalism simply a diversion? Evidence from the evolution of the EC and EFTA. In T. Ito & A. O. Krueger, *Regionalism versus Multilateral Trade Arrangements*, p.141–168.
- BPS. (2022). <https://www.bps.go.id/indicator/8/336/3/neraca-perdagangan-beberapa-negara.html>
- Blackwill, R. and Harris, J. M. (2016) *War by other means*. Cambridge: Harvard University Press.
- Brown, & Bretherton. (2016). Hubungan Australia dengan China dan AS: Tantangan Strategi Besar. *Jurnal Urusan Internasional Australia*, Vol. 70(1): 1–5.
- Chang, Chin-Lung. (1999). A Measure of National Power, based on the author's dissertation project, Department of Political Science Fo-guang University.

- Retrieved from:
<https://www.analytickecentrum.cz/upload/soubor/original/measure-power.pdf>
- Chatterjee, Partha. (1972) The Classical Balance of Power Theory, *Journal of Peace Research*, Vol.9 (1): 51-6.
- Chen, D. (2018). Strategi Indo-Pasifik: Analisis Latar Belakang. Diambil dari <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/indo-pacific-strategy-background-analysis20714>
- CNAS. (2021). Aliansi dan Kemitraan Regional. Diambil dari *Cnas.org* : <https://www.cnas.org/research/indo-pacificsecurity/regional-alliances-and-partnerships>
- CNN. (2020). Kronologi Perang Dagang AS-China Selama Kepemimpinan Trump. *CNN Indonesia*, 04 Nov 2020. Retrieved from: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201103154223-92-565387/kronologi-perang-dagang-as-china-selama-kepemimpinan-trump>.
- CRS. (2022) In Focus: AUKUS and Indo-Pacific Security. *The Congressional Research Service*, May 19, 2022. Retrieved from: <https://crsreports.congress.gov/>
- Cotter, CH, Bardach, JE, & Morgan, JR (2019). Samudera Pasifik. Diambil dari *Encyclopedia Britannica* : <https://www.britannica.com/place/Pacific-Ocean>
- Creswell, J. W. (2014) *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. 4th ed., SAGE Publications, Inc. 4th ed. California 91320: SAGE Publications, Inc.
- De P. (2019). Navigating the Indo- Pacific Cooperation. Retrieved from <https://economictimes.indiatimes.com/blogs/et-commentary/navigating-the-indopacific-cooperation/>
- Delanova, M.O. (2021). Dampak Pakta Pertahanan Trilateral Aukus Terhadap Kondisi Regional Indo-Pasifik. *Jurnal Dinamika Global*, 6(02), 259-285. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdg.v6i2.408>
- Farrell, M., Hettne, B., & Langenhove, L. V. (2005). *Global Politics of Regionalism: Theory and Practice*. London: Pluto Press
- Fitriyasa, A., 2011. Kerjasama militer Vietnam dengan Amerika Serikat dalam mengelola ancaman keamanan Laut Cina Selatan.

- FPCI. (2021). *AUKUS: Responses from Southeast Asia*. Jakarta: Foreign Policy Community Indonesia, 1 Oktober 2021.
- Fukuyama, F. (2006) *The end of history and the last man*. Reissue ed, Free Press. Reissue ed. Stanford: Free Press.
- Future Directions International. (2012). Indian Ocean: A Sea of Uncertainty. In L. G. Luke, & C. O'Loughlin, *Critical Issues in the Indian Ocean Region to 2020*. West Perth: Future Directions International.
- Glaser C., and Kauffman C. (1998). What is the offense-defense balance and can we measure it? *International Security*, 44-82.
- Golley, J. et al. (2016) 'Goeconomic Brief # 1 — Context and Concepts'. Australian National University Public Policy and Societal Impact Hub.
- Goodman, M. P. (2017). Predatory Economics and the China Challenge. Retrieved from CSIS: <https://www.csis.org/analysis/predatory-economics-and-chinachallenge>.
- Hadiwinata B.S. (2017). *Studi dan teori hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivisme*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hamilton-Hart N. and McRae D. (2015). Indonesia: balancing the United States and China, aiming for independence. *United States Studies Centre at the University of Sydney*, p.14. https://doi.org/10.1163/2468-1733_shafr_SIM210040027.
- Head, K. (2000). Gravity for Beginners. *the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*. Retrieved from: http://www.unescap.org/tid/artnet/mtg/gravity10_reading1.pdf
- Henry K. (2016). Australia in the Asian Century. *Asia & The Pacific Studies*, Vol.3(2),132-139.
- Hirschman, A. O. (1981) National Power and the Structure of Foreign Trade. Expanded e, University of California Press. Expanded e. California: University of California Press. doi: 10.2307/3017772.
- Hopkins, Raymond & Mansbach, Richard. (1973) *Structure and Proseses in International Politics*.
- Huntington, S. P. (1993) 'Why International Primacy Matters', *International Security*, 17(4), pp. 68–83. Available at: <http://www.jstor.org/stable/2539022>.

- IFS. (2022). https://www.ifs.du.edu/IFs/frm_PackagedDisplaysFlex.aspx
- Indraini, Anis. (2021). Ada Kerja Sama AUKUS, Mendag Harap Perdagangan Luar Negeri Tak Terganggu. *detikFinance*, 17 September 2021. Retrieved from: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5728712/ada-kerja-sama-aukus-mendag-harap-perdagangan-luar-negeri-tak-terganggu>
- Inkindo Jakarta. (2016). Pembangunan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. In I.D. Jackson R., and Sorensen, G. (2013). *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* (5th ed.). United Kingdom: Oxford University Press.
- Iriawan, S. (2018). Diskursus Indo-Pasifik: Hegemoni Amerika, Persaingan Strategis, Hingga Transformasi Geopolitik Kawasan. *Mandala*, 284.
- Jackson R., and Sorensen, G. (2013). *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* (5th ed.). United Kingdom: Oxford University Press.
- Ha H.T. (2021). The AUKUS Challenge to ASEAN. *Straits Times*, 25 September 2021. Diakses dari: <https://www.straitstimes.com/opinion/the-aukus-challenge-to-asean>
- Jervis R. (1978). Cooperation under Security Dilemma. *World Politics*, Vol. 30(2), 167-214.
- Julienne M. (2021). AUKUS Rocks the Boat in the Indo-Pacific : And It's not Good News. *Lettre du Centre Assie*, Ifri, September 29, 2021.
- Kapustina, L. et al. (2020) 'US-China Trade War : Causes and Outcomes', SHS Web of Conferences 73. *EDP Sciences*, 73(01012), pp. 1–13. doi: <https://doi.org/10.1051/shsconf/20207301012>.
- Kennedy, P.S.J. (2018). The effect of corrupt behavior on the flow of foreign direct investment to Indonesia. *Asia Pasific Fraud Journal*, Vol. 3(1), 153-162. DOI: <https://doi.org/10.21532/apfj.001.18.03.01.18>
- Kennedy P.S.J., and Siregar S.L. (2018). The Levels of Militarization in Southeast Asia. *Proceedings of the 1st Workshop on Multidisciplinary and Its Applications* (WMA) Part 1 – 19-20 January 2018, Aceh, Indonesia. DOI: <https://doi.org/10.4108/eai.20-1-2018.2281908>
- Kennedy P.S.J., Tobing S.J.L., Toruan R.L., Tampubolon E., Heatubun A.B. (2018). Mathematical Model: The Long-Term Effects of Defense Expenditure on Economic Growth and the Criticism. *WMA-Mathcomtech*

2018. *IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series* 1114 (2018) 012118. DOI: <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1114/1/012118>
- Keohane, R. O. and Nye, J. S. (1977) *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Michigan: Little, Brown.
- Kepaptsoglou K., Karlaftis M.G., and Tsamboulas D. (2010). The Gravity Model Specification for Modeling International Trade Flows and Free Trade Agreement Effects: A 10-Year Review of Empirical Studies. *The Open Economics Journal*, 3, 1-13.
- Khudoykina, T. V. (1998). Peaceful settlement of disputes. *Moscow Journal of International Law*, 3, 52-60.
- Khurana G.S. (2007). Security of Sea Lines: Prospects for India–Japan Cooperation. *Strategic Analysis*, 31(1): 139–153. DOI: <https://doi.org/10.1080/09700160701355485>
- Khurana, Gurpreet Singh. (2017). The Indo-Pacific Concept: Retrospect and Prospect. Retrieved from <http://cimsec.org/indo-pacific-concept-retrospect-prospect/34710>.
- Kuo, M. A. (2018). The Origin of 'Indo-Pacific' as Geopolitical Construct: Insight from Gurpreet Khurana. Retrieved from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2018/01/the-origin-of-indo-pacific-as-geopolitical-construct/>
- Laksamana E.A. (2021). Indonesia Unprepared as Great Powers Clash in Indo-Pacific. *FP Foreignpolicy* August 26, 2021.
- Laksmana, E.A., 2021. Indonesia Unprepared as Great Powers Clash in Indo-Pacific. *Foreign Policy*. <https://foreignpolicy.com/2021/08/26/indonesia-china-us-geopolitics/>. 10 Oktober 2021.
- Lebovitz, James H. & Ishaq, Ashfaq. (1987) Military Burden, Security Needs, and Economic Growth in the Middle East, *The Journal of Conflict Resolution*, Vol.31, No.1, pp.106-138.
- Lippert, B. and Perthes, V. (2020) *Strategic Rivalry between United States and China*. Berlin.
- Luttwak, E. N. (1990) 'From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce', *The National Interest*, Summer(20), pp. 17–23. Available at: <http://www.jstor.org/stable/42894676>.

- Luttwak, E. N. (1993) *The Endangered American Dream: How to stop the United States from becoming a third-world country and how to win the geo-economic struggle for industrial supremacy*, Simon & Schuster. New York.
- Lebovic J.H., and Ishaq A. (1987). *Military Burden, Security Needs, and Economic*
- Linnemann, H. (1966). *An econometric study of international trade flows*. (Master Thesis), Netherlands School of Economics, Netherlands. Available from Google Books.
- Liu, Minyu. (2018). An Analysis of Chinese Trade and FTA using Gravity Model. *Applied Economics Theses*, 32. Retrieved from: http://digitalcommons.buffalostate.edu/economics_theses/32
- Maizland, L. (2020) *China's Modernizing Military*. Available at: <https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-modernizing-military> (Accessed: 5 February 2021).
- Mas'udi SYF 2020. Analysis of the Australian Alliance's Dilemma. *Journal of PIR: Power in International Relations*, Vol.4(2),190-200.
- Mearsheimer J. J. (2007). Structural Realism. *International Relations Theories: Discipline and Diversity*, 83.
- Mearsheimer J. J. (2001). *The Tragedy of Great Power Politics*. New York: W.W. Norton & Company.
- McGuirk, R. (2021). Australia: Strategic shifts led it to acquire nuclear subs. Retrieved from *Federal News Network* September 16, 2021: <https://federalnewsnetwork.com/world-news/2021/09/australiabuys-us-nuclear-subs-due-to-changed-security-needs/>
- Medcalf, R. (2018). Reimagining Asia: From Asia-Pacific to Indo-Pacific. In: Rozman, G., Liow, J. (eds) *International Relations and Asia's Southern Tier*. Asan-Palgrave Macmillan Series. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-3171-7_2
- Merriam-Webster (2022) geo-economics noun, Merriam-Webster Dictionary. Available at: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/geo-economics> (Accessed: 19 April 2022).

- Michel, D., & Sticklor, R. (2012). Indian Ocean Rising: Maritime and Security Policy Challenges. In *Indian Ocean Rising: Maritime and Security Policy Challenges*. Washington DC: Stimson
- Morgenthau J. (1948). *Politik among nation: The Struggle for power and peace*. New York: Alfred A.Knopf.
- Morrow, J. D (1999). How Could Trade Affect Conflict? *Journal of Peace Research*, 36 (4), 481–489. DOI: <https://doi.org/10.1177/0022343399036004006>
- Morrow J. D., Randolph M. S., and Tabares T. E. (1998). The Political Determinants of International Trade: The Major Powers, 1907-90, *The American Political Science Review*, 92 (3), 649–661. DOI: <https://doi.org/10.2307/2585487>
- Muntasyir, M. B., Panji, M. and Santoso, T. (2022) 'Southeast Asia's geopolitical dynamics in', *Jurnal Hubungan Internasional LINO*, 2(1), pp. 31–43.
- Natalegawa, M. (2013). An Indonesian perspective on the Indo-Pacific'. Retrieved from *the Jakarta Post*: <https://www.thejakartapost.com/news/2013/05/20/an-indonesian-perspective-indopacific.html>
- Nuechterlein, D. E. (1976). National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making. *British Journal of International Studies*.
- Pangestu, L. G., Hikmawan, R., and Fathun, L. M. (2021). Strategi Indonesia Mewujudkan ASEAN Outlook On Indo-Pacific (AOIP) untuk Menciptakan Stabilitas di Kawasan Indo-Pasifik. *Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 26 (1), 1-22.
- Passarelli, DM (2014). *Sea Change: Evolving Maritime Geopolitics in the Indo-Pacific Region*. Washington DC: Stimson Center.
- Perdana D.B., Ramasandi R.D., and Setiawan M.E. (2021). Posisi Indonesia terhadap Aliansi Amerika, Inggris dan Australia (AUKUS) dalam Perspektif Neorealisme. *Jurnal Defendonesia*, Vol. 5(2), 33-42.
- Phua, A. T. (2021) 'AUKUS: ASEAN's Hesitant Response', *Rsis*, 29 October. Available at: <https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/aukus-aseans-hesitant-response/#.Ygd3mN9BzIU>.

- Pollins, B. M. (1989). Conflict, Cooperation, and Commerce: The Effect of International Political Interactions on Bilateral Trade Flows. *American Journal of Political Science*, 33(3), 737-761. DOI: <https://doi.org/10.2307/2111070>
- Polachek, S. W. (1980). Conflict and trade. *Journal of Conflict Resolution*, 24(1), 55-78.
- Polachek, S. W. (1997). Why do democracies cooperate more and fight less: The relationship between international trade and cooperation. *Review of International Economics*, 5(3), 295-309. DOI: <https://doi.org/10.1111/1467-9396.00058>
- Porojan A. (2001). Trade flows and spatial effects: the gravity model revisited. *Open Econ Rev.*, 12, 265-80.
- Portal. (2019). Indonesia Poros Maritim Dunia. Accessed May 30, 2020 from *Portal Informasi Indonesia*: <https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/indonesia-poros-maritim-dunia>
- Prasetyo Y., Saputra A.F., and Supartono S. (2021). Operasi penyelenggaraan peperangan kepulauan sebagai strategi pertahanan laut di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8(3), 158-168.
- Prakoso L.Y. (2021). AUKUS Peluang dan Kendala bagi Indonesia. *Jurnal Maritim Indonesia*. Vol. 9(3), 215-222.
- Putra I. N., and Hakim A. (2016). Analisa peluang dan ancaman keamanan maritim Indonesia sebagai dampak perkembangan lingkungan strategis. *Asrojournal-STTAL* Vol.6.
- Putro Y.B.Y.P. (2021). Menyikapi Potensi Eskalasi Konflik Di Kawasan Indo-Pasifik Sebagai Dampak Dari Kesepakatan Aukus. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Accessed from: <https://setkab.go.id/menyikapi-potensi-eskalasi-konflik-di-kawasan-indo-pasifik-sebagai-dampak-dari-kesepakatan-aukus/>
- Red Square. (2021). 21世紀國際詐騙案件AUKUS影響到中國全球的戰略佈局?[21st Century International Fraud Case AUKUS Affects China's Global Strategic Layout?]. Red Square 123's blog 09/21/2021. Retrieved from: <https://blog.udn.com/dff1baf6/168163598>

- Republika. (2018). Japanese and British Military Enter the South China Sea. *Republika Newspaper* Friday, September 28, 2018.
- Republika. (2018a). China: Stop U.S. Operations in the South China Sea. Tensions between China and the United States have escalated again. *Koran Republika* Wednesday, October 3, 2018.
- Reuters. (2021) "*Pact with U.S., Britain, will see Australia scrap French sub deal-media*".
- Roe P. (1999). The Intrastate Security Dilemma: Ethnic Conflict as a Tragedy?. *Journal of Peace Research*, Vol. 36(2), 183-202.
- Saputra, Eka Yudha. (2021). Mengenal AUKUS, Pakta Trisula untuk Memperkuat Militer Australia di Indo-Pasifik Tempo. *Tempo.co*, 17 September 2021. Retrieved from: https://dunia.tempo.co/read/1507135/mengenal-aukus-pakta-trisula-untuk-memperkuat-militer-australia-di-indo-pasifik?page_num=1
- Sanger, David E.; Kanno-Youngs, Zolan. (2021) "Biden Announces Defense Deal With Australia in a Bid to Counter China". *The New York Times*.
- Santhosh, M., & Noble, V. (2020). Security Issues and Strategic Challenges in the Indo-Pacific. Retrieved from *Diplomatist.com*: <https://diplomatist.com/2020/04/04/security-issues-and-strategicchallenges-in-the-indo-pacific/>
- Santoso S.P. (2021). AUKUS "point of no return" Indo-Pacific geopolitics. Retrieved from *ANTARA News*: <https://www.antaranews.com/berita/2475461/aukus-point-of-no-return-geopolitik-indo-pacific>
- Scholvin, S. and Wigell, M. (2018) Geo-Economics As Concept and Practice in International Relations, FIIA Working Paper. Available at: <https://www.researchgate.net/publication/324602603%0AGeo-economics>.
- Sondermann F. A. (1960). *The concept of national interest*. USA: Prentince-Hall.
- Star. (2021). Indonesia warns against arms race after Australian nuclear sub pact". *The Star* 17 September 2021.
- Suharman, Y. and Pramono, S. (2021). Strategi kebangkitan ekonomi tiongkok dan pendekatan long cycle transisi kekuasaan politik dunia, 18(1), pp.1–20.

- Sutrisno dan Meirinaldi. (2020). Indonesia dan Rivalitas Amerika Serikat dengan China di Kawasan Asia Pasific. *Jurnal Ekonomi*, Volume 22 Nomor 3, Oktober 2020, oleh Program Pascasarjana, Universitas Borobudur
- Tawakal A. (2022). Dinamika Keamanan Indo-Pasifik dan Uni Eropa Terkait Aliansi AUKUS. *Global Insight Journal*, Vol 07(01), 18-30.
- Temurov I., Kilicaslan Y. (2016). Conflict or Distance: What Determines the International Trade. *World Journal of Applied Economics*, Vol. 2(2), 15-31. DOI: <https://doi.org/10.22440/wjae.2.2.2>
- The Department of Defense USA. (2019). *Indo-Pacific Strategy Report*. The Department of Defense USA
- Tinbergen, J. (1962). *Shaping the World Economy: Suggestions for an International Economic Policy*. New York, USA: The Twentieth Century Fund.
- Treverton, Gregory F. & Jones, Seth G. (2005) *Measuring National Power*, ISBN 9780833037985, NSRD, Rand Corporation, Santa Monica
- UNCLOS. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea*. Retrieved from: https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
- Ward, Alexander. (2021) "Biden to announce joint deal with U.K. and Australia on advanced defense-tech sharing". *Politico*.
- WDI. (2022). *World Development Indicators*. Retrieved from: <https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators>
- Wigell, M. (2016) 'Conceptualizing regional powers' geoeconomic strategies: neo-imperialism, neo-mercantilism, hegemony, and liberal institutionalism', *Asia Europe Journal*, 14(2), pp. 135–151. doi: 10.1007/s10308-015-0442-x.
- World Economic Forum (2016) *The Age of Economic Coercion: How Geo-politics is Disrupting Supply Chains, Financial Systems, Energy Markets, Trade and the Internet*. Diakses dari: www.weforum.org.
- Wikipedia. (2021). AUKUS. Diakses dari: <https://en.wikipedia.org/wiki?curid=68730481>.
- Yanti R., and Aviolita S. (2020). Judicial Review of Indonesia's Position as the First Archipelagic State to implement the Traffic Separation Scheme to

Establish Maritime Safety and Security. *International Journal of Law and Political Sciences*, Vol. 14(12), 1176-1180.

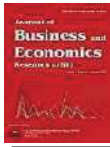
Zambelli, G. (2021) 'AUKUS Effect : New Paths for International Trade ?', *Export Planning*, 29 September. Diakses dari: <https://www.exportplanning.com/en/magazine/article/2021/09/29/aukus-effect-new-paths-for-international-trade/>.

Zhu, Z., Yang, Y. and Feng, S. (2018) 'Trade War between China and US Trade War between China and US', *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* (ASSEHR), 206 (January), pp. 423–426. doi: 10.2991/asssd-18.2018.88.

LAMPIRAN LUARAN

1. LAMPIRAN 1: ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL NASIONAL TERINDEKS SINTA 5 (STATUS TERBIT)
2. LAMPIRAN 2: ARTIKEL ILMIAH DALAM *INTERNATIONAL PROCEEDINGS* (STATUS TERBIT)
3. LAMPIRAN 3: ARTIKEL ILMIAH DALAM *INTERNATIONAL BOOKCHAPTER* (STATUS TERBIT)

LAMPIRAN 1
ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL NASIONAL TERINDEKS SINTA 5
(STATUS TERBIT)



Journal of Business and Economics Research (JBE)

Vol 99, No 9, Bulan 9999, pp. 999-999

ISSN 2716-4128 (media online)

DOI 10.47065/jbe.v9i9.9999

Geo-ekonomi: Dampak Terbentuknya Pakta Trilateral AUKUS terhadap ASEAN

Posma Sariguna Johnson Kennedy*, Yudi Sutrasna, Haetami

Fakultas Manajemen Pertahanan, Program Studi Ekonomi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia, Bogor, Indonesia

Kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC) Sentul, Bogor Jawa Barat, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: posmahutasoit@gmail.com

Submitted: 15/06/2022; Accepted: 24/06/2022; Published: 30/06/2022

Abstrak—Hubungan ekonomi dan politik internasional antar negara di lingkungan strategis sangat dipengaruhi oleh ketegangan yang terjadi di kawasan. Perkembangan pandangan geo-ekonomi saat ini menunjukkan percampuran antara kepentingan ekonomi dan kepentingan keamanan yang sudah mulai kabur pemisahannya. Munculnya Pakta trilateral AUKUS yang beranggotakan Australia, Inggris, dan Amerika Serikat semakin meningkatkan ketegangan di kawasan Indo-Pasifik, terutama dengan China. Studi ini bertujuan melihat dampak AUKUS terhadap ASEAN ditinjau dari geo-ekonomi yang telah berubah saat ini. Studi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi literatur. Sentralitas ASEAN belum mampu menghadapi tantangan ini sebagai penyeimbang sehingga setiap negara anggotanya memberikan respon yang beragam. Tantangan ke depan jauh lebih sulit karena perubahan tatanan dunia dengan persaingan antara Amerika dan China sudah bergeser ke dekat halaman rumahnya sendiri, yaitu di kawasan strategis Indo-Pasifik.

Kata Kunci: ASEAN, Amerika Serikat, Australia, , China, Geo-ekonomi, Indo-Pasifik, Pakta Trilateral AUKUS

Abstract—Regional tensions strongly influence international economic and political relations in a strategic environment. The development of the current geo-economic view shows a mixture of economic and security interests that has begun to blur the separation. The emergence of the AUKUS trilateral pact consisting of Australia, Britain and the United States has further increased tensions in the Indo-Pacific region, especially with China. This study aims to examine the impact of AUKUS on ASEAN, in terms of the geoeconomics that have changed at this time. This study was prepared using qualitative research methods through literature study. ASEAN centrality has not been able to face this challenge as a counterbalance so that each member country provides a variety of responses. The challenges ahead are much more difficult because the changing world order with the competition between America and China has shifted closer to their home, in the strategic Indo-Pacific region.

Keywords: ASEAN, United States, Australia, China, Geo-Economy, Indo-Pacific, AUKUS Trilateral Pact.

1. PENDAHULUAN

Dalam melihat prospek ekonomi di suatu kawasan strategis internasional perlu ditinjau geo-politik, geo-strategis dan geoekonomi dari kawasan tersebut. Maju mundurnya hubungan kerjasama antar negara dan kemajuan hubungan perdagangan internasional di lingkungan strategis sangat dipengaruhi oleh ketegangan yang terjadi di antara negara-negara di lingkungannya. Situasi yang memanas antara China dan Amerika Serikat (AS) di kawasan Indo-Pasifik sangat mempengaruhi sikap negara-negara ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations* atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara), karena ASEAN memiliki hubungan ekonomi yang sangat baik dengan keduanya, China dan Amerika.

Tujuan pemerintahan setiap negara di kancah internasional adalah untuk mengejar kepentingan nasionalnya, yang dapat merupakan campuran dari tujuan keamanan, kemakmuran dan nilai-nilai lainnya. Tujuan yang luas ini dapat menimbulkan konflik, sehingga diperlukan kebijakan untuk mengelola

pertukaran tersebut. Ada berbagai hasil geopolitik yang dapat dicapai oleh pemerintah nasional dengan menggunakan alat-alat ekonomi. Termasuk dalam mempertahankan (atau mendapatkan) keunggulan global dalam kemampuan teknologi, memperoleh atau memperkuat aliansi, melemahkan aliansi negara lain, mengubah sistem ekonomi atau politik negara lain, mempromosikan ideologi atau nilai sendiri, dan mengurangi ancaman (domestik dan global). Tujuan memaksimalkan kekuatan nasional juga termasuk didalamnya. (Golley *et al.*, 2016)

Sebuah tatanan dunia baru sedang muncul, tatanan dunia geo-ekonomi, di mana aturan, norma, dan institusi yang mengatur keterlibatan internasional sedang dibentuk kembali. Domain kebijakan ekonomi dan keamanan yang sebelumnya berbeda menjadi kabur, terutama yang berkaitan dengan investasi, perdagangan dan teknologi. Era geoekonomi baru menuntut cara-cara baru untuk memahami strategi yang ditempuh negara lain, dan kemudian merumuskan respons kebijakan terbaik untuk kepentingan sendiri. Sebagai akibat dari perubahan yang signifikan dan cepat dalam lanskap geopolitik, ekonomi dan teknologi, pemikiran baru tentang bagaimana mengelola risiko dan memanfaatkan peluang diperlukan untuk memaksimalkan peluang kemakmuran dan perdamaian. Konsep "geo-ekonomi" meletakkan dasar untuk mempertimbangkan cara-cara di mana pemerintah negara-negara dapat mengadopsi kebijakan yang membantu masyarakat dan ekonomi di masa depan. "Perangkat geoekonomi" dapat digunakan baik untuk efek koersif dan menguntungkan. Geo-ekonomi menyediakan kerangka kerja yang berguna untuk analisis kebijakan. (Golley *et al.*, 2016)

Di bidang geo-ekonomi, salah satu berita paling relevan adalah perjanjian trilateral yang ditandatangani oleh Australia, Inggris, dan Amerika Serikat (AUKUS) untuk membantu Australia mengembangkan dan mengerahkan kapal selam bertenaga nuklir. Penandatanganan perjanjian tersebut telah memicu berbagai respon dari pemerintah beberapa negara, khususnya di kawasan Indo Pasifik (Zambelli, 2021). Tata dunia geoekonomi baru sedang dibentuk terutama oleh meningkatnya ketegangan antara China dan Amerika Serikat, yang mencerminkan munculnya China sebagai pesaing sejawat Amerika Serikat. Ketegangan yang meningkat ini telah menyebabkan kaburnya domain kebijakan keamanan nasional dan kebijakan ekonomi internasional yang sebelumnya lebih terpisah. Justifikasi keamanan nasional semakin mendorong perumusan kebijakan di bidang ekonomi, sementara kebijakan ekonomi semakin dilihat sebagai domain persaingan strategis. Pembuat kebijakan Australia merasa memisahkan kepentingan keamanan dan ekonomi menjadi semakin sulit. Misalnya, menanggapi permintaan dari AS atau China di satu domain kemungkinan akan menyebabkan gesekan di domain lain. Potensi gesekan ini memerlukan lebih banyak koordinasi antara kepentingan Australia yang berbeda (Golley *et al.*, 2016). Terbentuknya AUKUS menunjukkan Australia lebih memilih kepentingan keamanan daripada kepentingan ekonomi (Delanova, 2021).

Kemitraan keamanan trilateral antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, atau AUKUS, telah mendominasi diskusi tentang lanskap strategis Indo-Pasifik. Reaksi negara-negara di Asia Tenggara terhadap AUKUS sejauh ini beragam. Sementara beberapa negara khawatir bahwa AUKUS mungkin akan memicu perlombaan senjata regional, negara lainnya menyatakan harapan bahwa formulasi keamanan baru dapat berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas regional. Di luar persepsi dan kekhawatiran individu, pertanyaan tentang bagaimana AUKUS dapat berdampak pada ASEAN juga muncul. Namun, masalah utama sebenarnya adalah tantangan yang ditimbulkan oleh prakarsa-prakarsa tersebut terhadap persatuan ASEAN dalam membentuk posisi yang kuat dan kohesif dalam masalah keamanan regional. Sampai saat ini negara-negara anggota ASEAN tidak mampu mencapai konsensus tentang sikap terhadap pembentukan AUKUS. (Phua, 2021)

Berdasarkan paparan di atas, tentunya AUKUS memberikan dampak kepada ASEAN karena lokasi yang berpotensi konflik sangat dekat dengan halaman rumah. Untuk itu studi ini bertujuan melihat bagaimana dampak Pakta Trilateral AUKUS terhadap ASEAN dan respon dari negara-negara anggota ASEAN ditinjau dari perkembangan geoekonomi dunia.

2. METODE PENELITIAN

a Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur, dimana penelitian dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data tanpa melakukan observasi lapangan (Creswell, 2014). Dengan demikian metode pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, khususnya dengan mencari, mengumpulkan, dan mengolah dokumen dari berbagai sumber literatur dan tulisan ilmiah dari penelitian sebelumnya (Melfianora, 2019). Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber

dari berbagai buku, artikel ilmiah, dan literatur di media online yang kredibel. Beberapa teori yang mendukung penelitian dipaparkan di bawah ini untuk melihat situasi yang terjadi di Kawasan Indo Pasifik yang berdampak pada ASEAN.

b Konsep Geo-ekonomi

Konsep geo-ekonomi, menjadi semakin gencar dalam perdebatan akademis dan berorientasi kebijakan. Namun, seperti yang diamati Mattlin dan (Wigell, 2016), sangat mengejutkan betapa banyak analisis kebijakan menggunakan istilah geoekonomi sebagai kata kunci tanpa mendefinisikannya dengan jelas, atau setidaknya mempertimbangkan bagaimana orang lain menggunakannya. Webster Dictionary memberikan definisi dari geo-ekonomi sebagai berikut “The combination of economic and geographic factors relating to international trade” (Merriam-Webster, 2022). Blackwill dan Harris

(Blackwill and Harris, 2016) dalam bukunya mendefinisikan "geoekonomi" sebagai berikut: “Penggunaan instrumen ekonomi untuk mempromosikan dan membela kepentingan nasional, dan untuk menghasilkan hasil geopolitik yang bermanfaat; dan dampak tindakan ekonomi negara lain terhadap tujuan geopolitik suatu negara”.

Definisi ini merupakan titik awal dalam membuat konsep geo-ekonomi. Contoh instrumen ekonomi adalah kebijakan perdagangan dan investasi, sanksi, bantuan, bantuan pembangunan, kebijakan pendidikan tinggi, penelitian dan teknologi. Tindakan ekonomi oleh pemerintah dapat dianalisis melalui kerangka geoekonomi ketika mereka dikejar setidaknya sebagian untuk mencapai tujuan strategis (non-ekonomi), atau ketika mereka mempengaruhi kepentingan geopolitik negara lain. Salah satu contohnya adalah ketika tarif baru diterapkan atas dasar keamanan nasional, bukan (murni) untuk perlindungan industri dalam negeri. Demikian pula, bantuan asing dapat dialokasikan ke negara tertentu dengan tujuan ganda: untuk merangsang pembangunan ekonomi serta untuk memperkuat proses demokrasi dan membangun pengaruh. (Golley *et al.*, 2016)

Istilah geo-ekonomi pertama kali diciptakan oleh ahli strategi AS Edward Luttwak pada tahun 1990, selama periode di mana beberapa di AS khawatir bahwa Jepang akan menantang keunggulan globalnya dengan ekonomi daripada cara militer (Golley *et al.*, 2016). Luttwak (Luttwak, 1990) dalam artikelnya menggunakan istilah geo-ekonomi untuk menggambarkan bagaimana dalam sistem pasca Perang Dingin, arena utama persaingan antar negara akan menjadi mementingkan ekonomi daripada militer. Luttwak (Luttwak, 1993) lebih lanjut mengelaborasi ide-idenya dalam sebuah buku yang diterbitkan tiga tahun kemudian. Dengan ancaman Soviet ke Eropa dan Amerika Serikat yang berakhir, tidak dapat dibayangkan akan ada peperangan besar atau konfrontasi militer dalam waktu dekat. (Scholvin and Wigell, 2018)

Huntington (Huntington, 1993) juga mengamati bagaimana “di dunia dimana konflik militer antara negara-negara besar tidak mungkin terjadi, kekuatan ekonomi akan semakin penting dalam menentukan keunggulan atau subordinasi negara”. Oleh karena itu, dalam pandangan para ahli geoekonomi awal ini, akhir Perang Dingin tidak sama dengan 'akhir sejarah' yang diprediksi oleh Francis Fukuyama (Fukuyama, 2006). Sebaliknya, mereka meramalkan transformasi cara konflik dimainkan – “dengan modal sekali pakai sebagai pengganti senjata, inovasi sipil sebagai pengganti kemajuan teknis militer, dan penetrasi pasar sebagai pengganti garnisun dan pangkalan” (Luttwak, 1990). Di era geo-ekonomi baru, negara-negara masih akan mengejar tujuan-tujuan nasionalnya tetapi melalui cara-cara ekonomi dan bukan militer. (Scholvin and Wigell, 2018)

Hirschman (Hirschman, 1981) dalam *National Power and the Structure of Foreign Trade*, secara khusus mengakui saling ketergantungan ekonomi sebagai sumber kerentanan, setelah mempelajari tata negara ekonomi Nazi Jerman sebelum perang (Golley *et al.*, 2016). Saling ketergantungan ekonomi ini meningkat pesat dalam skala internasional pada 1990-an, dan terlebih lagi pada 2000-an, begitu pula tantangan dan risikonya, banyak di antaranya bersifat geo-ekonomi. Sebagaimana dicatat, saling ketergantungan seringkali asimetris, artinya memerlukan sumber kekuatan dalam hubungan tawar-menawar, seperti yang telah ditunjukkan oleh Keohane & Nye (Keohane and Nye, 1977) dalam buku mereka. Risiko yang dihasilkan dari saling ketergantungan, dan yang mempengaruhi negara secara asimetris, termasuk gangguan pada rantai pasokan global dan arus perdagangan gelap serta penggunaan kerentanan asimetris sebagai pengungkit strategis (World Economic Forum, 2016). Kerentanan ini mendorong keamanan ekonomi ke pusat agenda global dan menyarankan bahwa perhitungan geo-ekonomi harus menjadi yang terpenting dalam perhatian kekuatan besar dan kecil dalam kalkulus strategis mereka (Wigell, 2016). (Scholvin and Wigell, 2018)

Apa yang sekarang disebut strategi geo-ekonomi seperti yang dilakukan oleh semua kekuatan besar di masa lalu telah memberikan hasil positif bagi banyak negara yang telah menuai manfaat ekonomi dan

keamanan dari strategi ini. Geoekonomi menyediakan "perangkat" yang dapat digunakan untuk menganalisis dan mengejar tujuan yang berbeda dari setiap negara. (Golley *et al.*, 2016)

c Teori Neorealisme

Sikap negara-negara pendiri AUKUS dapat dijabarkan dengan menggunakan teori neorealisme, yang menyatakan bahwa sudah menjadi hukum alam bahwa setiap negara harus mengembangkan militer yang kuat untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam politik internasional yang anarkis. Jika tidak, negara harus menerima konsekuensi dapat ditaklukkan dalam perang dan diperbudak oleh negara lain (Hadiwinata, 2017). Kondisi anarki, dimana tidak adanya otoritas pusat yang dapat menegakkan hukum dan memelihara sistem akan mengakibatkan negara-negara saling bersaing dalam meningkatkan kekuatannya, terutama di bidang militer. Dalam situasi ini, kekuatan militer yang lebih besar akan memungkinkan suatu negara untuk mendominasi dan mempengaruhi negara lain (Ambarwati and Wijatmadja, 2016). Melalui teori Neorealisme, dapat dipahami alasan mengapa Australia, Inggris, dan Amerika Serikat membentuk pakta pertahanan, yaitu untuk memperkuat militer, khususnya militer Australia, dengan merencanakan pembangunan kapal selam bertenaga nuklir. (Muntasyir, Panji and Santoso, 2022)

d Pakta Trilateral AUKUS

Kerjasama trilateral AUKUS merupakan tanggapan terhadap keamanan regional yang sudah tegang. AUKUS dapat dilihat sebagai mekanisme bagi negara-negara seperti Australia untuk mengatasi kerentanan mereka terhadap keamanan regional. Bagi AS, AUKUS adalah manifestasi terbaru dari pendekatan multilateral luas dan ambisinya dalam mempertahankan keunggulan Amerika di kawasan itu. AS secara eksplisit dengan mengatakan bahwa China tidak akan mencapai tujuannya menjadi negara paling kuat di bawah pengawasannya. AUKUS merupakan ekspresi lain dari kepentingan Amerika di kawasan ini, melalui kerja sama dengan sekutu dan jaringan mitra yang berpikiran sama yang ditargetkan untuk meredam perilaku agresif China. (Phua, 2021)

Pembentukan AUKUS, dan khususnya keputusan untuk mengeksport kapal selam bertenaga nuklir (SSN), telah menimbulkan reaksi beragam di antara mitra Amerika di Asia Timur. Reaksi-reaksi ini sebagian besar dicerminkan oleh dua pendekatan yang bersaing: memperkuat supremasi militer dalam menghadapi kebangkitan Cina, di satu sisi, dan mencoba menghindari "Perangkap Thucydides" di sisi lain. "Perangkap Thucydides" khawatir bahwa AUKUS dapat memicu perlombaan senjata (nuklir) dan akan memperburuk ketegangan di Asia Timur. Diantaranya: Indonesia, Malaysia dan Singapura, Thailand serta mitra dekat China, Laos dan Kamboja, meskipun mereka belum menyatakan posisi yang jelas. (Julienne, 2021)

Negara-negara Asia Tenggara secara ekspresif jelas tidak ingin terlibat dalam politik kekuatan besar. ASEAN sangat berhati-hati sejauh melihat AUKUS sebagai upaya untuk melawan agresifitas China yang tumbuh di kawasan. Pada saat yang sama, memburuknya hubungan Australia-China dengan cepat dan meningkatnya aktivitas militer di Laut China Selatan dan Selat Taiwan, yang menunjukkan realitas lingkungan keamanan regional. (Phua, 2021)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a Era Baru Geo-Ekonomi

Era baru melihat penekanan yang lebih besar pada keamanan, karena kemakmuran dan keamanan telah menjadi fungsi yang semakin kompleks satu sama lain. Ini kontras dengan tiga dekade terakhir di bawah sistem internasional adalah unipolar, ketika bobot kemakmuran (misalnya, "lapangan kerja dan pertumbuhan") jauh lebih tinggi daripada keamanan (dalam hal persaingan antar negara di antara kekuatan besar). (Golley *et al.*, 2016)

Kali ini berbeda. Bedanya adalah pertama kalinya hegemon dunia, Amerika Serikat, secara bersamaan menghadapi pesaing ekonomi dan strategis di satu negara yang sama (China). Ini terjadi di tengah masa dimana teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan batas baru yang memungkinkan bentuk-bentuk baru tata negara. Pergeseran dari sistem internasional unipolar kembali ke sistem multipolar menunjukkan bahwa akan terlihat lebih banyak konflik muncul. Perluasan fisik ke domain cyber berarti bahwa beberapa dari konflik itu akan mengambil bentuk yang sebelumnya tidak diketahui. Untuk alasan ini, kita akan melihat negara-negara bereksperimen dengan perangkat geoekonomi yang diperluas dalam beberapa tahun mendatang. (Golley *et al.*, 2016)

Sementara, sebagian besar tulisan Luttwak masih sangat relevan saat ini. Dengan mengidentifikasi lima tren global baru yang bermanifestasi di persimpangan politik, ekonomi, teknologi, dan masyarakat yang telah memunculkan tatanan baru ini (Golley *et al.*, 2016):

1. Meningkatnya persaingan strategis antara Amerika dan China, dipicu oleh kemunculan China yang cepat sebagai kekuatan besar, dimana model tatanan politik dan organisasi ekonominya sangat berbeda dengan Amerika Serikat.
2. Kebijakan domestik pemerintah China dan strategi serta pengaruh internasionalnya, termasuk *The Belt and Road Initiative*-nya.
3. Perluasan masalah keamanan nasional yang mencakup semakin banyak domain kebijakan, termasuk dalam perdagangan dan investasi internasional.
4. Melemahnya tatanan berbasis aturan yang muncul di bawah kepemimpinan Amerika pada periode pasca-perang, baik karena tantangan yang ditimbulkan oleh China dan negara-negara non-Barat lainnya, maupun tantangan dari hilangnya legitimasi di mata publik Barat.
5. Tingkat saling ketergantungan global yang sangat tinggi dan belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk arus manusia, pengetahuan, barang dan modal, serta konektivitas di ruang siber.

Beijing dan Washington, serta ibu kota lainnya, kini terlibat dalam persaingan kekuatan besar yang semakin kompetitif. Selama beberapa dekade proses globalisasi dengan situasi institusi global yang mendorong saling ketergantungan ekonomi. Ini dianggap sebagai pendorong perdamaian dan kemakmuran, setidaknya di dunia kapitalis. Saling ketergantungan ekonomi ini semakin dilihat oleh analis keamanan sebagai sumber kerentanan dan ketidakamanan.

(Golley *et al.*, 2016)

a. Tanggapan Negara-Negara di Asia Tenggara terhadap AUKUS

Tanggapan Asia Tenggara bervariasi. Malaysia dan Indonesia menyatakan keprihatinan tentang risiko perlombaan senjata, sementara Singapura, Vietnam dan Filipina umumnya lebih menerima pengaturan tersebut. Dimana klaim China atas wilayah Laut Cina Selatan memang ditentang oleh negara-negara Asia Tenggara, seperti Vietnam, Malaysia, Indonesia dan Filipina (Djalal, 2021a).

Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob menyatakan keprihatinannya bahwa pengaturan keamanan baru dapat menjadi katalis untuk perlombaan senjata nuklir di wilayah tersebut dan mungkin akan dapat memprovokasi beberapa pihak atau negara untuk bertindak agresif, terutama di Laut Cina Selatan. Dalam menyampaikan keprihatinan ini, dia menekankan komitmen Malaysia terhadap Asia Tenggara sebagai Zona Damai, Kebebasan, dan Netralitas (ZOPFAN) dan Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ), serta sikap Malaysia untuk tidak mengizinkan kapal bertenaga nuklir masuk ke perairan teritorialnya (Shirodkar, 2021). Malaysia khawatir bahwa, meskipun Australia tidak diatur untuk memperoleh senjata nuklir berdasarkan perjanjian tersebut, transfer teknologi nuklir untuk menggerakkan kapal selam Australia mungkin merupakan ujung dari senjata nuklir (Djalal, 2021a). Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Malaysia telah memperingatkan bahwa meningkatnya kehadiran kapal perang asing di Laut Cina Selatan dan berisiko memicu konfrontasi militer (Rajak, 2019). Malaysia telah mempertahankan pendiriannya atas klaim teritorial dan hak ZEE-nya, menolak klaim sembilan garis putus-putus China dan mempertahankan hubungan pertahanan yang erat dengan AS, Australia dan, melalui Five Powers Defense Arrangements (FPDA), Inggris (Storey, 2020). Mengingat perilaku agresif China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Malaysia, diragukan bahwa lembaga keamanan nasional negara itu sama khawatirnya dengan AUKUS seperti yang tampak pada politisi Malaysia. (Choong and Storey, 2021)

Kementerian Luar Negeri Indonesia pada 17 September 2021 mengatakan “dengan hati-hati” mengenai AUKUS, dan menekankan bahwa Jakarta “sangat prihatin” atas “perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan yang terus berlanjut di kawasan”. Indonesia meminta Australia untuk terus memenuhi kewajiban non-proliferasi nuklirnya, dan meminta Canberra untuk mempertahankan komitmennya terhadap perdamaian dan keamanan regional sesuai dengan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (TAC), dimana Australia juga merupakan Penandatangan Kontrak Tinggi. Namun perlu dicatat bahwa ketakutan Indonesia tentang “perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan yang berkelanjutan”, tidak hanya mengacu pada tiga mitra AUKUS, tetapi semua negara kawasan, termasuk China. Penilaian AUKUS datang dari diplomat senior Indonesia Abdul Kadir Jailani. Melalui tulisannya di Jakarta Post, dia menggemakan penilaian pemerintahnya, tetapi mencatat bahwa tidak ada norma internasional yang tampaknya telah dilanggar. Dia menambahkan bahwa “percakapan yang lebih dalam” tentang AUKUS akan membantu membangun rasa saling percaya, percaya diri, dan diplomasi (Kemlu RI, 2021). Kekhawatiran tentang perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan perlu diatur dalam perspektif yang tepat.

AUKUS akan memicu perlombaan senjata adalah kebalikan dari logika sebab-akibat. Jelas bahwa AUKUS adalah akibat langsung dari "tindakan yang semakin provokatif" China (Edel, 2021). (Choong and Storey, 2021) Tanggapan dari Filipina menimbulkan perpecahan serius dalam pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte atas masalah keamanan nasional. Sejak Presiden Rodrigo Duterte menjabat pada tahun 2016, hubungan AS-Filipina berada di bawah tekanan, karena janjinya untuk "menceraikan" Amerika dan mencari hubungan yang lebih dekat dengan China dan Rusia. Hal ini mengakibatkan pengurangan beberapa keterlibatan pertahanan bilateral (diperparah oleh pandemi COVID19) dan ancaman Duterte untuk mengakhiri Perjanjian Kunjungan Pasukan (VFA) 1999—ancaman yang baru ditarik pada bulan Juli selama kunjungan ke Manila oleh AS Menteri Pertahanan Lloyd Austin (Storey, 2020). Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa setelah pengumuman AUKUS, juru bicara kepresidenan Harry Roque mengatakan bahwa Duterte khawatir pakta tersebut dapat memicu “perlombaan senjata nuklir” (Gita-Carlos, 2021). Sebelum pernyataan Rodrigo, dua anggota kunci kabinet Duterte telah mendukung penuh AUKUS. Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana menyatakan bahwa adalah hak Australia untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya seperti yang juga dilakukan Filipina untuk melindungi wilayahnya (Nepomuceno, 2021). (Choong and Storey, 2021)

Menteri Luar Negeri Filipina, Locsin mengeluarkan pernyataan ilmiah yang menyambut baik pembentukan AUKUS dan menyampaikan tiga poin penting (Department of Foreign Affairs of Philippines, 2021). Pertama, anggota ASEAN, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tidak memiliki kemampuan militer untuk menjamin perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara. Kedua, dengan menyeimbangkan utama kawasan, AS, yang secara geografis jauh, penguatan kemampuan proyeksi kekuatan Australia akan membantu menjaga keseimbangan kekuatan regional dan memungkinkan Canberra untuk merespons ancaman yang dihadapi kawasan dengan lebih baik. Ketiga, karena Australia tidak berusaha memperoleh senjata nuklir, AUKUS tidak melanggar SEANFWZ atau komitmen Canberra terhadap Perjanjian NonProliferasi Senjata Nuklir (NPT) atau sentralitas ASEAN. Dukungan Lorenzana dan Locsin untuk AUKUS mencerminkan dukungan lembaga keamanan nasional Filipina untuk sistem aliansi AS dan kekhawatiran yang berkembang tentang kebijakan tegas China di Laut China Selatan. (Choong and Storey, 2021)

Reaksi Singapura terhadap AUKUS relatif terukur, dan mencerminkan dukungan negara itu terhadap pengerahan pasukan militer AS di kawasan itu. Setelah diberi pengarahannya tentang AUKUS dari Australia oleh Scott Morrison, Perdana Menteri Lee Hsien Loong mencatat hubungan antara Singapura dan Australia. Ia berharap AUKUS dapat memberikan kontribusi yang konstruktif bagi perdamaian dan stabilitas kawasan serta melengkapi arsitektur kawasan (Singapore Government Agency, 2021) Menteri Luar Negeri Balakrishnan mengungkapkan sentimen yang sama. Dia mencatat bahwa Singapura memiliki hubungan jangka panjang dengan ketiga anggota AUKUS, dan bahwa “kepercayaan dan keselarasan yang besar” seperti itu “sangat membantu”. Ini berarti bahwa Singapura tidak “terlalu cemas” tentang perkembangan baru. 25 Poin kuncinya, kata menteri, adalah bahwa AUKUS adalah “bagian dari penataan kembali geostrategis yang lebih besar”. Singapura harus mengambil langkah dan memastikannya tidak berakhir pada posisi yang "tidak layak atau berbahaya". Dari perspektif yang lebih luas, AUKUS sebenarnya bukanlah “pusat perhatian”, dan pertanyaan yang lebih besar adalah bagaimana pengelolaan hubungan AS-China. (Choong and Storey, 2021)

Pendekatan Vietnam terhadap menggarisbawahi realitas yang terjadi di regional. Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa semua negara harus bekerja menuju tujuan perdamaian, stabilitas, kerja sama, dan pembangunan yang sama di kawasan. Vietnam menekankan bahwa energi nuklir yang digunakan untuk armada kapal selam baru Australia harus digunakan untuk tujuan damai, melayani pembangunan sosial-ekonomi, dan memastikan keselamatan bagi manusia dan lingkungan (Anh, 2021). Reaksi Vietnam tidak terduga, perselisihan lama Hanoi dengan China di Laut China Selatan telah membuatnya mengejar hubungan yang lebih kuat dengan AS. Sementara Hanoi belum menyatakan dukungan terbuka dan publik untuk strategi FOIP (“Free and Open Indo-Pacific atau Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka”) namun telah menyatakan dukungan untuk prinsip-prinsip FOIP, seperti pentingnya menjaga kebebasan navigasi dan menyelesaikan perselisihan secara damai dan sesuai dengan hukum internasional (Chatys, 2021). Pada bulan September 2021, Hanoi menandatangani perjanjian dengan Jepang untuk transfer peralatan dan teknologi pertahanan. Kelompok yang dipimpin AS, memainkan "peran penting" dalam melawan agresifitas China. AUKUS harus membawa “kepercayaan baru” ke negara-negara yang menentang klaim maritim China yang berlebihan (Radio FA, 2021)“. (Choong and Storey, 2021)

Sebagai sekutu AS tetapi juga mitra dekat China, Thailand menanggapi AUKUS dengan kehati-hatian. Thailand ingin menjaga hubungan baik dengan kedua belah pihak dan tidak ingin mengambil posisi dalam pengaturan trilateral dan berisiko menyinggung Washington atau Beijing. Bagaimanapun, pemerintah Thailand disibukkan dengan masalah politik domestik dan memiliki sedikit bandwidth untuk masalah keamanan regional. Dengan demikian, belum ada tanggapan resmi dari kantor perdana menteri atau kementerian luar negeri atau pertahanan. Sepuluh hari setelah AUKUS diumumkan, Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha menyampaikan pidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa di mana ia menjanjikan dukungan Thailand untuk Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir (yang tidak ditandatangani oleh Australia) dan NPT-nya. Referensinya pada dua perjanjian ini bisa menjadi tanda bahwa Thailand memiliki keraguan tentang AUKUS. Mantan menteri luar negeri Thailand Piromya, menyatakan bahwa tidak ada negara yang ingin didominasi oleh China dan oleh karena itu kehadiran militer AS diperlukan, dan mungkin dengan perluasan, dari sekutu dan mitranya. (Choong and Storey, 2021)

b. Kebijakan yang Dilakukan Negara-negara AUKUS Berdasarkan Geo-ekonomi

Australia merilis pernyataan yang menegaskan “komitmen teguh” terhadap Sentralitas ASEAN. Dengan tegas Canberra mengklarifikasi bahwa tidak akan berusaha mengembangkan kemampuan senjata nuklir bahkan jika inisiatif baru akan memungkinkannya untuk mengerahkan armada kapal selam bertenaga nuklir. Perwakilan negara dari pendukung AUKUS juga telah menjangkau berbagai pemimpin Asia Tenggara untuk membahas aliansi baru dan ambisinya untuk berkontribusi secara konstruktif bagi perdamaian regional (Phua, 2021). Canberra meyakinkan Jakarta tentang dukungan Australia untuk sentralitas ASEAN. Namun, penting bagi Australia untuk menindaklanjuti penguatan praktik dan penerapan sentralitas ASEAN, yang merupakan inti dari kontribusi ASEAN terhadap stabilitas regional di halaman belakang Australia. (Djalal, 2021a)

Pembaruan Strategis Pertahanan Australia pada tahun 2020 mencatat bahwa lingkungan strategis Canberra telah memburuk lebih cepat daripada yang diantisipasi sejak buku putih pertahanannya diluncurkan tahun 2016. Meskipun ada beberapa referensi eksplisit ke China, jelas bahwa pembangunan militer Beijing adalah fokus utama keprihatinan Canberra. Peningkatan 6,4 persen dalam pembelanjaan pertahanan China pada tahun 2020 (US\$9 miliar secara riil) merupakan lebih besar dari gabungan dari peningkatan riil negara-negara kawasan Indo-Pasifik pada tahun itu. Pemaksaan ekonomi China terhadap Australia, termasuk pengenaan tarif tinggi pada produk Australia, setelah Canberra menyerukan penyelidikan tentang asal-usul virus corona, juga berperan dalam keputusan Australia untuk memperkuat kemampuan proyeksi kekuatannya. (IISS, 2021)

Pada 21 Oktober 2021, Menteri angkatan bersenjata Inggris James Heappey menyatakan bahwa telah terjadi “overhyping” kontroversi atas AUKUS. Dia menjelaskan bahwa perjanjian trilateral baru tidak dimaksudkan untuk

“menantang orang lain”, tetapi tambahan Australia ke dalam kemitraan berbagi teknologi lama antara AS dan Inggris.

(Phua, 2021)

Di Asia Tenggara, Presiden AS Joe Biden menyatakan Amerika Serikat akan kembali mengejar ketinggalannya. Empat tahun terakhir modal diplomatik dan politik Washington berkurang di wilayah ASEAN. Amerika Serikat tidak memiliki inisiatif regional yang signifikan. Pada 2017, Presiden Trump menghadiri KTT ASEAN-AS di Filipina, tetapi melewatkan keempat KTT Asia Timur selama masa jabatannya. Kedutaan AS di empat negara ASEAN (Singapura, Brunei, Thailand, dan Filipina) telah beroperasi tanpa duta besar, dan Amerika Serikat adalah satu-satunya negara besar yang tidak memiliki perwakilan tetap di Sekretariat ASEAN. Pemerintahan Biden melakukan langkah-langkah untuk membalikkan arah, memperbaiki kerusakan, dan memulihkan kredibilitas AS. Langkah pertamanya dalam kebijakan luar negeri, adalah memenangkan kembali sekutu dan mitra sambil mendorong musuh. (Djalal, 2021b)

Untuk pertama kalinya dalam empat tahun, AS mengirimkan perwakilan tertingginya untuk bertemu dengan para pemimpin ASEAN di KTT ASEAN pada 26 Oktober 2021. AS berusaha meyakinkan para pemimpin kawasan bahwa AS mendukung Sentralitas ASEAN dan peran ASEAN dalam arsitektur kawasan Indo-Pasifik. Namun ASEAN perlu menyesuaikan dan menghidupkan kembali posisinya sebagai jantung arsitektur keamanan kawasan. Untuk tujuan ini, perlu menemukan kesamaan dan memperdalam kerjasama dengan berbagai mekanisme regional. Dalam beberapa hal, itu dapat membantu menumbuhkan kepercayaan strategis yang dapat mengurangi beberapa keraguan yang dimiliki masing-masing negara. Di

sisi lain, bekerja sama untuk memecahkan masalah yang ditargetkan, menunjukkan kapasitas ASEAN untuk bekerja sama secara praktis terlepas dari tantangan yang dihadapinya. (Phua, 2021)

c. Tanggapan China

Walaupun klaim China atas wilayah Laut China Selatan ditentang keras oleh negara-negara Asia Tenggara, seperti Vietnam, Malaysia, Indonesia dan Filipina, namun China dan ASEAN menyepakati rancangan yang akan menjadi dasar *Code of Conduct* atau kode etik di Laut Cina Selatan. Dengan *Code of Conduct* tersebut ASEAN dan China berharap sengketa klaim di Laut Cina Selatan dapat diselesaikan secara aktif terhadap kedua Negara, yakni China dan Amerika Serikat. ((Djalal, 2021a)

China memperingatkan bahwa AUKUS akan merusak perdamaian dan stabilitas regional, memperburuk perlombaan senjata dan mengganggu upaya non-proliferasi nuklir internasional. Beberapa komentator China mengakui bahwa Australia memainkan “peran penting” di kawasan itu. Mereka juga melihat kesepakatan trilateral sebagai tanda bahwa negara-negara bersedia bersatu untuk melawan Beijing. (Mastro and Cooper, 2021)

Berkenaan dengan Australia, media resmi pemerintah China telah secara langsung mengancam Canberra. Sebuah editorial dari Global Times, misalnya, berbunyi: jika perlu, “China pasti akan menghukum [Australia] tanpa ampun”, dan (...) “Pasukan Australia juga kemungkinan besar menjadi angkatan pertama tentara Barat yang menyia-nyiakan mereka. tinggal di Laut Cina Selatan.” Sejauh ini memberikan nasihat militer kepada Australia: “Baru-baru ini, beberapa orang di Canberra mengusulkan sistem pertahanan rudal Australia. Kami percaya ini perlu (Global Times, 2021b)”.

(Julienne, 2021)

Langkah AS juga memicu retorika China. Pertama, AUKUS memperkuat argumen bahwa AS pada akhirnya adalah sekutu yang tidak dapat diandalkan (Sheng, 2021). Seperti ketika Amerika menarik diri dari Afghanistan, dan menuduh Washington meninggalkan sekutunya ketika tidak lagi membutuhkan mereka (Global Times, 2021a). Kedua, AUKUS justru digunakan China untuk menggembelng nasionalisme di dalam negeri, memberikan dukungan untuk propaganda di China yang berada di bawah ancaman dari AS. Hal ini kemungkinan akan memicu strategi ofensif China yang sedang berlangsung di Asia Timur. Selama beberapa bulan terakhir, China telah meningkatkan agresifitasnya terhadap tetangga maritimnya melalui operasi udara militer terhadap Taiwan, Jepang atau Malaysia, militerisasi penjaga pantainya, dan penggunaan milisi maritim tanpa hambatan, terutama terhadap Filipina. Akibatnya, sikap yang lebih agresif mungkin akan ditunjukkan China di bulan-bulan mendatang. (Julienne, 2021)

d. Sikap ASEAN terhadap AUKUS

ASEAN menyambut baik persaingan terbuka antara kekuatan-kekuatan besar di kawasan, dengan cara yang tepat (yaitu persaingan dalam damai dan untuk kemajuan). Negara-negara ASEAN diuntungkan dari persaingan positif antara Cina, Amerika Serikat dan Jepang, misalnya, untuk peluang perdagangan, investasi, dan pendidikan. Apa yang tidak diinginkan ASEAN adalah jenis persaingan *zero-sum* yang akan menciptakan ketegangan, ketidakpercayaan, dan perpecahan dan dengan demikian (sekali lagi) memisahkan kawasan itu. (Djalal, 2021b)

Negara-negara ASEAN menginginkan persaingan dengan cara-cara yang benar di kawasan, yaitu (Djalal, 2021):

- Pertama, mereka tidak ingin melihat meningkatnya persaingan AS-China di Asia Tenggara, wilayah yang telah menjadi pusat konflik antara kekuatan besar di masa lalu dan bisa menjadi seperti itu lagi. Negara-negara ASEAN tidak ingin terpolarisasi, ditarik ke arah yang berbeda oleh kekuatan yang berbeda, dan melihat kohesi komunitas ASEAN dirusak. Negara-negara ASEAN berharap bahwa pemerintahan AS akan menurunkan suhu, nada, dan ketegangan hubungan AS-China dan menjaga persaingan tetap terkendali.
- Kedua, adalah kepentingan nasional negara-negara ASEAN untuk menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat dan China. Mereka semua ingin mendapatkan keuntungan dari kedua kekuatan tersebut. Mereka percaya bahwa Asia Tenggara, dan Indo-Pasifik, memiliki banyak ruang untuk keterlibatan kedua negara adidaya. Dengan demikian, negaranegara ASEAN tidak ingin melihat pengulangan kata-kata kasar anti-China yang agresif yang diucapkan AS.
- Ketiga, negara-negara Asia Tenggara tidak ingin melihat erosi sentralitas ASEAN—prinsip bahwa ASEAN, yang menyatukan kelompok negara yang semakin kohesif, harus mengambil alih urusan di kawasan. Sentralitas ASEAN menganggap bahwa negara-negara besar memiliki kepercayaan strategis di

ASEAN dan bersedia membiarkan organisasi tersebut memimpin beberapa aspek urusan regional. Kredibilitas ASEAN tergantung pada kemampuannya untuk menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan besar: Amerika Serikat, Cina, Rusia, Jepang, Uni Eropa, dan India. Karena itu, ASEAN tidak mau memihak dan tidak mau dipaksa. Memilih satu sisi secara otomatis akan berarti mengasingkan yang lain. Melakukan hal itu akan memposisikan kembali ASEAN pada hubungan yang kompleks.

Asia Tenggara ingin melihat Amerika Serikat dan China bekerja sama di kawasan mereka. Xi pernah menyerukan

“jenis baru hubungan kekuatan besar” dengan Amerika Serikat berdasarkan “solusi menang-menang.” Biden telah mengkonfirmasi bahwa pemerintahannya menginginkan “persaingan, bukan konflik” dengan China dan “siap untuk bekerja dengan Beijing ketika kepentingan Amerika untuk melakukannya.” Blinken juga mengatakan bahwa “hubungan AS dengan China akan kompetitif ketika seharusnya, kolaboratif ketika bisa.” Dengan kata-kata yang membesarkan hati ini, dapatkah salah satu pihak mengatasi ego strategisnya dan mulai menjajaki jalan untuk kerja sama, dan Asia Tenggara menjadi tempat di mana beberapa bentuk kerja sama nyata AS-China terjadi. Tidak ada kekurangan masalah bagi Washington dan Beijing untuk mengeksplorasi kerja sama di: industri, infrastruktur, keamanan maritim, pembajakan, iklim, lingkungan, energi hijau, bencana alam, COVID-19, pertukaran pemuda, dan sebagainya. Meskipun ini tidak akan mengubah persaingan mereka dalam skala global, hal itu mungkin hanya mengubah tekstur hubungan AS-China di Asia

Tenggara. Itu akan cukup baik untuk ASEAN. (Djalal, 2021b)

Bagaimanapun, ASEAN merupakan kawasan yang berpengalaman terhadap daftar panjang konflik yang tampaknya tidak dapat diselesaikan, namun dapat diubah menjadi kerja sama yang langgeng, seperti: antara Indonesia dan Malaysia, Indonesia dan Singapura, Malaysia dan Singapura, Indonesia dan Timor Leste, Malaysia dan Filipina, Vietnam dan Kamboja -daftarnya terus berlanjut. Negara-negara di kawasan ini telah menunjukkan bahwa permusuhan dapat berubah menjadi persahabatan. Hal ini benar-benar tergantung pada apakah ada kemauan politik dan tipu muslihat diplomatik dalam melakukannya. Natalegawa, (Mantan menteri luar negeri Indonesia), pernah mengajukan gagasan 'perjanjian Indo-Pasific' yang akan sama saja dengan menerapkan norma-norma Traktat Persahabatan Kerjasama (TAC) ASEAN ke wilayah Indo-Pasifik yang lebih luas. (Djalal, 2021b)

6. KESIMPULAN

Di era saat ini kepentingan ekonomi dan keamanan suatu negara sudah mulai kabur batas-batasnya. Inilah yang membedakan pendekatan geo-ekonomi dahulu dan sekarang. Pada awalnya geo-ekonomi lahir setelah berakhirnya Perang Dingin, sehingga negara-negara lebih memikirkan tujuan ekonomi di negaranya dibandingkan keamanan melalui pengembangan militer. Sejak tahun 2000-an terjadi perubahan pandangan mengenai geo-ekonomi dimana kedua tujuan tersebut mulai dipikirkan sama pentingnya, bahkan kadang kepentingan keamanan dirasa jauh lebih penting dibanding kepentingan ekonomi. Terbentuknya pakta trilateral AUKUS menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi Australia kalah dengan kepentingan keamanan, karena merasa terancam dengan agresifitas China sehingga dimana mulai merasa terganggu kepentingannya. Selain itu dorongan munculnya AUKUS dapat dimungkinkan karena ketidakmampuan nyata ASEAN dalam merespons secara efektif perubahan lingkungan geopolitik yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik. AUKUS merupakan tanggapan terhadap modernisasi alat perang militer China, dimana ASEAN belum mampu menghadapinya dan memberikan posisi yang seimbang. Ini merupakan “wake up call” bagi ASEAN dalam menghadapi tantangan ke depan untuk menjaga keamanan regional dan tetap menjaga momentum perekonomiannya, melalui kebijakan geoekonominya secara hati-hati. Masalah ke depan masih dihadapi oleh ASEAN, karena respon setiap negara anggota yang berbeda-beda dalam menghadapi pakta trilateral AUKUS ini. Hal ini menunjukkan belum adanya kesatuan dan kesamaan pemikiran yang kokoh di tubuh ASEAN sendiri.

REFERENCES

- Ambarwati and Wijatmadja, S. (2016) *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Intrans Publishing.
- Anh, T. (2021) ‘Vietnam Spells Out Stance on AUKUS’, *Hanoi Times*, 23 September. Available at: <https://hanoitimes.vn/vietnamspells-out-stance-on-aucus-318802.html>.
- Blackwill, R. and Harris, J. M. (2016) *War by other means*, Harvard University Press. Cambridge: Harvard University Press.

- Chatys, M. (2021) 'Vietnam and Japan Partners Amid Superpower Rivalry', *FULCRUM*, 1 October. Available at: <https://fulcrum.sg/vietnam-and-japan-partners-amid-superpower-rivalry/>.
- Choong, W. and Storey, I. (2021) *Southeast Asian Responses to AUKUS: Arms Racing, Non-Proliferation and Regional Stability, Perspective*.
- Creswell, J. W. (2014) *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. 4th ed., SAGE Publications, Inc. 4th ed. California 91320: SAGE Publications, Inc.
- Delanova, M. O. (2021) 'Dampak Pakta Pertahanan Trilateral Aukus Terhadap Kondisi Regional Indo-Pasifik', *Jurnal Dinamika Global*, 6(02), pp. 259–285. doi: 10.36859/jdg.v6i2.408.
- Department of Foreign Affairs of Philippines (2021) 'Statement of the Honorable Teodoro L. Locsin, JR. Secretary of Foreign Affairs On the Australia-United Kingdom-United States (AUKUS) Enhanced Trilateral Security Partnership', *Dfa.Gov.Ph*. Available at: <https://dfa.gov.ph/dfa-news/statements-and-advisories/update/29484-statement-of-foreign-affairs-teodoro-l-locsin-jr-on-the-australia-united-kingdom-united-states-aukus-enhanced-trilateral-security-partnership>.
- Djalal, D. P. (2021a) 'ASEAN responses to AUKUS security dynamic', *East Asia Forum Quarterly*. Available at: <https://www.eastasiaforum.org/2021/11/28/asean-responses-to-aukus-security-dynamic/>.
- Djalal, D. P. (2021b) 'Can Biden bring peace to Southeast Asia?', *Asia Research Institute, NUS*. Available at: <https://ari.nus.edu.sg/app-essay-dino-djalal/>.
- Edel, C. (2021) 'China Has Only Itself to Blame for AUKUS', *foreignpolicy.com*, 24 September. Available at: <https://foreignpolicy.com/2021/09/24/china-aukus-submarines-defense/>.
- Fukuyama, F. (2006) *The end of history and the last man*. Reissue ed, Free Press. Reissue ed. Stanford: Free Press.
- Gita-Carlos, R. A. (2021) 'Duterte "concerned" over AUKUS nuclear submarine deal', *Philippine News Agency*. Available at: <https://www.pna.gov.ph/articles/1154907>.
- Global Times (2021a) 'Afghan abandonment a lesson for Taiwan's DPP', *The Global Times*. Available at: <https://www.globaltimes.cn/page/202108/1231636.shtml>.
- Global Times (2021b) 'AUKUS to bring "nuclear-powered submarine fever" across globe: Global Times editorial', *Global Times*. Available at: <https://www.globaltimes.cn/page/202109/1234459.shtml>.
- Golley, J. et al. (2016) 'Goeconomic Brief # 1 — Context and Concepts'. Australian National University Public Policy and Societal Impact Hub.
- Hadiwinata, B. S. (2017) 'Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektif', *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*, p. 22.
- Hirschman, A. O. (1981) *National Power and the Structure of Foreign Trade*. Expanded e, University of California Press. Expanded e. California: University of California Press. doi: 10.2307/3017772.
- Huntington, S. P. (1993) 'Why International Primacy Matters', *International Security*, 17(4), pp. 68–83. Available at: <http://www.jstor.org/stable/2539022>.
- IISS (2021) *The Military Balance 2021*. 1st Editio, Routledge. 1st Editio. The International Institute for Strategic Studies (IISS).
- Julienne, M. (2021) 'AUKUS Rocks the Boat in the Indo-Pacific: And It's Not Good News', *Editoriaux De L'ifri*, pp. 1–5.
- Kemlu RI (2021) *Statement on Australia's Nuclear-powered Submarines Program*. Available at: https://kemlu.go.id/portal/en/read/2937/siaran_pers/statement-on-australias-nuclear-powered-submarines-program.
- Keohane, R. O. and Nye, J. S. (1977) *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Michigan: Little, Brown.
- Luttwak, E. N. (1990) 'From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce', *The National Interest*, Summer(20), pp. 17–23. Available at: <http://www.jstor.org/stable/42894676>.
- Luttwak, E. N. (1993) *The Endangered American Dream: How to stop the United States from becoming a third-world country and how to win the geo-economic struggle for industrial supremacy*, Simon & Schuster. New York.
- Mastro, O. S. and Cooper, Z. (2021) *In Defence of AUKUS, The Interpreter - Lowy Institute*. Available at: <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/defence-aukus>.
- Melfianora (2019) *Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur, OSF*. Available at: <https://osf.io/efmc2/#/>.
- Merriam-Webster (2022) *geo-economics noun, Merriam-Webster Dictionary*. Available at: <https://www.merriamwebster.com/dictionary/geo-economics> (Accessed: 19 April 2022).
- Muntasyir, M. B., Panji, M. and Santoso, T. (2022) 'SOUTHEAST ASIA'S GEOPOLITICAL DYNAMICS IN', *Jurnal Hubungan Internasional LINO*, 2(1), pp. 31–43.
- Nepomuceno, P. (2021) 'Australia has right to improve sub defense capability: Lorenzana', *Philippine News Agency*, 17 September. Available at: <https://www.pna.gov.ph/articles/1153864>.
- Phua, A. T. (2021) 'AUKUS: ASEAN's Hesitant Response', *Rsis*, 29 October. Available at: <https://www.rsis.edu.sg/rsispublication/rsis/aukus-aseans-hesitant-response/#.Ygd3mN9BzIU>.

- Rajak, R. (2019) 'Warships in South China Sea will invite conflict, says Dr M', *Malay Mail*, 21 October. Available at: <https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/10/21/warships-in-south-china-sea-will-invite-conflict-says-dr-m/1802234>.
- Scholvin, S. and Wigell, M. (2018) *Geo-Economics As Concept and Practice in International Relations*, *FIIA Working Paper*. Available at: <https://www.researchgate.net/publication/324602603%0AGeo-economics>.
- Sheng, Y. (2021) 'AUKUS deal to continue causing repercussions in transatlantic ties', *Global Times*, 17 June. Available at: <https://www.globaltimes.cn/page/202109/1234764.shtml>.
- Shirodkar, R. (2021) 'Malaysia Says AUKUS Alliance May Lead to Arms Race, Provocation', *Bloomberg*. Available at: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-18/malaysia-says-aukus-alliance-may-lead-to-arms-race-provocation>.
- Singapore Government Agency (2021) 'Prime Minister Lee Hsien Loong's Telephone Call with Australian Prime Minister Scott Morrison, 16 September 2021', *Mfa.Gov.Sg*. Available at: <https://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcriptsand-Photos/2021/09/20210916-PM-Call-With-Scott-Morrison>.
- Storey, I. (2020) 'Malaysia and the South China Sea Dispute: Policy Continuity amid Domestic Political Change', *ISEAS-Yusof Ishak Institute*, 1(2020), p. 10.
- Wigell, M. (2016) 'Conceptualizing regional powers' geoeconomic strategies: neo-imperialism, neo-mercantilism, hegemony, and liberal institutionalism', *Asia Europe Journal*, 14(2), pp. 135–151. doi: 10.1007/s10308-015-0442-x.
- World Economic Forum (2016) *The Age of Economic Coercion: How Geo-politics is Disrupting Supply Chains, Financial Systems, Energy Markets, Trade and the Internet*. Available at: www.weforum.org.
- Zambelli, G. (2021) 'AUKUS Effect : New Paths for International Trade ?', *ExportPlanning*, 29 September. Available at: <https://www.exportplanning.com/en/magazine/article/2021/09/29/aukus-effect-new-paths-for-international-trade/>.

LAMPIRAN 2
ARTIKEL ILMIAH DALAM *INTERNATIONAL PROCEEDINGS*
(STATUS TERBIT)

International Conference on Education Innovation and Social Science (ICEISS)

**INDONESIA'S POLICY ANALYSIS OF THE AUKUS TRILATERAL
DEFENSE PACT**

Posma Sariguna Johnson Kennedy¹, Yudi Sutrasna², Haetami³

^{1,2,3} Republic of Indonesia Defense University

¹posmahutasoit@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the direction of the Indonesian government's policy in responding to the AUKUS (Australia-United Kingdom-United States) trilateral defense pact agreement and its relationship to the China-ASEAN conflict in the South China Sea based on the free and active policy adopted by Indonesia. The research method in this study uses a fully qualitative approach. The type of data used in this research is secondary, from various scientific articles and related news. ASEAN has become divided in addressing Australia's nuclear-powered submarine program together with the AUKUS Alliance. Countries give different reactions, some support, oppose, or observe. Responding to this, it becomes a challenge for Indonesia to continue to play an active role in escalating tensions between AUKUS and China, which can lead to military conflict and even nuclear war in the Indo-Pacific region. With free and active politics, Indonesia should be able to play the role. Position Indonesia is not included in the vortex of blocks or influences from superpower countries competing for influence/hegemony, especially in the Asia Pacific Region.

Keywords: AUKUS, Australia, China, Indonesia, United Kingdom, United States.

1. Introduction

As a neighbouring country to Australia, which is also involved in the South China Sea (SCS) conflict, Indonesia's geographical location puts Indonesia in a vortex of potential conflict between AUKUS (Australia - United Kingdom - United States trilateral defense pact) and the People's Republic of China (Putro, 2021). "It makes Indonesia very wary that AUKUS will significantly increase power projection in the Indo-Pacific. Indonesia takes a position to emphasize the obligation of all parties to maintain peace and security through respect for applicable international law" (Delanova, 2021). The Indonesia Director-General of Asia-Pacific and Africa, A.K. Jailani, stated that: "There are logical reasons for Indonesia to be worried because the actions taken by Australia will change the geopolitical situation in the region. It will be a destabilizing factor. Because there is no such thing as the acquisition of a nuclear-powered submarine without sparking the possibility of a nuclear arms race." (FPCI, 2021)

Indonesia will be affected because all nuclear submarines and Australian military assets will pass through Indonesian territory to join its allies. "Indonesia expressed concern over the deal, warning that it could lead to an arms race. Indonesian Ministry of Foreign Affairs said they were deeply concerned about the continued arms race and power projection in the region and asked Canberra to maintain its commitment to regional peace and stability". (Star, 2021; Wikipedia, 2021)

The Indonesia Maritime Security Agency (Bakamla) said the formation of the AUKUS alliance consisting of Australia–the United Kingdom–United States indicates a potential signal for increased escalation in the South China Sea (SCS). It also has an impact on Indonesia. The direct impact can be in the form of many military forces from non-claimant countries in the SCS. Then, it also can increase the dynamics of international relations related to the SCS. The direct impact can be in the form of many military forces from non-claimant countries in the South China Sea. In addition, the contestation at sea will encourage the countries involved to increase their

war capabilities, thereby increasing the potential for war to break out. Generally, conflicts between countries encourage nationalism, resulting in horizontal conflicts between people (Prakoso, 2021).

Based on the explanation above, this study aims to analyze Indonesia's best attitude in responding to the AUKUS trilateral defense pact because it impacts countries in the strategic environment of the South China Sea region (SCS), especially Indonesia as the closest neighboring country.

2. Method

The research method in this paper uses a fully literature study. The type of data used in this research is secondary and comes from various scientific articles and related news and literature related to defense and security policies. In collecting data, researchers used library techniques to provide information about the balance of power situation of each country involved in the South China Sea conflict between China, the AUKUS alliance, Indonesia, and other indirectly involved countries. After conducting a literature study, the researcher tried to conclude Indonesia's position towards Australia, the United Kingdom, and United States alliances (AUKUS).

The approach used uses various political theories and international relations, including the theory of neorealism and free and active international political policies from Indonesia. The perspective of neorealism theory is used to analyze Indonesia's position on the dynamics that occur as a bridge for researchers to parse and analyze problems more deeply. Deductive research is an option to find a constellation of defense and security policy factors that encourage and explain Indonesia's position and attitude at the regional and global levels (Arikunto, 2010). (Perdana et al., 2021).

3. Results and Discussion Neorealism Theory and Security Dilemma

The theory of neorealism was born from the overhaul of classical realist thoughts such as E.H. Carr, Hans Morgenthau, and Reinhold Niebuhr. Neorealism has the basis that the international structure is essentially anarchy that does not have a clear supranational power in governing countries. Coupled with changes in the goals of each country that are never fixed (Mearsheimer, 2007). the rationale for the current world condition is that a country can never predict the will of another country in the future. Lack of trust in other countries causes each country to be busy strengthening their country's security to survive. Increasing the security of each country is hoped to prevent the desire to dominate the territory of other countries and create a balance of power. Although including the development of the theory of realism, neorealism has several differences from one another. Realists argue that cooperation between countries is like a figment because each country is busy only to fulfill its power domestically. In contrast, neorealism does not deny that there are opportunities for inter-state cooperation to occur. However, they view that cooperating states will always seek to maximize their relative power and maintain their autonomy (Jackson & Sorensen, 2013). Neorealism views communication between countries through an anarchic international system, which means an international system that does not have a leader and does not have regulations to regulate the actions of a country. With an anarchic international system, governmental and non-governmental actors must be able to adapt to all conditions. Due to the absence of a rule in the international system, actors are more concerned with the survival of their own country and focus on improving security. (Tawakal, 2022)

The concept of a security dilemma can be interpreted as a phenomenon of action and reaction between several countries where the actions of a country to increase its security will impact or be considered to weaken the security of other countries (Jervis, 1978). Balance of power can occur if the balance between offense and defense can be met. If offense dominates, the security dilemma will increase, which will result in other countries competing to improve the security of their respective countries or often called the arms race. However, an arms race can be prevented if the defense is more dominant than the offense (Glaser & Kauffman, 1998). The offensive-defense theory provides a new view of international politics which believes that war can be prevented when a country's defense power is considered to outperform the offense power of the country around its region. The compatibility or incompatibility of ideologies between countries can lead to misunderstandings that lead to conflict. It is prone to occur in relations between countries. The actors will try to prevent the conflict by increasing state security. In this case, it is included in the security dilemma between countries, which often leads to the occurrence of an arms race (Roe, 1999). This incident is based on fear and mutual trust that another country will pose a threat to its national security one day. Moreover, when the country feels the need to increase the security of their country in order to prevent conflict. (Tawakal, 2022)

Each actor at the international level will mutually achieve their respective national interests so that the strategic environment becomes an external factor that influences the defense and security policy. The strategic environment can be scanned through various dimensions. Bando stated the dimensions of security, economy, politics, social, and. The nature of the strategic environment is challenging because of the consequences of unique decisions and performance requirements. According to Owen Jacobs, the strategic environment has VUCA characteristics: volatile, full of uncertainty, complexity, and ambiguity. Volatility is the nature of the strategic environment that is changing so rapidly. When the nature of change so quickly gives birth to the nature

of uncertainty in the strategic environment. The relationship between elements in the strategic environment is complex. Due to ambiguity, planning and decision-making are becoming increasingly difficult in a strategic environment (Putra & Hakim, 2016). (Pangestu et al., 2021)

Geographical Conditions of Indonesia (Perdana et al., 2021) Indonesia, as an archipelagic country, by the provisions of the United Nations Convention On The Law of the Sea (UNCLOS, 1982), has provided three sea routes: Through the Indian Ocean-Sunda Strait-South China Sea; Through the Makassar Strait-Lombok Strait; and Through the Indian Ocean - Banda Sea - Maluku Sea - Pacific Ocean. Indonesian waters act as a world link between East Asia, the Pacific Ocean, the Indian Ocean, Africa, and Europe. Indonesia's position is also a crossing point between the Pacific Ocean, Indian Ocean, the Asian continent, and Australia; even in the ASEAN region, two-thirds of its territory is Indonesian waters (Yanti & Aviolita, 2020). Because the economic interests of the West and the East pass through Indonesian waters, it is fitting for Indonesia to become a major player in the core area of world maritime traffic.

Through the ratification of the UNCLOS agreement, the Indonesian Republic Government also converted the pact with Law No. 17 of 1985. Which later gave birth to the International Law of the Sea in 1994. Through this regulation, Indonesia has the right to have sovereign rights in utilizing natural resources that enter Indonesia's marine area. Article 49 of the 1982 UNCLOS states that an archipelagic state's sovereignty includes the waters enclosed by the baseline and the airspace above it and the seabed and land below it.

Bueger in Prasetyo et al. (2021) convey a defense perspective in seeing the condition of Indonesia as an archipelagic state that has the potential to get threats from strategic funnels (choke points control). Because of that, logically, the ocean media becomes the centre of gravity of Indonesia's defense which can expressly realize complete sea control. The condition of Indonesian waters, both in terms of geopolitics, geostrategy, and economy, has a vital role for countries in the Asia Pacific region and, more broadly, globally. This condition requires Indonesia to be able to represent its maritime defenses through the role of the Indonesian Army (TNI), which is ready to tackle various possibilities in chokepoints control.

The dynamics in the international region provide a reaction for each country in taking their respective policies. The neorealism perspective appears to have occurred in a phenomenon of the AUKUS alliance in a series of conflicts in the South China Sea, both in Indonesia, Australia, China, and other countries involved and regional countries around them. Indonesia's position in the South China Sea conflict is also based on national interests, the principle of being free and active, trying to be as neutral as possible, and helping to maintain peace without being squeezed between the great powers.

If viewed from the perspective of neorealism, Indonesia is required to have a more realistic view that the strength of a country is the accumulation of all resources that can influence and control other countries in the international system. It includes geographical conditions, Indonesia's military posture, and what political steps Indonesia must take. As a country that adheres to a free and active foreign policy and has a national interest, Indonesia must be able to play its position in responding to the AUKUS Alliance and China.

Indonesia has a vital role in geopolitics, geostrategy, and economy. Not only for countries in the Asia Pacific region but also globally more broadly. This condition requires Indonesia to represent its maritime defenses through the role of the TNI, which is ready to tackle various possibilities in chokepoints control. A proportional and modern Indonesian military posture continues to be pursued through the Minimum Essential Force (MEF). Indonesia's achievement in the MEF is still far from the target set. It shows that the modernization of the defense equipment system has not been maximized to deal with dynamics and conflicts in the defense sector in the international environment.

Therefore, Indonesia is obliged to take a strategic political position and attitude in responding to the presence of the AUKUS Alliance. Indonesia is also expected to be able to diplomacy and embrace ASEAN countries to produce a joint statement that could limit the AUKUS alliance to create a controversial nuclearpowered submarine. The principle of freedom and activity is a limitation for Indonesia not to be biased towards one party because the bias that is born will certainly damage Indonesia's strategic order and conflict with national interests. (Perdana et al., 2021)

Indonesia as the World Maritime Axis

The World Maritime Axis is based on Indonesia's awareness of a shift in the world's geo-economic centre of gravity to the east. It looks at the geographical condition of Indonesia, which is between the continents of Asia and Australia, the Pacific and Indian Oceans, and the Southeast Asia region. In addition, as a country in the "middle" of the road, Indonesia has 4 (four) of the ten most strategic locations globally, namely the Malacca Strait, Sunda Strait, Lombok Strait, and the Makassar Strait (Inkindo Jakarta, 2016). These four locations have the potential to become centres of world industrial, trade, and maritime activities. Therefore, Indonesia has great potential to become the World Maritime Axis. It realizes its ambition as a maritime axis, and there are five main pillars that Indonesia needs to do (Portal, 2019). The five pillars are maritime culture, maritime economy,

maritime connectivity, maritime diplomacy, and maritime security. When viewed from the contents of the five pillars, it can say that the World Maritime Axis Doctrine is a real strategy for realizing Dynamic Equilibrium. (Pangestu et al., 2021)

To respond to the conflictual tendencies in the Indo-Pacific region, Indonesia initiated a concept called Dynamic Equilibrium due to the presence of two new powers. The Natalegawa Doctrine has been officially used by Indonesia since 2011, as stated in the annual statement speech of the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia (Ministry R.I., 2011). Indonesia Foreign Minister Marty Natalegawa (President Soesilo Bambang Yudhoyono era) issued a dynamic equilibrium policy doctrine. The doctrine of dynamic equilibrium can be said to be a free and active principle raised to the regional level. Natalegawa defines "Dynamic Equilibrium" as harmony in cooperation between countries that interact peacefully and create a sense of mutual benefit without a single dominant power in the region (Sutiono et al., 2019). Natalegawa stated, "Dynamic equilibrium is a condition in which there is no single dominant power in the region. Not because of political blocs but rather due to a new type of international relations emphasizing mutual security, common prosperity, and joint stability" (Ministry R.I., 2011). He describes three challenges faced in the Indo-Pacific region to achieve peace and stability: First, there is a trust deficit; second, there are still unresolved territorial claims; and Third, managing the impact of changes in the Indo-Pacific region (Natalegawa, 2013). (Pangestu et al., 2021)

Indonesia's Factual Position

Before analyzing further, it is necessary to know in advance Indonesia's factual position towards AUKUS and China. A few days before the AUKUS trilateral defense pact was agreed upon, Defense Minister Prabowo Subianto and Foreign Minister Retno Marsudi held a bilateral meeting. The meeting with the Australian Minister of Defense (Peter Dutton) and the Australian Minister of Foreign Affairs (Marise Payne) in Jakarta on September 9, 2021. During the meeting, Indonesia and Australia agreed on several points of cooperation in the military sector. Namely the signing of the MoU on Countering Terrorism and Violent Extremism, the MoU on Cyber Cooperation and Emerging Cyber Technology, and an agreement to conduct joint exercises between the TNI and the Australian Defense Force (ADF). In addition, Australia also donated 15 Armored Personnel Carrier (APC) tactical vehicles for the TNI. After the meeting, on September 16, 2021, Defense Minister Prabowo Subianto attended Defense and Security Equipment International, a defense industry exhibition held in London, England. After attending the exhibition, Defense Minister Prabowo Subianto then held a bilateral meeting with the Secretary of State for Defense, Ben Wallace. During the bilateral meeting, Defense Minister Prabowo Subianto and Ben Wallace agreed on a license to manufacture British battleships in Indonesia, namely the Arrowhead 140 frigate, which PT. PAL plans to produce two ships in Surabaya and is targeted for completion in 2026. Previously, Indonesia agreed to increase military and maritime security cooperation activities with the US on October 19, 2020, through a bilateral agreement between Defense Minister Prabowo Subianto and US Secretary of Defense Mark Esper. Through the cooperation in the military sector agreed upon by Indonesia with Australia and the United Kingdom, Indonesia now has a good and strategic military relationship with the AUKUS country. On the other hand, military relations between Indonesia and China are in a bad state due to the dispute over the ownership of the North Natuna Sea. China has also claimed unilaterally part of its territory through the nine-dashed line. (Putro, 2021)

ASEAN Attitude

Since China launched its aggressiveness in the South China Sea (SCS), ASEAN countries have never actually had the same attitude towards SCS conflicts because each country has its interests. As the disputing states, Vietnam, the Philippines, Malaysia, and Indonesia have taken a stand against China nine-dash line. However, Brunei Darussalam and Cambodia show a passive attitude towards China. It is because Brunei Darussalam and Cambodia have economic dependence on China. On the other hand, a similar background underlies the attitude of the Philippines, which has close ties to the US. Therefore, ASEAN's joint attitude and multilateralism in responding to tensions between AUKUS and China are difficult to realize because ASEAN countries have their preferences and national interests. Indonesia can play an active role through multilateralism and ASEAN by having a common attitude to call for regional stability, security, and peace, especially because ASEAN is one of the important actors in the Indo-Pacific geographically between China and Australia. However, in this case, ASEAN multilateralism is likely to be difficult to realize, considering that ASEAN countries tend to have different attitudes. (Putro, 2021).

For example, regarding the AUKUS trilateral defense pact agreement, the Philippines became an ASEAN country that has supported the AUKUS agreement. "The Secretary of Foreign Affairs of the Philippines, Teodoro Locsin, on September 21, 2021, revealed that Asean member countries do not have the military power to maintain peace and security in Southeast Asia". The Philippines' attitude is understandable, considering that the

Philippines is a longtime ally of the US. In addition, the Philippines is one of the ASEAN countries in the SCS conflict whose territory is claimed by China the most, precisely in the Spratly Islands. (Anadolu, 2021)

Indonesian Political Attitude

ASEAN has become divided over Australia's nuclear-powered submarine program together with the AUKUS Alliance. The Philippines supported, while Malaysia watched, and Indonesia arguably gave the strongest rejection. Many questions arise in response to Indonesia's political stance. Apart from geographical proximity, a historical site might make these two countries intimate at a dinner table, but both keep a knife at their waist. There have been several bilateral events or conflicts in the diplomatic realm between Indonesia and Australia in recent years. Responding to this, it becomes a challenge for Indonesia to continue to play an active role in the escalation of tensions between AUKUS and China, which can lead to military conflict and even nuclear war in the Indo-Pacific region. As a country that adheres to a free and active foreign policy, Indonesia must be able to play its position. First, Indonesia must be fully committed to standing as a neutral country, not leaning left or right. Indonesia must be able to become a "bridge" from potential future conflicts that occur both in the north (South China Sea) and in the south (Nuclear Powered Submarines). Second, as one of the founders of ASEAN, Indonesia ideally can appear as a leader to then lobby countries in ASEAN. Indonesia must be able to move its diplomacy and convince ASEAN countries. To produce a joint statement that states that ASEAN collectively regrets and rejects the existence of the Australian military's nuclear-powered submarine program because it is feared that it will worsen the situation in the region. Third, if diplomatic steps in ASEAN are deadlocked, Indonesia must pay special attention to its defense budget sector. Thus, it is hoped that Indonesia will have a stronger influence and position. (Perdana et al., 2021)

Indonesia is not taking sides or choosing one over the other because of deep distrust. "Indonesia does not believe one great power is inherently superior economically, militarily, or morally. It is also supported throughout Indonesia's strategic history, namely that every major power has undermined Indonesia's domestic order or acted contrary to its strategic interests. With this experience, Indonesia has developed a vision of regional order focused on maintaining stability and legitimacy in the region, formulating strategies, and rejecting the hegemony of great powers in the region". These goals support Indonesia's foreign policy, most of which still has a negative view of regional dynamics. While such evasion strategies have worked well in Jakarta, they are no longer suitable for the new era of great power competition in the Indo-Pacific. (Laksmana, 2021)

Implementation of a Free and Active Foreign Policy (Putro, 2021)

The free-active Principle is a basic doctrine in viewing Indonesia's foreign policy. Mohammad Hatta conveyed this in his speech entitled "Paddling Between Two Corals" at the Central Indonesian National Committee (KNIP) on September 2, 1948. Indonesia's foreign policy must be active, not something that is expected in passive attitudes and actions. Indonesia must be able to become a subject that can determine its policies. Active here is an activity that shapes Indonesia to participate in international activities that lead to establishing a world order where it has three basic elements, namely independence, eternal peace, and social justice. Meanwhile, freedom is the freedom to enter into relations with any country to be free to determine their attitudes and decisions on global problems according to their respective values and benefits without binding themselves to a bloc. The principle of free and active was chosen to reject the demands of the left-wing of the Soviet Union and, on the other hand, the United States (US). With current conditions based on these principles, Indonesia will not take sides in any rivalry between the great powers, including the US and China in the Indo-Pacific. (Pangestu et al., 2021)

Indonesia's position in the South China Sea conflict is based on national interests, which involve the principle of free and active, which is held by trying to be as neutral as possible. According to Morgenthau, "National interest is the minimum ability of a country to protect and maintain political, military, and cultural identity from interference by other countries. The national interest of a country is not only influenced by internal conditions but also by the external environment" (Morgenthau, 1948). Nuechterlein defines national interest as a need and desire of one country about other countries from the external environment (Nuechterlein, 1976). There are several types of national interests; Nuechterlin said there are at least four national interests, namely the interests of defense, economy, international order, and ideology. Meanwhile, Sondermann explained that the national interest is related to matters in foreign policy, which will later become the country's attitude in responding to an international issue (Sondermann, 1960). (Pangestu et al., 2021)

As such a strategic country in its position and role in the South China Sea conflict, Indonesia needs to determine and examine the dynamics. However, some parties view that ongoing dialogue efforts by the ASEAN countries in dispute will be useless because the Chinese government does not recognize the 1982 UNCLOS. In the case of the AUKUS alliance, Indonesia is trying its best to avoid affiliation with the alliance to adhere to the

principles of foreign policy consistently. As an ASEAN member, Indonesia is expected to lead ASEAN through dialogue steps with the Chinese government. However, the concentration of Indonesia's diplomacy can be "split" due to the increasing tension in the Natuna Sea due to the presence of the Chinese Coast Guard. Indonesia has always prioritized placing itself as the epicentre in maintaining regional stability without having to reduce bilateral relations with America and China (Hamilton-Hart & McRae, 2015). Neorealist thinkers such as Mearsheimer say that international politics is not always converted through real war but also turns to the elements of security and defense competition (Fitryasa, 2011). (Perdana et al., 2021)

In responding to the difficulty of realizing a common attitude and ASEAN multilateralism, Indonesia needs to have its attitude in responding to the situation in the Indo-Pacific region based on the principle of a free and active foreign policy that Indonesia has so far adopted. However, a free and active foreign policy principle cannot be interpreted as neutrality without a clear attitude. Many parties claim that the tension between AUKUS and China can become an arms race with the potential to continue to grow, leading to a second edition of the cold war, especially because of the possession of nuclear weapons by both parties. Indonesia needs to respond to this as a warning signal to the prospects for security in the Indo-Pacific region. The presence of China and America as the two "big players" in the Indo-Pacific region will create satellite countries called proxies. Indonesia has close military relations with AUKUS countries and is technically in conflict with China in the South China Sea. It has great potential to side with AUKUS and become AUKUS's proxy, supported by Indonesia's recent diplomatic gestures, which tend to favour AUKUS. (Putro, 2021)

Regarding the principle of a free and active foreign policy, Indonesia needs to have an attitude that is by these principles but is oriented toward the national interest. Indonesia's position, which is involved in the SCS conflict and is in the midst of a vortex of tension and potential military conflict between AUKUS and SCS, makes Indonesia in the future unable to avoid the impact that tensions between the two parties can have. Therefore, the Indonesian government should not be neutral without acting but should be careful in making foreign policies that can certainly benefit Indonesia. If viewed from a profit perspective, Indonesia's proximity to the AUKUS countries in the military sector will benefit Indonesia in modernizing the TNI's defense equipment. Although this closeness makes Indonesia seem inclined to side with AUKUS and not carry out a free and active foreign policy, this choice is a rational choice for Indonesia. Considering that currently, Indonesia is still involved in a dispute in the North Natuna Sea with China as part of the SCS conflict, thus modernizing it. Against defense equipment and other defense elements is an important matter that needs the attention of the Government of Indonesia. A free and active foreign policy cannot be interpreted as neutrality without a clear attitude. So proximity to AUKUS can be interpreted as a political stance oriented toward national interests in the defense sector, not as an open partiality to one or another. One party, as the Philippines did, so that Indonesia does not label itself as a proxy for either party, both AUKUS, and China. Indonesia's proximity to AUKUS in the defense sector can go hand in hand with Indonesia's and China's current economic proximity. Indonesia will remain in a favourable bargaining position for economic cooperation in the future, considering that economic growth and development are one of the main programs. Government. (Putro, 2021)

In this case, Indonesia can take advantage of the two conflicting parties in the defense and economic fields simultaneously. It is the expression "rowing between two rocks," the main principle of a free and active foreign policy coined by Vice President Mohammad Hatta on September 2, 1948. Indonesia's attitude towards AUKUS and China can be an affirmation that foreign policy is indeed a foreign policy. Free and active is still relevant to the development of international politics, which is far different from the previous cold war era because it can still be applied with an orientation to Indonesia's national interests. The Indonesian government needs to take diplomatic steps by conducting intense communication and embracing parties at the center of the conflict, both AUKUS, China, and even ASEAN, while maintaining stability, security, and peace in the Indo-Pacific region and a commitment to implementing the prevention of nuclear war as the main narrative. It will become important in policymaking by the Government of Indonesia in the future. In this case, the main objective of Indonesia's foreign policy is oriented toward the national interest. In practice, it still shows an image of Indonesia that is not biased or leans more towards one particular party. (Putro, 2021)

Indonesia's Strategy toward ASEAN

The tension between AUKUS and China provides a great opportunity for Indonesia to prioritize the ASEAN Spirit to play a role in balancing conflicting forces. The impact of conflict, if it becomes an open war, the impact of conflict will eventually be felt by Indonesia and all ASEAN members in the Regional Region. A united ASEAN led by Indonesia becomes the best chance to defuse the tension that is currently going on. (Prakoso, 2021)

Indonesia must maintain and promote a free and active foreign policy. Indonesia will become the Chair of ASEAN in 2023, providing an opportunity and must be able to play a role in the Regional Region. In responding

to the formation of AUKUS, it prioritizes the togetherness of ASEAN countries. Prioritizing the interests of ASEAN reduces the interests of only certain countries. Indonesia and ASEAN maintain and promote The Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty (SEANWFZ) or the Bangkok Treaty of 1995. The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone or the Bangkok Treaty, commonly abbreviated as SEANWFZ. It is an agreement between Southeast Asian countries consisting of Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam to secure the ASEAN region from nuclear. (Prakoso, 2021)

It is prioritizing the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. The ASEAN Outlook on Indo-Pacific is an affirmation of ASEAN's position in maintaining peace, security, stability, and prosperity in the Indo-Pacific region, which includes the Asia Pacific and Indian Oceans. This AOIP puts forward an open and inclusive approach to dialogue and cooperation in ASEAN priority areas, namely maritime, economics, connectivity, and the achievement of the SDGs, making ASEAN a bargaining chip from the interests of countries outside the region with interests in the ASEAN region. (Prakoso, 2021; Pangestu et al., 2021)

After carrying out a series of processes, diplomacy, and negotiations on organizational dynamics, the Indo-Pacific concept of Indonesia was finally trusted and approved by ASEAN. ASEAN adopted the concept, so it was named the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, agreed at the ASEAN Summit in Bangkok on June 22, 2019. The agreement shows that Indonesia's diplomatic strategy in conveying a view has been successful. It is important for us that Indonesia has a central role in maintaining regional stability, world peace, and maintaining the integrity of ASEAN. (Pangestu et al., 2021)

4. Conclusion

In establishing the AUKUS Pact between Australia, the United Kingdom and the United States, which is increasingly heating the Indo-Pacific region, especially with China, Indonesia must be able to diplomacy and place itself in the best position between the two great powers. With Indonesia's free and active politics, then Indonesia should show the direction and implementation of foreign relations that respect sovereignty and independence in determining Indonesia's domestic and foreign policies. Indonesia should be able to play the role and position. It should be able to place it in the competition for influence between the United States and China in the Asia Pacific. Not take sides or enter the bloc of the two competing countries. Indonesia can increase economic benefits that encourage increased investment and trade from both the United States and China.

The increasing competition for influence in the Asia Pacific between the United States and China should not reduce or change Indonesia's free and active foreign policy. The position must prove that Indonesia is not trapped in the power of China or the United States without compromising Indonesia's integrity and independence to avoid the tug of war of interest. If they are not good at maintaining the same attitude and distance, they will place Indonesia in the block or control of the United States and China. The trade, investment and economic relations that continue to increase between Indonesia and the United States and China are the main consideration factors for Indonesia to maintain good relations with the two countries competing for hegemony in the Asia and Pacific region.

For further research, it is recommended to use quantitative research methods to determine Indonesia's policy in responding to cooperation with AUKUS member countries and China as rivals in the economic field that benefit Indonesia.

5. Acknowledgement

We thank the Institute for Research and Community Service (LPPM) at the Republic of Indonesian Defense University (RIDU) and other parties who have helped.

6. References

- Anadolu. (2021). Filipina Dukung Aukus. Koran Jakarta p.4, 22 September 2021.
- Arikunto S. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Delanova, M.O. (2021). Dampak Pakta Pertahanan Trilateral Aukus Terhadap Kondisi Regional Indo-Pasifik. *Jurnal Dinamika Global*, 6(02), 259-285. <https://doi.org/10.36859/jdg.v6i2.408>
- Fitriyasa, A., 2011. Kerjasama militer Vietnam dengan Amerika Serikat dalam mengelola ancaman keamanan Laut Cina Selatan.

- FPCI. (2021). AUKUS: Responses from Southeast Asia. Jakarta: Foreign Policy Community Indonesia, 1 Oktober 2021.
- Glaser C., and Kauffman C. (1998). What is the offense-defense balance and can we measure it? *International Security*, 44-82.
- Hamilton-Hart N. and McRae D. (2015). Indonesia: balancing the United States and China, aiming for independence. *United States Studies Centre at the University of Sydney*, p.14. https://doi.org/10.1163/2468-1733_shafr_SIM210040027.
- Inkindo Jakarta. (2016). Pembangunan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. In I.D. Jackson R., and Sorensen, G. (2013). *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* (5th ed.). United Kingdom: Oxford University Press.
- Jervis R. (1978). Cooperation under Security Dilemma. *World Politics*, Vol. 30(2), 167-214.
- Jakarta, *Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia*. DKI Jakarta: Inkindo DKI Jakarta.
- Laksamana E.A. (2021). Indonesia Unprepared as Great Powers Clash in Indo-Pacific. FP Foreignpolicy August 26, 2021, Accessed from: https://foreignpolicy.com/2021/08/26/indonesia-china-us-geopolitics/?fbclid=IwAR1ZZOnWr00OoA9COzYyXyHruoeiktdn4nyV2z_rSt0Rfri6HvX6YBVhEW
- Mearsheimer J. J. (2007). Structural Realism. *International Relations Theories: Discipline and Diversity*, 83.
- Ministry R.I. (2011). *Pidato Pernyataan Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia*, Dr. R.M. Marty M. Natalegawa. Jakarta: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia.
- Morgenthau J. (1948). *Politics among nations: The Struggle for power and peace*. New York: Alfred A.Knopf.
- Natalegawa, R. M. (2013). *An Indonesian Perspective on the Indo-Pacific*. Washington DC: CSIS
- Nuechterlein, D. E. (1976). National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making. *British Journal of International Studies*.
- Pangestu, L. G., Hikmawan, R., and Fathun, L. M. (2021). Strategi Indonesia Mewujudkan ASEAN Outlook On Indo-Pacific (AOIP) untuk Menciptakan Stabilitas di Kawasan Indo-Pasifik. *Proyeksi: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 26 (1), 1-22.
- Perdana D.B., Ramasandi R.D., and Setiawan M.E. (2021). Posisi Indonesia terhadap Aliansi Amerika, Inggris dan Australia (AUKUS) dalam Perspektif Neorealisme. *Jurnal Defendonesia*, Vol. 5(2), 33-42.
- Portal. (2019). Indonesia Poros Maritim Dunia. Accessed May 30, 2020 from *Portal Informasi Indonesia*: <https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/indonesia-poros-maritim-dunia>
- Prasetyo Y., Saputra A.F., and Supartono S. (2021). Operasi penyelenggaraan peperangan kepulauan sebagai strategi pertahanan laut di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8(3), 158-168.
- Putra I. N., and Hakim A. (2016). Analisa peluang dan ancaman keamanan maritim Indonesia sebagai dampak perkembangan lingkungan strategis. *Asrojournal-STTAL* Vol.6.
- Prakoso L.Y. (2021). AUKUS Peluang dan Kendala bagi Indonesia. *Jurnal Maritim Indonesia*. Vol. 9(3), 215222.
- Putro Y.B.Y.P. (2021). Menyikapi Potensi Eskalasi Konflik Di Kawasan Indo-Pasifik Sebagai Dampak Dari Kesepakatan Aukus. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Accessed from: <https://setkab.go.id/nyikapi-potensi-eskalasi-konflik-di-kawasan-indo-pasifik-sebagai-dampak-darikesepakatan-aukus/>
- Roe P. (1999). The Intrastate Security Dilemma: Ethnic Conflict as a Tragedy?. *Journal of Peace Research*, Vol. 36(2), 183-202.
- Sondermann F. A. (1960). *The concept of national interest*. USA: Prentice-Hall. Inc.
- Star. (2021). Indonesia warns against arms race after Australian nuclear sub pact". The Star 17 September 2021.
- Sutiono, Mahroza J., and Yusgiantoro P. (2019). Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Kawasan Asean Melalui Konsep Dynamic Equilibrium. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*.
- Tawakal A. (2022). Dinamika Keamanan Indo-Pasifik dan Uni Eropa Terkait Aliansi AUKUS. *Global Insight Journal*, Vol 07(01), 18-30.
- Wikipedia. (2021). AUKUS. Accessed from: <https://en.wikipedia.org/wiki?curid=68730481>. Downloaded date 02/04/2022.
- Yanti R., and Aviolita S. (2020). Judicial Review of Indonesia's Position as the First Archipelagic State to implement the Traffic Separation Scheme to Establish Maritime Safety and Security. *International Journal of Law and Political Sciences*, Vol. 14(12), 1176-1180.

LAMPIRAN 3
ARTIKEL ILMIAH DALAM INTERNATIONAL BOOKCHAPTER
(STATUS TERBIT)

Research Trends in MULTIDISCIPLINARY RESEARCH Volume – 38
Published By: AKINIK Publication

**AUKUS Trilateral Defense Pact:
Will There be War After the Pandemic is Over?**

Posma Sariguna Johnson Kennedy¹, Yudi Sutrasna², Haetami³

^{1,2,3} Universitas Pertahanan Indonesia, Jakarta, Indonesia, +628170260333, posmahutasoit@gmail.com

Abstract

This study wants to examine whether there is an opportunity for war in the Indo-Pacific region. The method used is the literature review. An optimistic view of regional peace is the basis of this analysis, even if there is a realistic thought. War will harm both parties. So, China and America themselves, and all countries are responsible for maintaining regional stability.

Keywords: AUKUS, War, Indo-Pacific, Australia, China, America

1. Introduction

At the international level, each country or actor aims to achieve each other's national interests. The strategic environment becomes an external factor that influences a country's defense and security policy. The strategic environment can be scanned through various dimensions, such as security, economics, politics, society, technology, Etc. Owen (Ling et al., 2010) reveals that "The strategic environment has VUCA characteristics, namely volatility, full of uncertainty, complexity, and ambiguity. Volatility is a rapidly changing nature of the strategic environment. When the nature of change so quickly gives birth to the nature of uncertainty in a strategic environment. The relationship between elements in the strategic environment is complex. Planning and decision making is becoming increasingly difficult in a strategic environment due to ambiguity" (Putra & Hakim, 2016; Siagian et al., 2021; Pangestu et al., 2021)

The strategic environmental situation in the Indo-Pacific region began to escalate, namely the competition between two superpower countries, China and the United States. ASEAN countries, including Australia, feel this. "What has been done by Australia is implementing a hedging strategy, namely playing two legs between the United States and China. This strategy has been implemented since the reign of Prime Minister John Howard in 1996" (Thomas, 2015). It was done to realize two equally important Australian interests, namely the continuity of the ANZUS alliance, which simultaneously maintains the existence of the United States in the region and accommodates China's development into the security architecture in the region. Asia-Pacific. The ANZUS Treaty was a security alliance between Australia and the United States in 1951. It is stated that the United States promised to help Australia (in a military context) if under attack by another country (Fraser, 2001). (Mas'udi, 2020)

The main reason hedging is done because Washington and Beijing will continue to have the same interests. "Australia supports this by becoming a third party that can unite them instead of being trapped in

bipolarity. Based on a survey conducted by the Lowy Institute in 2014, as many as 87% of Australians believe that Australia can maintain good relations with these two great countries” (Thomas, 2015). Both the United States and China have their respective superiorities. The United States is superior in military terms. No single country can even come close to the United States in this regard. It is the same with China. No single country can compete with China in terms of consumption, making it the largest market in the world. Moreover, China will get bigger, both in terms of population and economy, so both America and China need each other.

The realist view that states make their military strength or capacity their goal is a concrete idea that keeps repeating itself. Taking actions that will make the country weak or vulnerable will never be a rational choice (Antunes & Camisão, 2018). The state will be self-help and continue to strive to pursue power (Donnelly, 2005:29-33).(Asrudin, 2014).

Based on this realist view, Australians began to worry that their country could not anticipate an aggressive attack from China (Hurst, 2021). Rationally, the defense pact is felt to be indispensable to provide physical security for the state and as an effort to prevent China's actions from expanding external borders through their predatory actions (Ruggie, 1993). It shows Australia's efforts to prioritize security over the economy. This step departs from the norm of sovereignty, which guarantees the sovereign identity of the country (Wendt, 1992) above other interests. Despite the huge risk to Australia's economic conditions due to deteriorating relations with China. (Delanova, 2021)

The AUKUS Pact is “an agreement between Australia, the United Kingdom, and the United States regarding international security agreements. The pact includes cooperation in artificial intelligence, cyber, quantum, underwater systems, and remote attack capabilities”. The purpose of making this agreement is to balance China's military power, which is considered expanding and has the potential to endanger the Indo-Pacific region. (Tawakal, 2022) Thus, the AUKUS pact significantly improved Australia's military capabilities, making their military capabilities stronger and more respected in the region and no longer afraid of China's military capabilities (Mao, 2021).

The AUKUS Pact shows Australia's concern about a war in the Indo-Pacific region due to the ongoing escalation. This problem continues to heat up, in contrast to the COVID-19 pandemic, which has begun to decline. This study wants to examine whether there is an opportunity for war in the Indo-Pacific region. An optimistic view of regional peace is the basis of this analysis.

2. Literature Review

On September 15, 2021, Australia announced a new trilateral security pact in the region, which was carried out in collaboration with their traditional partners, namely the United Kingdom and the United States, under the name AUKUS (PM Australia, 2021; Secretary-General of the Indonesian Parliament, 2021). The name AUKUS is taken from the acronym of the three countries that initiated the agreement, namely Australia, the United Kingdom, and the United States (Tawakal, 2022). AUKUS is an alliance step taken by Australia to establish collective security. Collective security refers to applying the principle of one for all and all for one (Organski, 1958). So it can say that AUKUS functions as a collective defence agreement that protects its members (especially Australia) from direct security threats from China. This country is considered an aggressor. (Delanova, 2021)

Despite the joint announcement by Australian Prime Minister Scott Morrison, British Prime Minister Boris Johnson, and United States President Joe Biden did not name the other countries. The pact was suspected to be designed to counter China's influence in the Indo-Pacific region (Reuters, 2021). Some analysts have also characterized the alliance as a way to protect Taiwan from Chinese expansionism (The Guardian, 2021; The Independent, 2021). The formation of AUKUS is a surprising phenomenon for countries in the Indo-Pacific region. Even though the agreement was born from a traditional partnership bond that goes beyond calculating national interests between the three countries, AUKUS will be a decisive choice for the future of Australia and the Indo-Pacific region (Delanova, 2021).

The AUKUS agreement will help Australia build at least eight nuclear-powered submarines using US technology and expertise (Greene, 2021). Although it turned the country away from the contract for the supply of diesel-electric submarines from France, it caused the disappointment of President Emmanuel Macron. “Nuclear submarines have greater speed, stay underwater longer, and carry heavier loads than conventional submarines. Currently, only six countries have nuclear submarines, the five permanent members of the United Nations Security Council (China, France, Russia, the United Kingdom, and the United States) and India” (BBC, 2021a). America will supply enriched uranium to Australia to power submarines. Australia has agreed not to produce enriched uranium itself (Sanger et al., 2021). (Wikipedia, 2021)

Possession of this nuclear-powered submarine will allow Australia to carry out longer patrols to maintain the Indo-Pacific region's security condition, which is often disrupted by China's strong military presence in the region, which is considered expanding and potentially expanding endangering the Indo-Pacific region (Perry, 2021). “The agreement also covers key areas such as artificial intelligence, cyber warfare, underwater capabilities, and long-range attack capabilities. It also includes a nuclear component, possibly limited to the United States and the United Kingdom, of nuclear defence infrastructure” (Ward, 2021). “The agreement will focus on military capabilities, separating it from the Five Eyes intelligence-sharing alliance, which also includes New Zealand and Canada” (BBC, 2021). (Red Square, 2021)

For Australia, this close collaboration shows that they do depend on protection from the US. Not to mention they would lose strategic autonomy because, in the future, a truly independent military initiative of any scale would be impossible if America objected. Not to mention that this partnership will also make the trade relationship between Australia and China, as their most important market, even more complicated (Ott, 2021). Meanwhile, for the US and UK, AUKUS will be the best way to ensure their involvement in ensuring security conditions in a very influential region. (Delanova, 2021).

The establishment of AUKUS seems to have forgotten that the collective security it seeks to create requires coordination and willingness from other countries in the region. It is natural when the announcement of the agreement regarding this defence pact invites criticism and concern from other countries, which feel that they are minimally taking aggressive actions (Delanova, 2021). China criticized the AUKUS Pact's implementation, which could disrupt regional stability. The European Union also voiced their disapproval of the agreement because it is expected to impact the economy of their region, especially for the country of France (Tawakal, 2022).

3. Research Methods

The research method in this study uses a fully qualitative approach. The type of data used in this research is secondary and comes from various scientific articles and related news and literature related to defence and security policies.

4. Discussion

It is not easy to make war decisions in this modern era because many considerations must be considered and taken into account. Some of these factors are:

1. War must be detrimental to both parties, the loser, and the winner. There will be many resources to be prepared/expended and destroyed on both sides.
2. There is an attitude of mutual need in the economic relations between the United States and China so far.
3. China does not want to replace the United States' position as the region's ruler and the world.

According to Clausewitz (2009), “War must have a political purpose because war is only a means to achieve a goal”. War is about what goals are to be achieved after the war. In this case, the United States may have a strong political reason to go to war with China, namely maintaining its dominance in the

region or even throughout the world. For China, war is an arena for showing off between the new powers and the old rulers. However, what will remain if the two countries play a role. “The war between the two will only cause damage. Another side effect, which is no less important than the damage, is the destruction of the world economy because the United States and China are the two rulers of the global economy. A war between the two would only be a global catastrophe” (Mas'udi, 2020).

According to Thucydides, “Three things can cause a war to occur. The three things are money, fear, and honor”. In this case, the last two things have a significant role in encouraging both the United States and China to go to war with each other (Mas'udi, 2020) “:

- The United States considers it important to maintain its influence in the Asia-Pacific Region and fears China will seize the position.
- China feels that the presence of US military personnel in its backyard is a real threat to its sovereignty. As the most powerful country in the region, China does not want to be under the control of the United States.”

If these things can cause war between countries, then one of them can be a strong antidote to the occurrence of war. “Despite their fears and honor, both parties must realize how important the economic role exists in their relationship. Especially in this era of globalization, where everything is interconnected. Collaboration, partnership, machinability, and engagement are the language of this century, just as international competition was the language of the last century” (Henry, 2016). So, considering the economic dependence factor, the war between the United States and China will not bring benefits to anyone. (Mas'udi, 2020)

While visiting America in February 2012 as Vice President, President Xi stated that China emphasizes the "elements of non-conflict, non-confrontation, mutual respect, and mutually beneficial cooperation” (Xinbo, 2014). This statement reflects Beijing's honest desire to avoid the Thucydides Trap. The new pattern of relations between the great powers promoted by China is an effort to embrace the United States to manage the international system, so their relationship should be mutually beneficial. President Obama welcomed the idea at the time. China does not want to be the only “major power” in the world because becoming the world's ruler is neither easy nor cheap. According to Robert Sutter, “it is clear that no other power or coalition of forces is able or willing to bear the costs, risks, and commitments of the United States in maintaining regional stability and development for the common good” (Sutter, 2015).(Mas'udi, 2020)

However, judging from what China and America have done, especially in the Indo-Pacific region, they do not show any goodwill to be responsible for maintaining regional stability. Moreover, China's interests are only for business, nothing else.

5. Closing

The AUKUS Pact shows Australia's concern about a war in the Indo-Pacific region due to the ongoing escalation. The optimistic view needs to put forward the need to maintain regional peace, which gives why there is no need for war. War will harm both parties, both the loser and the winner. There is an attitude of mutual need in the economic relations between the United States and China so far. Moreover, China does not want to replace the position of the United States as the ruler of the world. For this reason, China and America themselves are responsible for maintaining regional stability and countries in the Indo-Pacific strategic environment, especially ASEAN.

References

- [1] Antunes, S., and Camisão, I. (2018). Introducing Realism in International Relations Theory. Accessed from: <https://www.eir.info/2018/02/27/introducing-realism-in-international-relationstheory/>

- [2] Asrudin, Azwar. (2014). Thomas Kuhn dan Teori Hubungan Internasional: Realisme sebagai Paradigma. *Indonesian Journal of International Studies (IJIS)*, Vol.1(2), 107-122.
- [3] BBC. (2021). Aukus: China denounces US-UK-Australia pact as irresponsible. *BBC News* 16 September 2021.
- [4] BBC. (2021a). Aukus: UK, US and Australia launch pact to counter China. *BBC News* 16 September 2021.
- [5] Clausewitz, GC (2009). *On War: The Complete Edition*. Ed. Colonel JJ Graham. United States: Wildside Press.
- [6] Delanova, MO (2021). The Impact of the Aukus Trilateral Defense Pact on the Indo-Pacific Regional Condition. *Journal of Global Dynamics*, Vol.6(02),259-285.
- [7] Donnelly, M. Paterson, C. Reus-Smit, & J. True. (2005). *Theories of International Relations* (edisi 3). New York: Palgrave Mcmillan.
- [8] Fraser M. (2001). An Australian Critique. *Australian Journal of International Affairs* Vol. 55(2), 225-234.
- [9] Greene A., Probyn A., Stephen D. (2021). "Australia to get nuclear-powered submarines, scrap \$90b plan to build French-designed subs". *ABC News* 15 September 2021.
- [10] Guardian. (2021). China vows to resist 'interference' as Taiwan welcomes support from Aukus allies. *The Guardian* 17-09-2021.
- [11] Henry K. (2016). Australia in the Asian Century. *Asia & The Pacific Studies*, Vol.3(2),132-139.
- [12] Hurst, D. (2021). Australians Fear Attack from China Almost as Much as Taiwanese Do, Survey Finds. Accessed from: The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2021/jul/09/australians-fearattack-from-china-almost-as-much-as-taiwanese-do-survey-finds>
- [13] Independent. (2021). Improving defence capabilities is key for Taiwan to line up with Aukus, say experts. *The Independent* 17-09-2021.
- [14] Ling, W., Jacobs, P., Hillhouse, M., Hasson, A., Thomas, C., Freese, T., Saxon, A. (2010). From Research to the Real World: Buprenorphine in the Decade of the Clinical Trials Network. *Journal of Substance Abuse Treatment*, 38, S53-S60.
- [15] Mao, F. (2021). Aukus: Australia's Big Gamble on the US over China. Accessed from: <https://www.bbc.com/news/world-australia-58635393>
- [16] Mas'ud SYF 2020. Analysis of the Australian Alliance's Dilemma. *Journal of PIR: Power in International Relations*, Vol.4(2), 190-200.
- [17] Organski, A. F. (1958). *World Politics*. New York: Alfred A. Knopf.
- [18] Ott, M. (2021). AUKUS and the Winds of Change in the IndoPacific. Accessed from *Wilson Center*: <https://www.wilsoncenter.org/blog-post/aukus-and-winds-changeindo-pacific>
- [19] Pangestu, LG, Hikmawan, R., and Fathun, LM (2021). Indonesia's Strategy to Realize the ASEAN Outlook On Indo-Pacific (AOIP) to Create Stability in the Indo-Pacific Region. *Projections: Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol.26(1), 1-22.
- [20] Perry, N. (2021). Nuclear submarine deal will reshape IndoPacific relations. Accessed from *AP News*: <https://apnews.com/article/technology-joe-biden-japan-new-zealandaustralia-c4fa14d44d37fd61e457560343aa0615>
- [21] PM Australia. (2021). Joint Leaders Statement on AUKUS. Accessed from *pm.gov.au*: <https://www.pm.gov.au/media/joint-leaders-statement-aukus>
- [22] Putra, I. N., & Hakim, A. (2016). Analisa Peluang dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia sebagai Dampak Perkembangan Lingkungan Strategis. *Asrojournal-STTAL* Vol.6.
- [23] Red Square. (2021). 21世紀國際詐騙案件AUKUS 影響到中國全球的戰略佈局?[21st Century International Fraud Case AUKUS Affects China's Global Strategic Layout?]. Red Square 123's blog 2021/09/21. Accessed from: <https://blog.udn.com/dff1baf6/168163598> Reuters. (2021). "Pact with U.S., Britain, will see Australia scrap French sub deal-media". *Reuters*, 16 September 2021.

- [24] Ruggie, J. G. (1993). Territoriality and Beyond: Problematizing Modernity in International Relations. *International Organization*, 47, 139-174.
- [25] Sanger D.E., Kanno-Youngs Z. (2021). "Biden Announces Defense Deal With Australia in a Bid to Counter China". The New York Times ISSN 0362-4331
- [26] Siagian B.D.O., Perwita A.A.B., Eko Hs R., Fitriati R., Ali Y., Pramono B. (2021). The Concept of Indonesian National Security System in Facing 21st Century Strategic Environment Dynamics. *Review of International Geographical Education*, Vol.11(8), 1232-1242.
- [27] Sutter R.G. (2015). *The United States and Asia*. USA: Rowman & Littlefield.
- [28] Tawakal A. (2022) Indo-Pacific and European Union Security Dynamics Regarding the AUKUS Alliance. *Global Insight Journal*, Vol.07(01),18-30.
- [29] Thomas, N. (2015). The Economics of Power Transitions: Australia between China and the United States. *Journal of Contemporary China*, Vol.24(95), 846-864.
- [30] Ward, Alexander. (2021). "Biden to announce joint deal with U.K. and Australia on advanced defense-tech sharing". *Politico*.
- [31] Wendt, A. (1992). Anarchy is what States Make of it: the Social Construction of Power Politics. *International Organization* Vol. 42(2).
- [32] Wikipedia. (2021). AUKUS. Accessed from: <https://en.wikipedia.org/wiki?curid=68730481>. Downloaded date 02/04/2022.
- [33] Xinbo W. (2014). Agenda for a New Great Power Relationship. *The Washington Quarterly*, Vol. 37(1), 65-78.

LAMPIRAN SPRIN PENELITIAN



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN RI

SURAT PERINTAH
NOMOR : SPRIN/1004/IV/2022

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan Penelitian Dosen Unhan RI, tentang Penelitian Dosen S1, S2, S3 dan D3 di masing-masing Fakultas Unhan RI TA. 2022, perlu dikeluarkan Surat Perintah;

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Daftar Susunan Personel dan Tata Kerja Universitas Pertahanan;
 2. Keputusan Rektor Unhan RI Nomor: KEP/298/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Program Kerja dan Anggaran Universitas Pertahanan TA. 2022;
 3. Keputusan Rektor Unhan RI Nomor: KEP/102/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Penetapan Dosen Peneliti Serta Jumlah Bantuan Dana Penelitian Pada Kegiatan Penelitian Internal Dosen Unhan RI TA. 2022.

DIPERINTAHKAN:

- Kepada :
- Nama :)
Pangkat/Gol/NIP/NRP :) sebagaimana tercantum dalam
Jabatan :) lampiran surat perintah ini
- Untuk :
1. Seterimanya surat perintah ini di samping tugas dan tanggung jawab jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai tim peneliti di masing-masing Fakultas dalam rangka kegiatan penelitian Dosen Unhan RI TA. 2022.
 2. Laporan kepada atasan masing-masing sebelum dan sesudah melaksanakan surat perintah ini.
 3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2022

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Republik Indonesia
Warek II Bidang Umum dan Keuangan,



Erwin Bambang Tetuko
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Rektor Unhan RI
2. Warek I, III dan IV Unhan RI
3. Kasatwas Unhan RI
4. Ka LPPM dan Ka LPPPM Unhan RI
5. Direktur Program Doktorat Unhan RI
6. Dekan FSP, FMP, FKN dan FTP Unhan RI
7. Dekan FFM, FKN, FMIPAM dan FTM Unhan RI
8. Dekan FLM Unhan RI
9. Karoum, Karo AK dan Karorenu Unhan RI.

DAFTAR NAMA TIM PENELITIAN DAN JUDUL PENELITIAN
 DOSEN FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN DAN FAKULTAS KEDOKTERAN MILITER UNHAN RI TA. 2022

NO	NAMA	PANGKAT/GOL/NRP/NIP	JABATAN		JUDUL
			STRUKTURAL/FUNGSIONAL	TIM	
1	2	3	4	5	6
1	1. Dr. Sulistiyanto, S.E., M.M., M.Sc., PSC	Laksda TNI (Purn)	Dosen Prodi MP FMP Unhan RI	Peneliti Utama	Pengelolaan Industri Pertahanan ASEAN dalam mendukung Dinamika Keamanan Kawasan Indo-Pasifik
	2. Dr. Susilo Adi Purwanto, S.E.M.Eng.Sc., CIQnR., CIQaR., IPU., CIPA	Mayjen TNI	Dekan FMP Unhan RI	Anggota	
	3. Dr. Drs. Much Muallim, M.Pd	Kolonel Cai/34135	Dosen Prodi MP FMP Unhan RI	Anggota	
2	1. Dr. Sri Sundari, S.E., M.M. (Ketua)	Kolonel Chb (K)/1910010560565	Dosen Prodi EP FMP Unhan RI	Peneliti Utama	Implementasi kebijakan Moneter Bank Indonesia pada Pengadaan Alutsista TNI
	2. Dr. Lukman Yudho P., S.IP., M.AP., CIQaR.	Kolonel Laut (E) 11427/P	Dosen Prodi SPL FSP Unhan RI	Anggota	
	3. Dr. Ivan Yulivan, S.E., M.M., M.Tr (Han)	Laksda TNI	Dosen Prodi EP FMP Unhan RI	Anggota	
	4. Munit Prasjo, S.I.P., M.Han	Brigjen TNI			
3	1. Dr. Edy Saplono, M.M	Kolonel (Purn)	Dosen Prodi MP FMP Unhan RI	Peneliti Utama	Pengelolaan Komponen Cadangan Matri Darat Dalam Pembangunan Postur Pertahanan Untuk Menghadapi Ancaman di Provinsi Kalimantan Barat
	2. Makmur Supriyanto, B.Sc., S.Pd., M.Pd	Brigjen TNI (Purn)	Dosen Prodi MP FMP Unhan RI	Anggota	
	3. Dr. Resmanto Widodo Putro, S.Sos., M.M.	Brigjen TNI	Dosen Prodi MP FMP Unhan RI	Anggota	
	4. Ir. Kristijarso, S.IP., M.M.	Kolonel Czi /32805	Kapuslit Tekindhan LPPM Unhan RI	Anggota	

4 Dr. Zainal...

1	2	3	4	5	6
4	1. Dr. Zainal Abidin S., M.M. 2. Dr. R. Djoko Andreas Navalino, S.I.P., M.AB 3. Dr. Djamarel Hermanto, S.T., M.M., M.T., CIQnR.	Kolonel (Purn) Kolonel Arh/1910046130568 Letkol Laut (PM) /13982/P	Dosen Prodi EP FMP Unhan RI Dosen Prodi EP FMP Unhan RI Dosen Prodi EP FMP Unhan RI	Peneliti Utama Anggota Anggota	Pengembangan Ekonomi Pertahanan di Desa Wisata Kertayasa Kab. Pangandaran Jawa Barat
5	1. Dr. Suyono Thamrin, Drs., S.T., M. Eng.Sc., CIQar., CIQnR, IPU 2. Wayan Nuriada, S.H, M.Si (Han) 3. Nugroho Adi Sasongko, S.T, M.Sc, Ph.D, CIQnR 4. Dr. Arifuddin Uksan, S.Ag., M.Ag., CIQnR	Laksda TNI Kolonel Cz/1900025270265 Penata III/d /198306192010121002 Kolonel Caj /11960014550170	Dosen Prodi KE FMP Unhan RI Dosen Prodi SPS FSP Unhan RI Dosen Prodi KE FMP Unhan RI Dosen Prodi MP FMP Unhan RI	Peneliti Utama Anggota Anggota Anggota	Perkembangan penguasaan teknologi kapal selam nuklir Australia terhadap stabilitas keamanan di Indo-Pasifik
6	1. Dr. Ir. Rudy Laksmmono W, M.T 2. Prof. Ir. M. Sidik Boedoyo, M.Eng 3. Dr. M. Ikhwan Syahtaria, S.T., MM	Pembina IV/c 195908121985031002 Pembina IV/e /195102201980091001 Kolonel Laut (S) /9869/P	Dosen Prodi KE FMP Unhan RI Dosen Prodi KE FMP Unhan RI Dosen Prodi SPL FSP Unhan RI	Peneliti Utama Anggota Anggota	Pengembangan Bio-Energi pada Lahan Kritis di NTT dalam Mendukung Ketahanan Energi Nasional
7	1. Dr. Ir. Imam Supriyadi, M.M 2. Dr. Ir. Suyono Thamrin, Drs., S.T., M.Eng.Sc., M.Tr.Opsla., CIQnR., CIQaR., IPU., CPHCM, CIPA 3. Dr. Ir. Yanif Dwi Kuntjoro, M.Si	Penata Tk I III/d Laksda TNI (Purn) Kolonel Laut (KH) 10052/P	Dosen Prodi KE FMP Unhan RI Dosen Prodi KE FMP Unhan RI Dosen Prodi Matematika FMIPAM Unhan RI	Peneliti Utama Anggota Anggota	Pengembangan PLTS dalam Memperkuat Ketahanan Energi di Pulau Semau, Perbatasan RI-RDTL

8 dr.RM Tjahja ...

1	2	3	4	5	
8	1. Dr. Haetami., M.Ag 2. Novky Asmoro., S.T., M.Si (Han) 3. Dr. R. Djoko Andreas Navalino., S.IP., M.AB	Pembina Tk. I IV/b /197009131995021001 Letkol Tek /527045 Kolonel Arh /1910046130568	Dosen Prodi EP FMP Unhan RI Dosen Prodi EP FMP Unhan RI Dosen Prodi EP FMP Unhan RI	Peneliti Utama Anggota Anggota	E B U K P B
9	1. Dr. Hikmat Zakky Almubaroq, S.Pd., M.Si. 2. Dr. Agus Sudarya, S.E., S.H.,M.M., M.Si (Han) 3. Dr. Lutfi Adin Affandi, M.M	Kolonel Tek / 518808 Marsda TNI (Purn) Kolonel Laut (P) 12171 (P)	Dosen Prodi SPU FSP Unhan RI Dosen Prodi MP FMP Unhan RI Dosen Prodi MP FMP Unhan RI	Peneliti Utama Anggota Anggota	M N V R R L M N
10	1. Dr. Posma Sariguna Johnson Kennedy, S.T., S.E., M.Si, M.SE. 2. Dr. Yudi Sutrasna M.M. 3. Dr. Haetami., M.Ag	- Brigjen TNI (Purn) Pembina Tk. I IV/b 197009131995021001	Dosen Prodi EP FMP Unhan RI Dosen Prodi EP FMP Unhan RI Dosen Prodi EP FMP Unhan RI	Peneliti Utama Anggota Anggota	F E F F T E
11	1. Dr. Ikhwan Syahtaria, ST., M.M. 2. Dr. Ir. Imam Supriyadi, M.M. 3. Dr. Ir. Donny Yoesgiantoro,MM, M.PA.	Kolonel Laut (S) /9869/P Penata Tk I III/d (Penyetaraan) Penata Tk I III/d (Penyetaraan)	Dosen Prodi KE FMP Unhan RI Dosen Prodi KE FMP Unhan RI Dosen Prodi KE FMP Unhan RI	Peneliti Utama Anggota Anggota	F F S I

1	2	3	4	5	6
12	1. Dr Guntur Eko Saputro, S.I.P. MM. 2. Dr Panji Suwarno, SE., M.Si., CIQnR 3. Dr. Suwito, M.Si.	Kolonel Arm/ 11950052670973 Kolonel Laut (KH) 11827/P Kolonel Sus/ 618312	Dosen Prodi EP FMP Unhan RI Dosen Prodi EP FMP Unhan RI Kapus Publikasi dan Jurnal Ilmiah LPPM Unhan RI	Peneliti Utama Anggota Anggota	Implementasi Kebijakan Elektronifikasi Ekonomi Digital Bank Indonesia Sebagai Bentuk Pertahanan Nirmiliter
13	1. dr.RM Tjahja Nurrobi, MKes, SpOT (K) Hand. 2. dr. Elies Fitriani, M.biomed (AAM), CIQaR., CIQnR. 3. dr. Venty Mulliana Sari, M.Sc., M.Si.Med., CIQaR. 4. dr. Radisty Alvarabie, M.biomed AIFO-K 5. dr. Hanifah, MKes., CIQnR.	Kolonel Laut (K) 10836/P - - - - Pembina IV/a 197408012006042002	Dosen Prodi Kedokteran FKM Unhan RI Dosen Prodi Kedokteran FKM Unhan RI Dosen Prodi Kedokteran FKM Unhan RI Dosen Prodi Kedokteran FKM Unhan RI Dosen Prodi Kedokteran FKM Unhan RI	Peneliti Utama Anggota Anggota Anggota Anggota	Efektivitas Media Pembelajaran Plastinasi dibandingkan Video Ajar terhadap Tingkat Pemahaman Ilmu Anatomi Sistem Muskuloskeletal pada Kader Mahasiswa FK Militer Unhan RI
14	1. dr. Taureni Hayati, Sp.PK (K) 2. Dr.dr. Reza Yuridan Purwoko, Sp.KK 3. dr. Elies Fitriani, M.biomed (AAM), CIQaR., CIQnR. 4. dr. Venty Mulliana Sari, M.Sc., M.Si.Med., CIQaR 5. dr. M. Dimas Reza Rahmana M.Biomed	- - - - -	Dosen Prodi Kedokteran FKM Unhan RI Dosen Prodi Kedokteran FKM Unhan RI Dosen Prodi Kedokteran FKM Unhan RI Dosen Prodi Kedokteran FKM Unhan RI Dosen Prodi Kedokteran FKM Unhan RI	Peneliti Utama Anggota Anggota Anggota Anggota	Pembuatan Panduan Metode Diagnostik Cut-Off dan Terapi Ajuvan Terhadap Peningkatan Antibodi Serta Imunitas Pra-Paska Vaksinasi Covid-19 Sebagai Suatu Model Ketahanan Nasional di Bidang Kesehatan


 a.n Rektor
 Universitas Pahlawan Revolusi
 Republik Indonesia,
 Warkop Bid. Umum dan Keuangan,
 Erwin Bambang Tetuko
 Mayor Jenderal TNI

